

LAPORAN AKHIR

RENCANA INDUK KELITBANGAN

KOTA PALEMBANG TAHUN 2024-2029



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA PALEMBANG

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang maha Esa atas karunia-Nya dan dukungan berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Akhir saRencana Induk Kelitbangan Kota Palembang Tahun 2024-2029. Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kota Palembang 2024-2029 telah memuat pokok-pokok pikiran yang akan menjadi landasan kegiatan kelitbangan di lingkungan Pemerintah Kota Palembang dalam kurun 5 tahun kedepan.

Rencana Induk Kelitbangan Kota Palembang 2024-2029 merupakan produk kebijakan yang diamanatkan oleh Peraturan Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Rencana Induk Kelitbangan Kota Palembang merupakan arahan dalam penyelenggaraan fungsi kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Target akhir yang diharapkan dicapai adalah terjawabnya tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan kelitbangan yang akan dilakukan diharapkan mampu menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan startegis di daerah. Terutama menjawab berbagai tantangan dan permasalahan perkotaan yang ada di Kota Palembang, serta mampu merumuskan strategi kebijakan dan prioritas pembangunan secara terpadu dan berkesinambungan.

Terima kasih disampaikan atas kerja keras dari tim penyusun, khususnya Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan bersama-sama dengan tim sehingga Rencana Induk Kelitbangan Kota Palembang dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih juga disampaikan kepada segenap perangkat daerah lain dan unsur-unsur masyarakat yang telah memberikan sumbang sarannya sehingga dokumen ini dapat menjadi panduan kelitbangan kedepan. Dokumen ini juga diharapkan dapat mendorong sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan Kota Palembang yang berkelanjutan kedepannya

Palembang, Juni 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

COVER.....	
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Tujuan dan Sasaran	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB 2 GAMBARAN UMUM KELITBANGAN.....	8
2.1 Gambaran Umum Wilayah	9
2.1.1. Aspek Administratif dan Geografis	9
2.1.2. Aspek Perekonomian Daerah	19
2.1.3. Kondisi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	20
2.1.4. Sosial dan Kemasyarakatan	22
2.1.5. Kondisi Ekonomi dan Pembangunan.....	24
2.2 Sumber Daya Kelitbangan	26
2.2.1. Sumber Daya Manusia Kelitbangan	26
2.2.2. Kerjasama Kelitbangan.....	28
2.2.3. Pendanaan Kelitbangan	30
2.3 Potensi dan Permasalahan.....	31
2.3.1. Kualitas Air Sungai Musi	32
2.3.2. Kualitas Udara Kota Palembang.....	33
2.3.3. Sampah di Kota Palembang.....	33
2.3.4. Kantung Parkir.....	34

2.3.5.	Rumah Singgah.....	34
2.3.6.	Koordinasi Pendataan Unit Perangkat Daerah (UPD)	35
2.3.7.	Kualitas Udara Kota Palembang.....	37
2.3.8.	Revitalisasi Pasar	38
2.3.9.	Penanggulangan bencana, Mitigasi dan Keterlibatan UD Damkar dalam Program TIK (Teknologi Informatika dan Komunikasi).....	39
2.3.10.	Sarana dan Prasarana Olahraga Kota Palembang.....	43
2.3.11.	Penanaman Modal Kota Palembang.....	44
2.3.12.	Stunting.....	46
2.3.13.	Kajian Ekonomi Terhadap Jalan Tol Kota Palembang dengan Kota- Kota Terkait	48
2.3.14.	Karakteristik Dasar ASN dalam Rencana Penerapan Standar Program TIK.....	49
2.3.15.	Tempat Penitipan Anak	51
2.3.16.	Dinas Pertanian dalam Penerapan Food Security and Safet, Masalah Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Keterlibatan UPD dalam program TIK.....	52
2.4	Potensi	56
2.5	Permasalahan	57
2.6	Peluang dan Tantangan.....	56
2.6.1.	Peluang	59
2.6.2.	Tantangan	60
BAB 3 ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN.....		62
3.1	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.....	63
3.1.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	63
3.1.2	3.1.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator beserta target dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palembang Tahun 2024-2026.....	67

3.2	Strategi dan Arah Kebijakan Kelitbangan Daerah.....	77
3.2.1.	Strategi Kelitbangan Daerah.....	77
3.2.2.	Arah Kebijakan Kelitbangan Daerah.....	84
3.3	Indikasi Program Prioritas Kelitbangan.....	55
BAB 4 STRATEGI PELAKSANAAN		118
4.1	Kelembagaan	119
4.1.1.	Koordinasi Pelaksanaan.....	119
4.1.2.	Keterlibatan Institusi Kelitbangan	120
4.1.3.	Kerjasama dan Sinergi Pelaksanaan	121
4.2	Evaluasi Pelaksanaan.....	121
BAB 5 PENUTUP		125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Batas Administrasi Kota Palembang.....	10
Gambar 2.2	Grafik Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk, Menurut Kecamatan di Kota Palembang, 2022	16
Gambar 2.3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Palembang tahun 2017-2022.....	18
Gambar 2.4	Infografis Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang tahun 2013-2022	25
Gambar 2.5	Kerjasama Kelitbangan.....	28
Gambar 2.6	Indeks Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Dinas Sosial Kota Palembang Trimester I – Maret 2023	35
Gambar 2.7	Grafik Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan	52
Gambar 3.1	Misi dan Agenda Pembangunan RPJMD tahun 2020-2024	64
Gambar 3.2	Implementasi Arah Kebijakan ke dalam Tujuan	64
Gambar 3.3	Ilustrasi Kondisi dan Kemantapan Jalan Kota Palembang Tahun 2022	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Keluarga Menurut Kecamatan di Kota Palembang, 2022	13
Tabel 2.2 Jumlah Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Keluarga Menurut Kecamatan di Kota Palembang	13
Tabel 2.3 Pendidikan tertinggi yang ditamatkan, penduduk Kota Palembang yang bekerja (15 tahun ke atas)	15
Tabel 2.4 Angka Partisipasi Murni (AMP) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Palembang, 2021 dan 2022	16
Tabel 2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan tingkat Pengangguran Penduduk Berumur 15 tahun keatas menurut jenis kelamin di Kota Palembang, 2022	15
Tabel 2.6 Bidang Pekerjaan, Penduduk Kota Palembang yang Bekerja (15 tahun ke atas)	17
Tabel 2.7 Kelompok Umur, Penduduk Kota Palembang yang Bekerja (15 tahun ke atas).....	17
Tabel 2.8 Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia tahun 2017-2022.....	18
Tabel 2.9 PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kota Palembang.....	19
Tabel 2.10 Pencapaian Tata Kelola Pemerintah Kota Palembang Tahun 2017-2021	21
Tabel 2.11 Komposisi Sumber Daya Manusia Kelitbangan Berdasarkan Jenjang Pendidikan 21	
Tabel 2.12 Komposisi PNS Berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang	21
Tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Litbang Kota Palembang Menurut Kelompok Belanja Tahun 2013-2017	30
Tabel 2.14 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Litbang Kota Palembang Menurut Jenis Belanja Tahun 2013-2017	31
Tabel 2.15 Potensi Kerentanan Multibahaya di Provinsi Sumatera Selatan	41
Tabel 2.16 Data Fasilitas Olahraga Dispora Kota Palembang	43
Tabel 3.1 Tujuan dan Indikator Tujuan RPD Kota Palembang Tahun 2024-2026	65
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Rencana Pembangunan Daerah Kota Palembang Tahun 2024-2026	67
Tabel 3.3 Ilustrasi Kondisi dan Kemantapan Jalan Kota Palembang Tahun 2022.....	71

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Terlaksananya Good Governance Practices dan Tata Kelola Pemerintah yang berdaya saing tahun 2019-2022	71
Tabel 3.5 Keselarasan dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam RPD Kota -RPD Provinsi – RPJMN.....	73
Tabel 3.6 Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan strategi pembangunan daerah Kota Palembang tahun 2024-2026	78
Tabel 3.7 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan daerah Kota Palembang Tahun 2024-2026	87
Tabel 3.8 Program Prioritas Kota Palembang	91
Tabel 3.9 Rencana Program/ Kegiatan Kelitbangan Daerah untuk tahun pelaksanaa 2024-2029	113

BAB I

PENDAHULUAN



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah kota perkotaan menghadapi berbagai tantangan dalam aspek ekonomi, sosial, dan pembangunan. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan dalam pembangunan, berbagai pendekatan telah diambil, salah satunya melalui fasilitas pelayanan. Pemerintah Kota Palembang memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan-layanan ini dengan mengikuti kriteria tertentu, karena kota tersebut diharapkan menjadi tempat tinggal yang memberikan harapan bagi masyarakat.

Hingga saat ini, masalah kemiskinan dan pengangguran merupakan tantangan dalam pembangunan kota. Selain itu, pengelolaan wilayah juga menjadi isu yang harus diatasi. Pemerintah Kota Palembang telah menetapkan target kinerja untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat perkotaan. Untuk mencapai target ini dengan cepat, diperlukan strategi-strategi inovatif yang dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan efektivitas pembangunan. Salah satu cara untuk mengakselerasi kinerja pemerintah adalah dengan memanfaatkan pengetahuan tentang perekonomian.

Kota Palembang telah mengambil langkah maju dalam memberikan layanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberhasilan ini didasarkan pada kebijakan-kebijakan inovatif yang memerlukan tindakan-tindakan yang didasarkan pada pengetahuan dan hasil kelitbangan yang tepat guna. Tindakan-tindakan ini merupakan program-program pembangunan yang terencana dengan baik dan dapat diukur. Kelitbangan merupakan instrumen yang berperan dalam menciptakan pengetahuan baru untuk mencapai berbagai program pemerintah. Instrumen ini berbentuk inovasi dan kebijakan yang memajukan penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan daya saing, kesejahteraan masyarakat Kota Palembang, serta membantu pemerintah mencapai tujuan-tujuan pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya pengetahuan. Upaya ini juga memerlukan kolaborasi kerja dan melibatkan pemangku kepentingan.

Kelitbangan Kota Palembang merupakan landasan awal bagi setiap agenda pembangunan yang telah diinstitutionalisasi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan sistematis yang menekankan pada agenda pemerintahan, sosial, ekonomi, dan inovasi. Rencana Induk Kelitbangan Kota Palembang merupakan rencana partisipatif untuk penggunaan pengetahuan.

Rencana ini merupakan bagian penting yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang pedoman penelitian dan pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan rencana induk kelitbangan untuk mengidentifikasi berbagai agenda kelitbangan dengan pendekatan perencanaan fungsional. Rencana ini akan memetakan kebutuhan penciptaan pengetahuan dan inovasi serta menghasilkan kebijakan, kerangka kerja inovasi, dan regulasi yang mendukung pemberian layanan dan peningkatan daya saing daerah. Kelitbangan juga melibatkan sumber daya intelektual yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Penguasaan intelektual ini merupakan sumber daya yang terus dikembangkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Rencana Induk Kelitbangan membantu menyelenggarakan kelitbangan secara sistematis. Kelitbangan memproyeksikan agenda-agenda antisipatif untuk merespons perubahan yang terjadi di tingkat masyarakat. Kelitbangan ini berdasarkan pada fungsi yang menghasilkan pengetahuan sesuai dengan kearifan lokal. Kelitbangan tidak dapat dipisahkan dari aspek-aspek kehidupan sosial dan ekonomi Kota Palembang. Pembangunan sosial yang didasarkan pada kelitbangan menciptakan agenda-agenda yang mengurangi kesenjangan wilayah, termasuk strategi inovasi sosial yang dapat dimanfaatkan. Pemerintahan daerah yang berkualitas dengan kemampuan menghasilkan inovasi dari penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah dan masyarakat, serta perencanaan kelitbangan yang baik, akan mencapai keselarasan dalam pendekatan dan paradigma dalam berbagai program pembangunan dan memperkuat kinerja pemerintah Kota Palembang.

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh pemerintah daerah memegang peranan penting dalam mengatasi permasalahan di berbagai bidang. Hasil dari kelitbangan di kota Palembang diharapkan mampu menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan strategis di daerah. Terutama menjawab berbagai tantangan dan permasalahan perkotaan yang ada di Kota Palembang, serta mampu merumuskan strategi kebijakan dan prioritas pembangunan secara terpadu dan berkesinambungan. Oleh karena itu perlu dilakukan penyusunan kerangka kelitbangan pemerintah daerah yang mengakomodir berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam satu konsep rencana kelitbangan secara komprehensif dan sinergis melalui Rencana Induk Kelitbangan Kota Palembang Tahun 2024-2029.

1.2 Dasar Hukum

Landasan penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kota Palembang Tahun 2024-2029 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kota Palembang
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019. Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil penelitian dan pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga penelitian dan pengembangan.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenkelatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenkelatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197)

1.3 Tujuan dan Sasaran

Kegiatan ini bertujuan untuk membuat dokumen Rencana Induk Kelitbangan Kota Palembang Tahun 2024-2029 sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan kelitbangan di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, adapun sasaran dari kegiatan ini adalah:

1. Tersedianya pedoman kerja kegiatan kelitbangan.
2. Terlaksananya kegiatan kelitbangan yang efektif, efisien, sinergis dan terkoordinasi.
3. Meningkatnya kualitas kegiatan kelitbangan.
4. Meningkatnya pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan sebagai rekomendasi kebijakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan pada Kota Palembangn memiliki sistematika yang terdiri dari 5 (lima) Bab, yaitu:

Bab 1. Pendahuluan. Bab ini terdiri dari :

- Latar Belakang, menguraikan padangan umum secara singkat terkait dengan rencana induk kelitbangan Kota Palembang
- Dasar Hukum, berbagai regulasi peraturan yang erat menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Induk Kelitbangan
- Tujuan dan Sasaran, menguraikan frase tujuan dan sasaran dari penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kota Palembang

- Sistematika Penulisan, menjelaskan pembab-an dalam penyusunan Rencana Induk Kelitbangan.

Bab 2. Gambaran Umum Kelitbangan, dibagi kedalam:

- Gambaran Umum Wilayah, menguraikan berbagai kondisi pencapaian pembangunan dan kinerja pemerintah Kota Palembang saat ini.
- Kondisi sumberdaya kelitbangan, menguraikan berbagai kondisi terkini dari kelembagaan, pengelolaan kelitbangan, pendanaan serta berbagai langkah kerjasama kelitbangan yang hendak dilakukan
- Potensi dan Permasalahan, mengidentifikasi berbagai potensi dan permasalahan di Kota Palembang guna dijadikan landasan inisiatif dari kelitbangan yang akan dilakukan.
- Peluang dan tantangan, memilih berbagai peluang dan tantangan yang dimiliki dalam penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan tercipta dari aktivitas pemerintah, masyarakat, serta pelaku pembangunan lainnya.

Bab 3. Arah Kebijakan Kelitbangan, Merumuskan kebijakan kelitbangan dimulai dari perumusan, antara lain:

- Arah kebijakan pembangunan daerah, yang menguraikan arah kebijakan dan strategi jangka panjang pembangunan daerah, visi dan misi
- Arah kebijakan dan strategi kelitbangan daerah, yang menguraikan arah kebijakan dan strategi
- Indikasi program prioritas kelitbangan daerah, yang menjelaskan program prioritas bidang tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik, program prioritas bidang sosial dan kemasyarakatan, program prioritas bidang ekonomi dan pembangunan serta program prioritas bidang inovasi dan pengembangan IPTEK.

Bab 4. Strategi Pelaksanaan, Menjelaskan antara lain:

- Kelembagaan yang menguraikan bentuk koordinasi pelaksanaan, keterlibatan institusi kelitbangan, kerjasama dan sinergitas pelaksanaan
- Evaluasi Pelaksanaan, menjelaskan evaluasi guna menjaga konsistensi pencapaian berbagai program/kegiatan dalam rencana Induk Kelitbangan.

Bab 5. Penutup

Menguraikan secara singkat tentang pemanfaatan Rencana Induk Kelitbangan dalam mendukung berbagai kebijakan dan inovasi daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KELITBANGAN



BAB 2 GAMBARAN UMUM KELITBANGAN

2.1 Gambaran Umum Wilayah

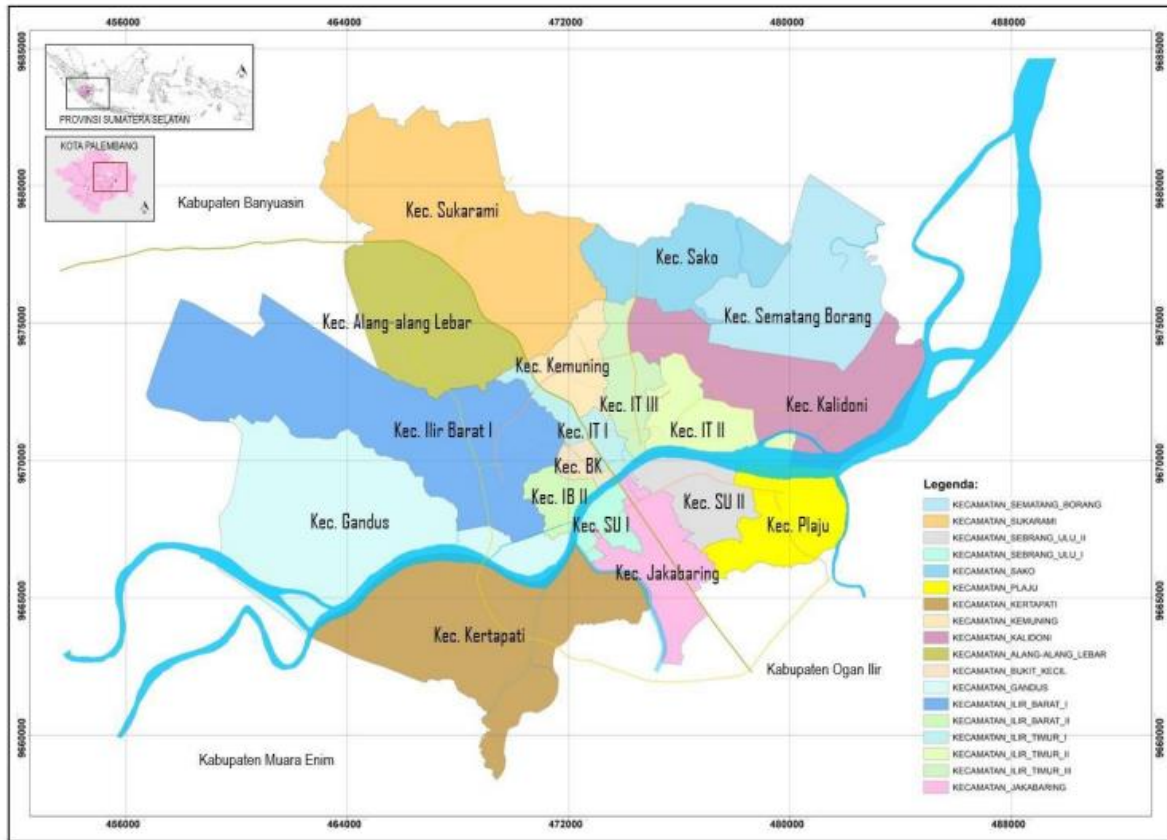
Gambaran umum wilayah merupakan penjelasan umum mengenai kondisi Kota Palembang yang disajikan dalam aspek administratif dan geografis, demografi, perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, kesempatan kerja, pembangunan infrastruktur, lingkungan hidup. Uraian berbagai aspek gambaran umum tersebut tersaji sebagai berikut.

Secara umum Kota Palembang memiliki luas mencapai 352,51 km². Secara administratif Kota Palembang terdiri dari 18 kecamatan dan 107 Kelurahan. Kehadiran pemerintahan paling bawah diharapkan memiliki kedekatan pelayanan langsung kepada masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan Kota Palembang dengan berbasis kelitbangan mengupayakan penciptaan berbagai kinerja kelitbangan yang menghadirkan inovasi dan regulasi yang bermuara pada penyelesaian permasalahan di masyarakat.

2.1.1 Aspek Administratif dan Geografis

Kota Palembang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Selatan yang secara administratif berbatasan dengan beberapa kabupaten/ kota lainnya. Kota Palembang memiliki luas wilayah sebesar 352,51 km², yang terbagi atas 18 kecamatan dan 107 kelurahan, dibantu oleh masyarakat dalam bentuk organisasi rukun warga sejumlah 916 Rukun Warga (RW) dan 4.171 Rukun Tetangga (RT)..

Secara astronomis Kota Palembang berada pada 2° 52' - 3° 5' Lintang Selatan dan 104° 37' - 104° 52' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Palembang memiliki batas-batas: Utara, Timur, Barat – Kabupaten Banyuasin, Selatan – Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Ilir.



Gambar 2.1 Peta Batas Administrasi Kota Palembang
 Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Kota Palembang Tahun 2024-2026

Ketinggian Kota rata-rata 8 meter dari permukaan laut. Letak Palembang cukup strategis karena dilalui oleh jalan Lintas Sumatra yang menghubungkan antar daerah di Pulau Sumatra. Palembang sendiri dapat dicapai melalui penerbangan dari berbagai kota di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bandar Lampung, Bengkulu, Pangkal Pinang, Tanjung Pandan (via Pangkal Pinang), Jambi, Lubuk Linggau, Padang, Pekanbaru, Batam, Medan, dan Denpasar-Bali. Serta dari luar negeri yaitu Singapura, Kuala Lumpur, serta Jeddah (musim haji) Selain itu di Palembang juga terdapat Sungai Musi yang dilintasi Jembatan Ampera dan berfungsi sebagai sarana transportasi dan perdagangan antar wilayah.

Iklim Palembang merupakan iklim daerah tropis dengan angin lembap nisbi, kecepatan angin berkisar antara 2,3 km/jam–4,5 km/jam. Suhu kota berkisar antara 23,4–31,7 derajat celsius. Curah hujan per tahun berkisar antara 2.000 mm–3.000 mm. Kelembaban udara berkisar

antara 75–89% dengan rata-rata penyinaran matahari 45%. Keadaan topografi Kota Palembang, pada umumnya merupakan dataran rendah dimana terdapat perbedaan karakter topografi antara Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Wilayah Seberang Ulu pada umumnya mempunyai topografi yang relatif datar dan sebagian besar dengan tanah asli berada di bawah permukaan air pasang maksimum Sungai Musi ($\pm 3,75$ meter di atas permukaan laut) kecuali lahan-lahan yang telah dibangun dan akan dibangun dimana permukaan tanah telah mengalami penimbunan dan reklamasi. Pada wilayah Seberang Ilir ditemui adanya variasi topografi (ketinggian) dari 4 meter sampai 20 meter di atas permukaan laut dan juga tidak terdapat topografi yang terjal. Dengan demikian dari aspek topografi pada prinsipnya tidak ada faktor pembatas berupa kemiringan atau kelerengan yang besar untuk pemanfaatan ruang.

Adanya perbedaan karakter topografi di Kota Palembang (kawasan Seberang Ulu dengan Seberang Ilir) terkait dengan kondisi hidrologi, berupa keadaan anak-anak sungai dalam wilayah. Pada wilayah Seberang Ulu terdapat anak-anak sungai yang relatif besar dengan muara pada Sungai Musi. Anak-anak Sungai Musi yang relatif besar dan berhulu di Pegunungan Bukit Barisan adalah Sungai Ogan dan Sungai Komering Sedangkan anak-anak Sungai Musi yang relatif kecil adalah Sungai Keramasan yang berhulu di Kabupaten Muara Enim. Selain anak-anak sungai tersebut, terdapat pula anak-anak sungai kecil dan pendek yang bermuara pada Sungai Musi dan berhulu pada wilayah Kota Palembang dan kawasan sekitarnya, seperti Sungai Aur, dan Sungai Sriguna. Pada wilayah Seberang Ilir, aliran anak-anak sungai terbagi menjadi dua sesuai dengan karakteristik topografi yang ada, berupa adanya punggung topografi. Pada bagian Selatan punggung, terdapat anak-anak sungai yang mengalir pada Sungai Musi dan berhulu pada punggung topografi. Anak-anak sungai tersebut meliputi Sungai Lambidaro, Sekanak, Buah, Batang, Selincah dan sebagainya. Pada bagian utara punggung terdapat anak-anak sungai yang mengalir ke utara, yang bermuara antara lain ke Sungai Kenten. (Sumber: RTRW Kota Palembang 2012-2032).

Keadaan musim yang terdapat di Kota Palembang sama seperti umumnya yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia yaitu musim hujan dan musim kemarau. Keadaan alam Kota Palembang merupakan daerah tropis lembab nisbi. Pada Tahun 2022, suhu maksimum terjadi pada bulan Juni dan Oktober yang berkisar 35,100 oC, sedangkan suhu udara minimum terjadi pada bulan September yang berkisar 19,800oC. Rata-rata curah hujan selama tahun 2022 berkisar antara 97,2 mm (Juli) sampai 407,30 mm (Januari). Palembang mempunyai

kelembaban udara relatif tinggi dimana pada tahun 2022 rata-rata berkisar antara 81,00% (Maret) sampai 84,30% (Januari) dengan kecepatan angin hampir di seluruh wilayah Palembang merata setiap bulannya, yaitu berkisar antara 3,20 m/det hingga 4,40 m/det.

Di tahun 2023 ini, fenomena cuaca panas melanda seluruh dunia termasuk Kota Palembang. Menurut Kepala Stasiun Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Kelas I Sumatra Selatan (BMKG Sumsel), Wandayantolis, suhu panas yang terjadi di Palembang bukan hanya karena curah hujan yang menurun. Suhu maksimum yang berlangsung selama Mei 2023 memengaruhi cuaca panas sangat menyengat. Secara klimatologis, puncak suhu maksimum pertama terjadi pada awal Mei, sementara puncak suhu maksimum yang kedua dan tertinggi terjadi pada akhir Oktober. Jadi, kondisi ini (suhu panas) diprediksi terus terjadi hingga Oktober. Berdasarkan hasil riset BMKG Sumsel, Palembang berada pada puncak suhu panas tertinggi di Mei 2023. Suhu udara bisa lebih dari 34° Celsius pada siang hari dan sampai 32° Celcius di malam hari. Hal ini menjadi penting untuk beberapa tahun kedepan sebagai salah satu fokus yang perlu dipertimbangkan untuk segala aspek bidang yang akan melakukan kegiatan pelaksanaan dalam rangka memajukan Kota Palembang.

Penduduk menjadi salah satu potensi sekaligus target pembangunan yang disajikan oleh pemerintah Kota guna peningkatan taraf hidup masyarakatnya. Penyediaan berbagai program tentunya memberikan makna bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang tepat sasaran serta memenuhi target yang tersedia. Untuk itu, Kelitbangan disini diharapkan sebagai upaya melihat konstruksi program pembangunan dan kinerja pemerintah Kota Palembang yang terukur.

Penduduk bersama kondisi wilayah Kota Palembang menjadi sebuah potensi yang harus dikelola dengan baik guna pemenuhan kesejahteraan masyarakat yang didekatkan dengan kelitbangan dalam berbagai aspek pembangunan. Penduduk dalam satu wilayah bekerja dengan memanfaatkan berbagai sumber dan potensi yang dimiliki baik di potensi masyarakat berupa *skill* serta sumberdaya lainnya yang tersedia pada kota Palembang.

Saat ini berdasarkan data Kota Palembang dalam Angka 2023, Jumlah penduduk Kota Palembang tahun 2022 sebanyak 1.729.546 jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki 865.942 jiwa dan perempuan sebanyak 863.604 Jiwa. Rasio Laki-laki lebih bbesar sedikit dibandingkan dengan rasio perempuan. Berikut tabel data selengkapnya mengenai jumlah penduduk per kecamatan di Kota Palembang tahun 2022 :

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Palembang, 2022

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Illir Barat II	34.137	33.889	68.026
2	Gandus	39.919	38.803	78.722
3	Seberang Ulu I	47.105	45.908	93.013
4	Kerapati	47.917	46.240	94.157
5	Jakabaring	46.655	45.591	92.246
6	Sebrang Ulu II	51.117	50.328	101.445
7	Plaju	48.234	48.327	96.561
8	Iilir Barat I	71.754	72.601	144.355
9	Bukit Kecil	19.158	19.546	38.704
10	Iilir Timur I	32.250	34.122	66.372
11	Kemuning	40.109	40.825	80.934
12	Iilir Timur II	42.712	43.012	85.724
13	Kalidoni	64.340	64.123	128.463
14	Iilir Timur III	36.851	36.385	73.236
15	Sako	58.667	59.546	118.213
16	Sematang Borang	31.524	31.014	62.538
17	Sukarami	98.523	98.229	196.752
18	Alang-Alang Lebar	54.970	55.115	110.085
	Total	865.942	863.604	1.729.546

Sumber: Kota Palembang Dalam Angka, 2023

Jumlah keluarga pada tahun 2022 berdasarkan data Kota Palembang dalam angka tahun 2022 sebanyak 353.969 keluarga. Berikut tabel data jumlah keluarga di Kota Palembang, berdasarkan kecamatan:

Tabel 2.2 Jumlah Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Keluarga Menurut Kecamatan di Kota Palembang, 2022

Kecamatan	Rukun Warga	Rukun Tetangga	Keluarga
Illir Barat II	50	203	15.151
Gandus	38	184	14.058
Seberang Ulu Satu	49	248	19.033
Kertapati	50	257	22.517
Jakabaring	45	214	18.201
Seberang Ulu Dua	63	264	23.569
Plaju	62	235	23.286
Illir Barat Satu	67	301	29.416
Bukitkecil	39	155	7.630
Iilir Timur Satu	66	264	14.629
Kemuning	51	200	16.998

Kecamatan	Rukun Warga	Rukun Tetangga	Keluarga
Iilir Timur Dua	44	190	17.811
Kalidoni	41	249	26.020
Iilir Timur Tiga	36	175	15.095
Sako	62	276	20.958
Sematangborang	28	131	12.381
Sukarami	70	387	36.704
Alang-Alang Lebar	50	237	20.512
	911	4.170	353.969

Sumber : Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang Women's Empowerment Service, Child Protection and Community Empowerment in Palembang Municipality and Family Planning Control Office of Palembang Municipality // Kota Palembang dalam Angka tahun 2023.

Selain jumlah penduduk kualitas penduduk dalam capaian angka partisipasi murni dalam Pendidikan bervariasi pada setiap jenjangnya. APM pada tahun 2022 untuk Sekolah Dasar sebesar 95,57 Sedangkan APM untuk Tingkat SLTP dan SLTA masing-masing sebesar 72,36 dan 62,51.

Teramati angka capaian tingkat Pendidikan tersebut pada tingkat SD hampir mendekati angka 100 %, bila di banding pada jenjang Pendidikan lanjutan setalahnya masih berada jauh dari target capaiannya. Hal tersebut, menjadi tantangan dalam pemerintah Kota Palembang dengan memberikan fokus pada pelayanan dasar pada Pendidikan dasar dan menengah.

Tabel 2.3 Pendidikan tertinggi yang ditamatkan, penduduk Kota Palembang yang bekerja (15 tahun ke atas)

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (AMP)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2021	2022	2021	2022
SD/MI	93.3	97.85	107.96	111.05
SMP/MTs	69.62	75.10	90.37	79.64
SMA/SMK/MA	62.74	62.29	102.3	96.66

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakemas) Agustus

Pendidikan tertinggi yang di tamatkan penduduk Kota Palembang yang bekerja (15 tahun ke atas) adalah Perguruan Tinggi. Ini menandakan tingkat kesadaran akan Pendidikan di Kota Palembang sudah maju dan mampu berdaya saing.

Tabel 2.4 Angka Partisipasi Murni (AMP) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan di Kota Palembang, 2021 dan 2022

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan*	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah	Persentase Angkatan Kerja terhadap penduduk usia kerja
Sekolah dasar atau kurang	96.517	256.136	62.32
SMP	123.891	240.109	48.40
SMA	199.078	565.477	64.79
S1	50.198	260.621	80.74
Jumlah	469.684	1.322.343	64.48

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (susenas)/ Kota Palembang Dalam Angka 2023

Data menunjukkan adanya peningkatan dalam tingkat pendidikan angkatan kerja seiring dengan peningkatan jenjang pendidikan. Persentase angkatan kerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi (SMA dan S1) cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan angkatan kerja dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah (Sekolah Dasar atau kurang dan SMP). Tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat memberikan peluang yang lebih baik dalam mencari pekerjaan yang lebih baik, memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Namun, masih terdapat sebagian besar angkatan kerja dengan tingkat pendidikan yang terbatas, seperti Sekolah Dasar atau kurang dan SMP, yang memerlukan upaya untuk meningkatkan akses mereka ke pendidikan dan pelatihan keterampilan guna meningkatkan kesempatan kerja yang lebih baik.

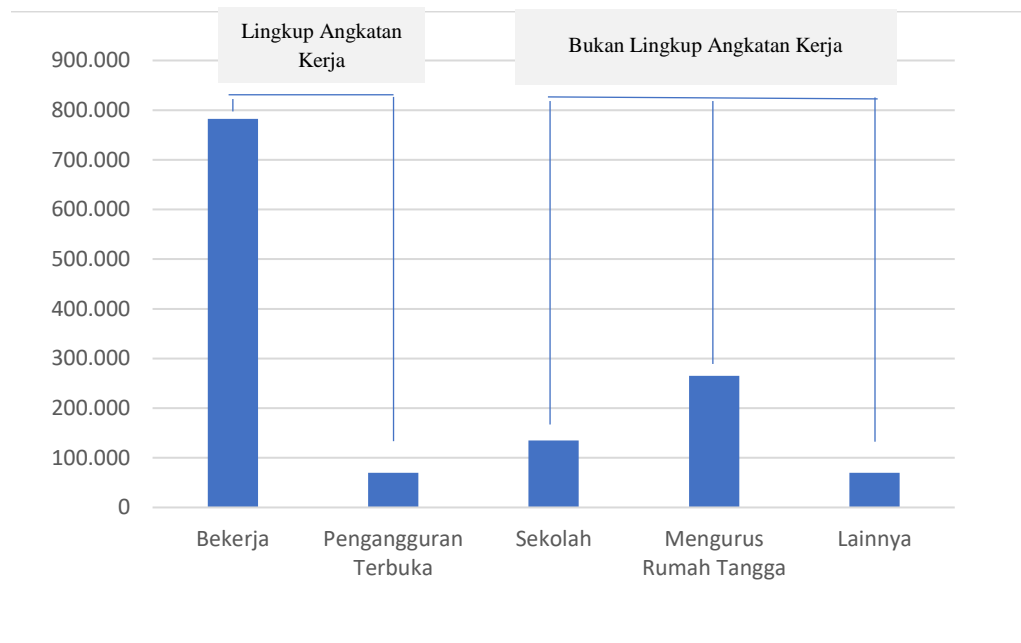
Pada tahun 2022 jumlah angkatan kerja di Kota Palembang sebanyak 852.659 orang. Dari keseluruhan angkatan kerja tersebut, 91,8 % diantaranya merupakan penduduk yang bekerja. Sementara tingkat pengangguran Kota Palembang pada tahun 2022 sebesar 8,2 %. Angka Pengangguran ini dihitung dengan mendefinisikan menganggur sebagai mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan dan sudah mendapat pekerjaan tetap tetapi belum mulai bekerja. Pertumbuhan SDM yang terjadi di Kota Palembang tidak dibarengi dengan peningkatan penyerapan ketenagakerjaan, sehingga

diperlukan diskusi lanjut mengenai penyetaraan/ peningkatan dalam hal ini sebagaimana semestinya guna meningkatkan nilai Sumber Daya Manusia itu sendiri.

Tabel 2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin di Kota Palembang, 2022

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Angkatan Kerja	517.758	334.901	852.659
Bekerja	470.452	312.277	782.729
Pengangguran	47.306	22.624	69.930
Bukan Angkatan Kerja	136.033	333.651	469.684
Sekolah	63.210	71.685	134.895
Mengurus Rumah Tangga	20.585	244.188	264.773
Lainnya	52.238	17.778	70.016
Jumlah	653.791	668.552	70.016

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional, Agustus/ Kota Palembang Dalam Angka, 2023



Gambar 2.2 Grafik Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk, Menurut Kecamatan

Berdasarkan data tahun 2022, Jumlah masyarakat yang bekerja dalam lingkup angkatan kerja adalah sebesar 470.452 jiwa (90,86%), sedangkan pengangguran terbuka adalah sebesar 47.306 jiwa (9,13%). Angka pengangguran ini dihitung dengan mendefinisikan menganggur sebagai mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan tetap tetapi belum mulai bekerja. Sedangkan kegiatan lain masyarakat dalam golongan yang bukan angkatan kerja terbagi menjadi 3 kelompok utama diantaranya sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya.

Tabel 2.6 Bidang Pekerjaan, Penduduk Kota Palembang yang Bekerja (15 Tahun ke Atas)

Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pertanian	12.770	488	13.258
Industri Pengolahan	148.293	39.256	187.549
Jasa	309.389	272.533	581.922
Jumlah	470.452	312.277	782.729

Sumber : BPS, Survei Angkatan kerja Nasional (Sakernas) Agustus/ Kota Palembang Dalam Angka, 2023

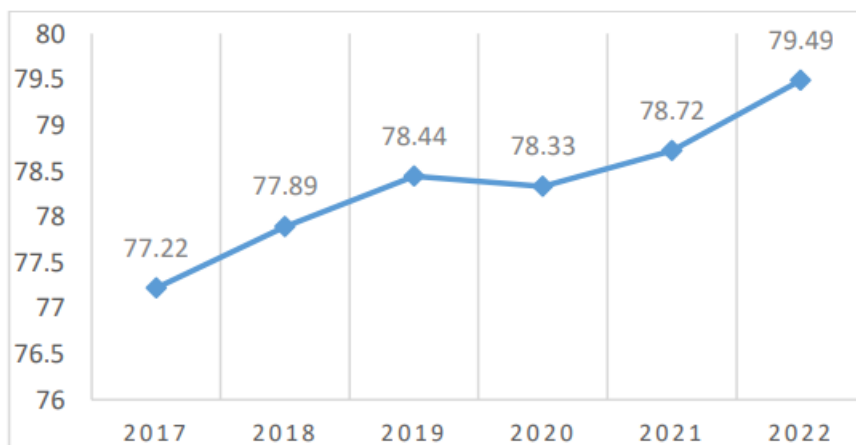
Tabel 2.7 Kelompok Umur, Penduduk Kota Palembang yang Bekerja (15 Tahun ke Atas)

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
15-24	45.712	50.909	96.621
25-30	68.770	48.311	117.081
31-34	52.225	30.306	82.531
35-44	124.587	77.963	202.550
45-54	104.897	59.493	164.390
55-59	38.793	24.642	64.435
60-64	19.834	6.855	26.689
65+	15.634	13.798	29.432
Jumlah	470.452	312.277	782.729

Sumber : Kota Palembang Dalam Angka, 2023

Dari data tabel Kota Palembang Dalam Angka Tahun 2023, diketahui bahwa Bidang Pekerjaan Jasa mendominasi pekerjaan masyarakat Kota Palembang. Berjumlah sebesar 581.922 orang dengan dominasi umur produktif 35-44 tahun.

Selanjutnya angka harapan hidup penduduk kota Palembang pada tahun 2022 yang memiliki nilai mencapai 78,49.



Gambar 2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Palembang tahun 2017-2022

Sumber : BPS Kota Palembang 2023 (PDA Tahun 2023)

Tabel 2.8 Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia tahun 2017-2022

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup (tahun)	70,1	70,32	70,54	70,79	71,01	71,49
Rata-rata Lama sekolah (tahun)	10,36	10,37	10,52	10,53	10,75	10,91
Arapan Lama Sekolah (tahun)	14,11	14,39	14,4	14,41	14,42	14,43
Pengeluaran per kapita (Rp ribu/thn)	14,277	14,697	15,087	14,679	14,704	15,168
Indeks Pembangunan Manusia	77,22	77,89	78,44	78,33	78,72	79,49

Sumber : BPS Kota Palembang 2023 (PDA Tahun 2023)

2.1.2 Aspek Perekonomian Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator utama untuk mengukur pertumbuhan perekonomian di suatu wilayah. Selama lima tahun terakhir, PDRB Kota Palembang dengan migas atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 nilai tambah yang terbentuk sebesar 141.908,62 miliar rupiah. Pada tahun 2019, angka ini sebesar 154,220.31 miliar rupiah, tahun 2020 sebesar 155.203,91 miliar rupiah dan tahun 2021 sebesar 162.137,29 miliar rupiah. Pada tahun 2022, nilainya menjadi sebesar 179.199,80 miliar rupiah.

Berdasarkan harga berlaku dengan migas, terdapat dua sektor yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap PDRB. Pada tahun 2022, dua sektor yang memberikan sumbangan terbesar adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor diikuti oleh sektor Transportasi dan Pergudangan. Pada tahun 2022 kontribusi masing-masing sektor di atas secara berurutan adalah 18,02 %, dan 5,13 %. Dibanding kondisi tahun sebelumnya, peran sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor meningkat sebesar 0,57 %. Sedangkan sektor konstruksi menurun 0,4 %.

Tiga sektor besar yang mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Keuangan dan Asuransi dan Pertambangan dan Penggalian. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial meningkat dari sebesar 6,45 persen tahun 2019 menjadi 11,06 % tahun 2020, Jasa Keuangan dan Asuransi meningkat dari sebesar -1,71 % tahun 2019 menjadi 1,35 % tahun 2020, Pertambangan dan Penggalian meningkat dari sebesar 3,19 % tahun 2019 menjadi 5,55 persen tahun 2020. Sedangkan sektor yang mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi terbesar adalah Penyediaan akomodasi dan makan minum dari sebesar 4,57% tahun 2021 menjadi 14,53 persen tahun 2022 atau meningkat sebesar 314 %. Secara lebih jelas, laju pertumbuhan PDRB dari tahun 2018 hingga 2022 menurut lapangan usaha di Kota Palembang dapat dilihat pada tabel berikut :

	Lapangan Usaha	2018 ^r	2019*	2020*	2021**	2022**
A	Pertanian, kehutanan dan perikanan	688,01	726,91	741,80	755,03	771,73
B	Pertambangan dan penggalian	6,83	7,14	7,62	7,55	7,70
C	Industri Pengolahan	45.697,69	48.433,53	48.745,04	52.027,78	57.742,07

D	Pendanaan listrik dan gas	254,05	265,30	291,80	308,05	321,59
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	426,44	474,62	510,96	499,44	508,62
F	Konstruksi	26.069,63	27.547,24	26.685,44	26.735,03	28.828,89
G	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda	23.669,43	26.886,02	27.081,31	28.487,90	32.294,68
H	Transportasi dan pergudangan	6.984,90	8.031,87	7.579,64	7.284,20	9.190,09
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	4.421,40	5.365,24	5.114,33	5.395,46	6.313,75
J	Informasi dan komunikasi	9.922,29	11.004,83	12.129,78	12.943,85	13.773,24
K	Jasa keuangan dan asuransi	6.868,19	6.875,00	6.918,38	7.569,48	8.052,60
L	Real estate	6.680,88	7.639,11	8.026,18	8.372,64	8.959,66
M,N	Jasa perusahaan	263,53	309,97	306,69	308,38	329,40
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social	3.196,85	3.210,69	3.395,82	3.427,35	3.675,64
P	Jasa Pendidikan	4.393,00	4.761,33	4.782,31	5.019,86	5.252,20
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan social	914,63	1.043,36	1.187,32	1.274,58	1.357,74
R,S,T, U	Jasa lainnya	1.450,86	1.638,13	1.699,47	1.720,71	1.820,18
	PDRB	141.908,62	154.220,32	155.203,91	162.137,30	179.199,80

Catatan : r) angka revisi

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Tabel 2.9 PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kota Palembang

Sumber : Diolah dari hasil sensus, survey dan berbagai sumber lainnya, BPS Kota Palembang tahun 2022

2.1.3 Kondisi Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan prima kepada masyarakatnya. Menjadi salah satu kinerja yang tersusun dalam perencanaan menjadi tugas pemerintah bersama masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

penyelenggaraan pemerintah Kota Palembang diapresiasi dengan diterimanya kembali Nilai B (baik) yang diraih kembali secara empat tahun berturut turut. Penilaian terhadap kinerja instansi pemerintah dilakukan oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2019.

Layanan yang diberikan menghasilkan indeks kepuasan masyarakat arti penting dalam kualitas penyelenggaraan pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Kinerja Pemda merupakan pengukur melihat capaian sekaligus ketepatan program kegiatan yang dibiayai. Capaian tersebut memiliki landasan ukur yang jelas dan tepat sasaran dengan mengupayakan berbagai pengaturan dan pemberdayaan masyarakat.

Layanan tersebut tentunya dipenuhi dengan struktur kelembagaan pemerintah daerah yang terdiri dari perangkat kerja sebagai unit pelaksana tugas pada setiap bidangnya.

Berbagai rancangan peraturan daerah menjadi target sekaligus upaya mempertegas tugasnya pengaturan penyelenggaraan pemerintahan. Penyusunan regulasi berupa peraturan daerah dan juga peraturan lainnya memerlukan kolaborasi dari berbagai pemahaman dan perlakuan yang sudah berjalan pada pemerintahan daerah hingga saat ini. Tuntutan tentang kinerja pemerintah dalam tata kelola dan layanan public mengarahkan rencana induk Kelitbangan berfokus penguatan penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah Kota Palembang memastikan seluruh jenis pelayanan akan mengarah ke layanan digital sehingga memudahkan warga kota itu dalam pengurusan layanan. terdapat sekitar 528 jenis layanan yang ada di Halo Palembang, aplikasi itu memuat semua jenis layanan yang dikeluarkan setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

No	Indikator	Satuan	2020		2021		2022	
			B	B	B	CC	BB	CC
1	Indeks RB Kota Palembang	Indeks	B	B	B	CC	BB	CC
2	Indeks Kepuasan Masarakat	Indeks	77	86,67	77,5	84,54	78	78
3	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Nilai	3,0700	1,630	3,0800	1,830**	3,1	3
4	Opini BPK Atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

5	Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	77	65,21	80	86,73	82	88
6	Persentase keselarasan Renstra Perangkat Daerah terhadap RPJMD	%	100	100	100	100	100	100
7	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.10 : Pencapaian Tata Kelola Pemerintahan Kota Palembang Tahun 2017-2021

Sumber : LKjP Kota Palembang 2022

2.1.4 Sosial Dan Kemasyarakatan

Target pembangunan diarahkan pada kebutuhan sosial masyarakat. Berbagai upaya tersebut dengan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi kinerja pemerintah. Secara umum berdasarkan data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang 2022 persentase penduduk miskin dari tahun 2019 sebesar 10,7% kemudian ditahun 2020 naik menjadi sebesar 11,2%, lalu ditahun selanjutnya 2021 turun menjadi 10,85%, kemudian di tahun 2022 menurun lagi menjadi sebesar 10,35%, dan target yang direncanakan di tahun 2023 adalah sebesar 9,95%. Partisipasi masyarakat dan pemilihan target pada program sosial menjadi faktor kunci dalam melihat nilai perkembangan yang terjadi. Beberapa ukuran kinerja pemerintah daerah ditinjau dari aspek sosial yang dapat menjadi rujukan yaitu ketimpangan dan indeks pembangunan manusia.

Pemerintah Kota Palembang mengalokasikan besaran anggaran APBD untuk bidang layanan dasar yaitu alokasi pendidikan. bidang pendidikan, dengan mengalokasikan anggaran untuk pendidikan 33%, Sementara untuk Kesehatan, Pemerintah Kota Palembang mengalokasikan anggaran sebesar 15%, Kesehatan.

Indeks gini rasio dengan tujuan mengukur ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Indeks gini rasio tersebut tergambar hampir selama 10 tahun kebelakang sampai tahun 2016. Pengembangan masyarakat mengupayakan peningkatan kesejahteraan yang diharapkan. Kondisi atau suatu keadaan kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia

dapat dipenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan. Kapasitas masyarakat yang menjadi perhatian dengan kondisi Pendidikan. Selanjutnya Selain itu kapasitas masyarakat dalam berwirausaha guna menghasilkan berbagai produk.

Penanganan permukiman kumuh perkotaan menjadi hal yang krusial dan prioritas untuk diselesaikan agar menjamin wilayah perkotaan tetap menjadi tempat hidup dan berusaha yang sehat, dan nyaman. Meskipun realisasi di tahun 2022 sebesar 2,32% melebihi target capaian sebesar 2,4%, luas wilayah kumuh sebesar 2023,11 Ha merupakan sebuah luasan yang sangat besar bagi sebuah kota yang merupakan ibukota provinsi dan juga salah satu pusat perekonomian di kawasan Sumatera Selatan., sehingga permasalahan lingkungan kumuh perlu diperhatikan, dianalisa dan ditekan angka besarnya dengan tindakan yang berpengaruh. Permukiman kumuh tersebar di beberapa titik diantaranya distrik rusun dan daerah tepi sungai.

Sementara itu, keberadaan Pelabuhan Boom Baru seluas 25 hektar dinilai semakin padat karena operasional pelabuhan kian meningkat. Pengembangan pelabuhan tidak terlepas dari kemajuan perekonomian di Sumatera Selatan yang membuat dinamika perputaran barang di kota Palembang semakin pesat yang perlu ditopang pelabuhan yang memadai.. Berdasarkan data dari *website* resmi CNN Indonesia tanggal 20 Desember 2018 yang bersumber dari narasumber Agus Edi Santoso selaku General Manager Pelindo II Palembang “Pengerukan alur sungai terakhir dilakukan pada 2016 lalu. Saat ini terjadi sedimentasi di alur Sungai Musi terutama di Selat Jaran, perbatasan Sungai Musi dengan Selat Bangka yang berjarak 108 kilometer dari Pelabuhan Boom Baru Palembang. Kemudian dia menyatakan belum ada rencana pengerukan lagi ditahun 2018 lalu karena anggaran terbatas. BUP (Badan Usaha Pelabuhan), pengerukan di pelabuhan bisa dilakukan dengan izin Kemenhub. Ditahun 2018 ada 10 Terminal Usaha Kepentingan Sendiri (TUKS) yang beroperasi, seperti TUKS Pertamina, PT Bukit Asam, PT Pupuk Sriwidjaja, dan PT Pelindo. Mereka terkadang memelihara alur sungai agar kapal dapat bersandar. Bahkan untuk Pelabuhan Boom Baru kedalaman kolam mencapai 11-15 meter. Hal ini merupakan salah satu fokus penting pemerintah untuk bisa mengendalikan pengerukan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang berkelanjutan serta menaruh perhatian terhadap berdampak tidaknya pada perekonomian masyarakat.

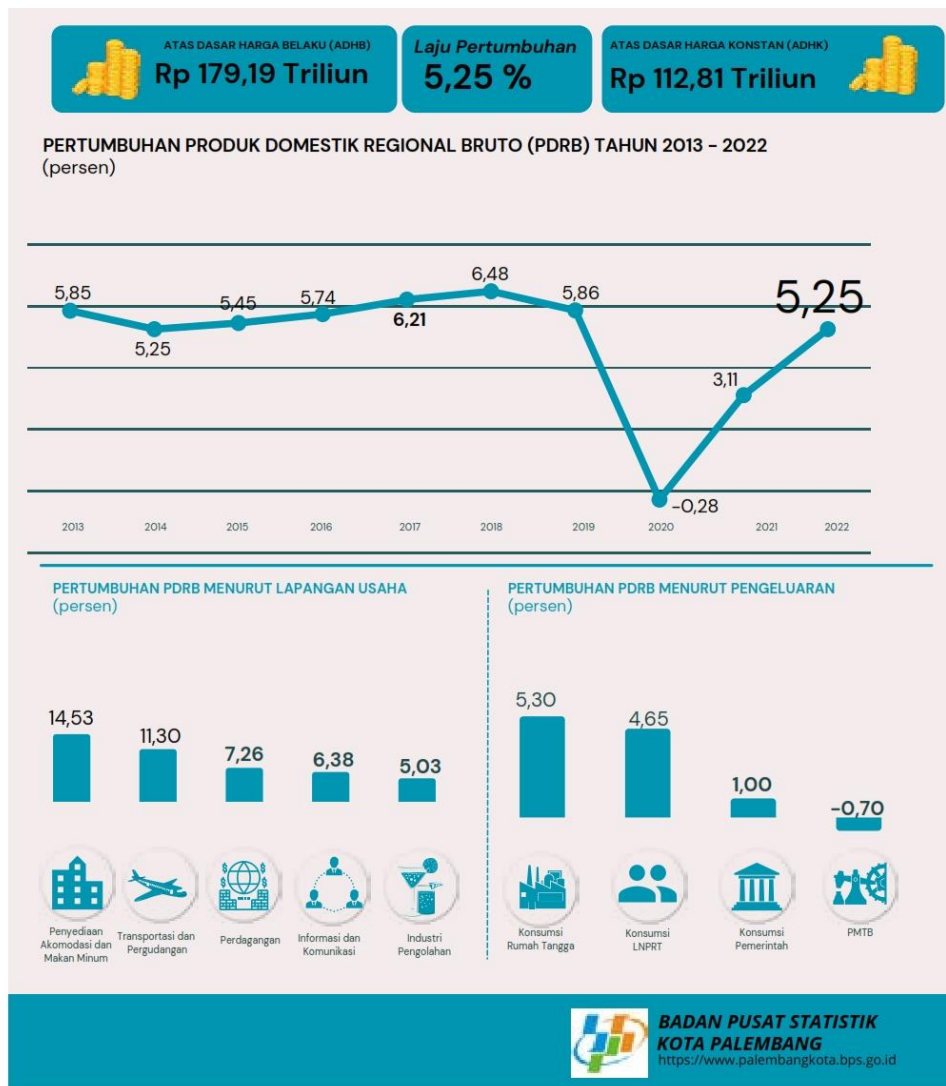
Adanya rencana Pembangunan Jalan Lingkar Timur sepanjang 28,47 kilometer yang dimulai dari lokasi Sako Baru hingga Mata Merah dalam rencana RPJMD Kota Palembang perlu dianalisa lebih mendalam terkait dampak yang akan ditimbulkan dalam bidang ekonomi,

sosial dan lingkungan, sehingga pelaksanaannya bisa meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan kelak.

Pembangunan masyarakat juga mengupayakan bantuan langsung dalam kepemilikan asset perternakan dan pertanian yang mendukung perkuatan kelembangan perekonomian masyarakat melalui aktivitas pemberdayaan. Pendampingan kepada masyarakat hadir sebagai agen perubahan yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi mereka. Fokus pembangunan juga mengarah pada Penyandang masalah kesejahteraan sosial didekatkan dengan intervensi individu.

2.1.5 Kondisi Ekonomi dan Pembangunan

Ekonomi Kota Palembang tahun 2022 dibanding tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,2%. Pertumbuhan terjadi pada 15 lapangan usaha, sedangkan kontraksi terjadi pada 2 lapangan usaha. Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,53%, diikuti oleh Tranportasi dan Pergudangan yang mengalami pertumbuhan sebesar 11,30% dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,26%. Sementara itu, Lapangan usaha yang mengalami kontraksi tertinggi adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1,97%.



Gambar 2.4 Infografis Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang tahun 2022

Sumber : BPS Kota Palembang// BRS Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang tahun 2022

Target peningkatan ekonomi wilayah menjadi sebuah ukuran keberhasilan penyelenggaraan pembangunan. Hal tersebut didukung dengan Kondisi penduduk dalam berusaha, Pembangunan ekonomi lekat dengan peningkatan nilai dan harga melalui pendapatan perkapita penduduk. Pergerakan ekonomi tersebut diupayakan dengan berbagai kegiatan produksi yang dilakukan oleh masyarakat.

Perekonomian wilayah diukur dengan pendapatan perkapita penduduk menunjukkan pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor pendapatan utama masyarakat diluar migas. Lapangan pekerjaan yang terbuka guna mengelola sektor sekunder. Keberadaan infrastruktur

sangat penting bagi Kawasan yang dikelilingi oleh lautan guna mempermudah aksesibilitas dan konektivitas wilayah. Kelitbangan dengan komponen ekonomi dan pembangunan menitikberatkan guna mengupayakan capaian target perekonomian perkotaan

2.2 Sumber Daya Kelitbangan

Sumberdaya kelitbangan menjadi modal melipatgandakan kemampuan dalam mengakselerasi capaian kinerja pemerintah daerah. Tuntutan tersebut datang kepada litbang guna membuktikan kemampuan dalam pemenuhan kinerjanya. Selanjutnya, berinovasi dibutuhkan kerja bersama guna mengupayakan kolaborasi antar aktor inovasi di daerah dalam melakukan langkah difusi yang menyelenggarakan kerangka kerja tahapan inovasi.

Kelembagaan yang terbentuk kelak harus melibatkan Unit Perangkat Daerah (UPD). Keterlibatan ini menjadi penting dalam pertimbangan dalam penentuan target/ sasaran Kelitbangan dengan adanya data, analisa, yang kemudian menghasilkan target, inovasi dan strategi yang didiskusikan dengan ahli dan pemerhati pada bidang masing-masing dalam rangka memajukan Kota Palembang. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

Bappeda Litbang Kota Palembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor t tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota Palembang dan peraturan Wali Kota Palembang Nomor 72 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan Kota Palembang sebagaimana diubah dengan peraturan Wali Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan Kota Palembang.

2.2.1 Sumber Daya Manusia Kelitbangan

Aparatur menjadi modal dalam memutar roda kelembanganaan, begitu juga upaya pencapaian berbagai target kelitbangan yang diupayakan melalui kehandalan struktur manajerial dan struktur fungsional dengan jumlah dan kompetensinya. Berikut bagan struktur aparatur litbang Kota Palembang tahun 2023 :

Berdasarkan data Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Bappeda Litbang Kota Palembang per-Desember 2021, diketahui jumlah pegawai Bappeda Litbang Kota Palembang sebanyak 80 orang yang terdiri dari 64 PNS (80%) dan 16 orang non PNS (20%)

Tabel 2.11 Komposisi Sumber Daya Manusia Kelitbangan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

	PNS	Non-PNS	Jumlah
Strata 2 (S-3)	1	0	1
Strata 2 (S-2)	37	2	39
Strata 1 (S-1)/ Diploma 4 (D-4)	25	13	38
Diploma 3 (D-3)	1	1	2
Jumlah	64	16	80

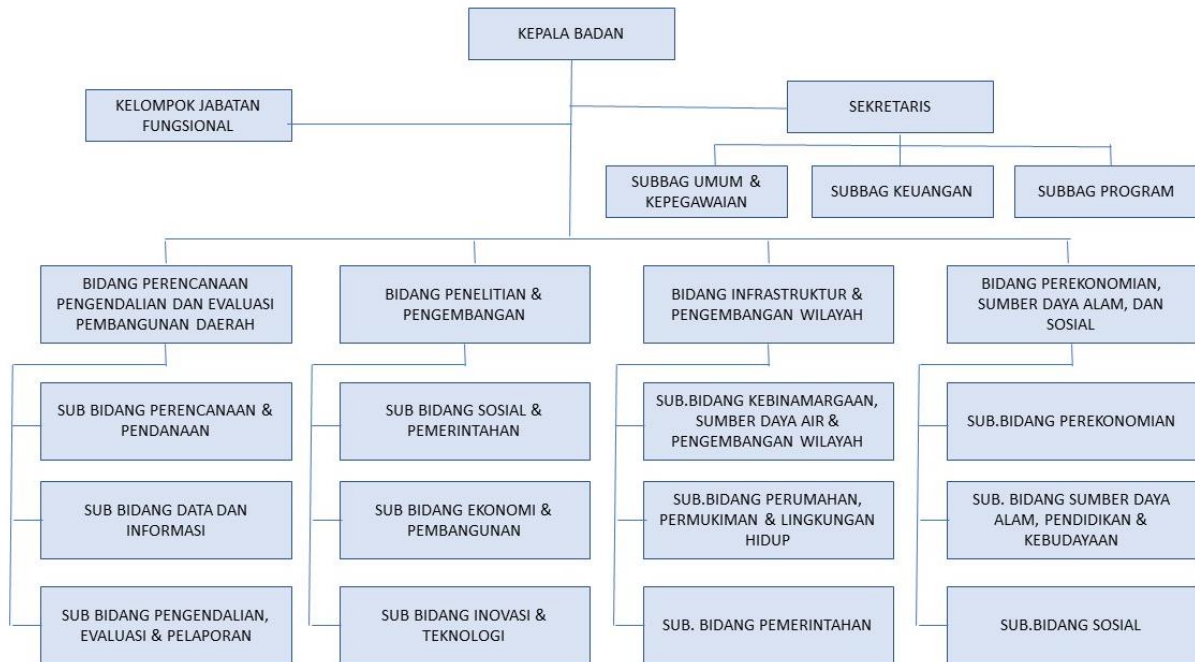
Sumber: Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kota Palembang Tahun 2018-2023// Daftar Urut Kepangkatan Bappeda Litbang Kota Palembang per-Desember 2021

Tabel 2.12 Komposisi PNS Berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang

	Jumlah
Pembina Utama Muda (IV/c)	2
Pembina Tingkat I (IV/b)	1
Pembina (IV/a)	14
Penata Tingkat I (III/d)	21
Penata (III/c)	13
Penata Muda Tingkat I (III/b)	7
Penata Muda (III/a)	6
Jumlah	64

Sumber: Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kota Palembang Tahun 2018-2023// Daftar Urut Kepangkatan Bappeda Litbang Kota Palembang per-Desember 2021

Dari table diatas didapatkan gambaran sebanyak 2 orang PNS dengan pangkat IV/c (3,13%), 1 orang PNS dengan pangkat IV/b (1,56%), 14 orang PNS dengan pangkat IV/a (21,87%), 21 orang PNS dngan pangkat III/d (32,81%), 13 orang PNS dengan pangkat III/c(20,31%), 7 orang PNS dengan pangkat III/b (10,94%), dan 6 orang PNS dengan pangkat III/a (9,38%).



Gambar 2.5 Struktur Aparatur Litbang Kota Palembang Tahun 2023

Sumber : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kota Palembang Tahun 2018-2023

2.2.2 Kerjasama Kelitbangan

Kerjasama yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang dengan perguruan tinggi, lembaga riset, serta lembaga atau komunitas terkait lainnya dalam bidang kelitbangan dan inovasi:

1. Perguruan Tinggi Negeri (PTN):

- Universitas Sriwijaya (UNSRI)
- Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (UIN RF Palembang)
- Politeknik Negeri Sriwijaya (POLSRI)

2. Perguruan Tinggi Swasta (PTS):

- Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP)
- Universitas Indo Global Mandiri Palembang (UIGM)
- Universitas Bina Darma
- Universitas Tridinanti Palembang (UTP)

3. Lembaga Riset dan Komunitas:

- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
- Komunitas Startup dan Inovasi Palembang

Kerjasama ini meliputi pelaksanaan kegiatan kelitbangan dan inovasi. Sebagian besar kerjasama dilakukan melalui kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MOU) dengan Pemerintah Kota Palembang. Bentuk kerjasama dapat berupa swakelola dengan instansi pemerintah lain sesuai dengan peraturan barang dan jasa yang berlaku, serta kerjasama kolaboratif dengan tim pelaksana kelitbangan dan inovasi. Selain itu, juga dilakukan kerjasama dengan komunitas-komunitas, akademisi, pakar, dan praktisi yang terikat secara administrasi melalui kontrak atau perjanjian kerjasama, maupun yang tidak terikat secara resmi.

Inovasi dan Pengembangan Iptek

Penumbuhan budaya inovasi diupayakan melalui kerja kreatif pemerintah dalam membangun sebuah iklim kerja inovatif dan karakteristik SDM aparatur yang inovatif. Persoalan rendahnya kemampuan berinovasi (*ability to innovate*) dan kemauan berinovasi (*willingnes to inovate*) menjadi salah satu tantangan dalam menyiapkan berbagai strategi menumbuhkembangan inovasi di dalam pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah daerah menjadi aktor inovasi guna menyiapkan berbagai regulasi dan juga kebijakan menjadi langkah adaptif dalam menghadirkan inovasi. Perubahan yang dibawa oleh inovasi mengubah cara hidup masyarakat dan pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas pemerintah daerah guna mewujudkan kesejahteraan.

Instrument kebijakan digunakan untuk mendumbuhkan inovasi dengan berbagai praktek penyediaanya dan penerapan inovasi. Pemanfaatan teknologi dan sistem informatika dekat dengan pelayanan eletronik dan pemanfaatan data dalam pengambilan kebijakan guna penyusunan program/kebijakan daerah. Sistem pelayanan eletronik mulai familiar oleh para perangkat daerah guna mempermudah pemberian layanan kepada masyarakat.

Pemerintah menjadi pemerkasa dan sekaligus penumbuh budaya inovasi dengan strategi replikasi, adopsi, dan modifikasi dari berbagai invensi atau teknologi yang sudah tersedia. Mengupayakan model inovasi unggulan yang dapat diterapkan guna meningkatkan kinerja

penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai praktik teknologi juga sudah diupayakan pada tingkat desa pada saat ini, penggunaan teknologi tepat guna menjadi program pemerintah. Inovasi menjadi wahana baru pada saat ini, inovasi didahului dengan kreatifitas aparat dan masyarakat guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

2.2.3 Pendanaan Kelitbangan

Pendanaan menjadi instrument penting dalam kinerja penyelenggaraan kelitbangan di Kota Palembang. Untuk itu, guna pelaksanaan berbagai agenda kelitbangan dalam rencana induk ini melihat kemampuan yang dimiliki sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan berbagai isu strategis.

Rincian anggaran dan realisasi pelayanan Bappeda Litbang Kota Palembang menurut kelompok belanja dan jenis belanja selama kurun waktu tahun 2013-2017 dijabarkan pada Tabel 2.11 dan 2.12 berikut :

Tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Litbang Kota Palembang Menurut Kelompok Belanja Tahun 2013-2017

Uraian	Rencana Anggaran pada Tahun ke- (dalam juta rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam juta rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (dalam persen)	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1 Belanja Pegawai	2.848	2.088	1.630	4.341	4.947	2.010	1.434	1.196	2.667	3.333	70,58	68,70	73,36	61,44	67,38	14,80	13,48
2 Belanja Barang dan Jasa	17.572	12.629	10.206	8.954	9.985	14.987	10.180	5.649	2.611	7.467	85,29	80,61	55,35	29,16	74,78	-13,18	-15,98
3 Belanja Modal	2.327	1.270	3.312	2.110	1.201	2.100	1.027	1.865	75	1.102	90,26	80,90	56,31	3,56	91,81	-15,25	-14,89
Total Belanja	22.747	15.987	15.149	15.406	16.134	19.098	12.642	8.710	5.353	11.903	83,96	79,08	57,50	34,75	73,78	-8,23	-11,15

Sumber : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kota Palembang Tahun 2018-2023// Laporan Keuangan Konsolidasi Bappeda Litbang Kota Palembang Tahun 2013-2017

Tabel 2.14 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Litbang Kota Palembang Menurut Jenis Belanja Tahun 2013-2017

Uraian	Rencana Anggaran pada Tahun ke- (dalam juta rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam juta rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (dalam persen)	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1 Belanja Tidak Langsung (BTL)	5.920	3.498	4.043	3.911	4.694	3.427	3.427	3.630	3.830	4.178	57,90	97,98	89,79	97,94	89,01	-5,64	5,07
2 Belanja Langsung (BL)	22.747	15.987	15.149	15.406	16.134	19.098	12.642	8.710	5.353	11.903	83,96	79,08	57,50	34,75	73,78	-8,23	-11,15
Total Belanja	28.668	19.486	19.192	19.317	20.828	22.526	16.070	12.341	9.184	16.082	78,58	82,47	64,30	47,54	77,21	-7,68	-8,08

Sumber : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kota Palembang Tahun 2018-2023// Laporan Keuangan Konsolidasi Bappeda Litbang Kota Palembang Tahun 2013-2017

2.3 Potensi Dan Permasalahan

Penyusunan rencana induk kelitbangan memetakan potensi dan permasalahan yang ada guna dimanfaatkan sebagai diteksi dari berbagai strategi serta langkah kelitbangan melihat Potensi dan permasalahan yang dapat dipetakan sebagaimana teruraikan dalam pembahasan ini.

Potensi dan permasalahan menyangkut isu strategis tiap bidang pemerintah yang bersangkutan. Isu-isu yang dikumpulkan kemudian dipilah menjadi potensi dan permasalahan, sehingga memudahkan arah dan tujuan penyusunan program prioritas dan yang akan diselesaikan.

Indonesia dan negara-negara dunia pada tahun 2015 telah menyepakati *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* yang menggantikan *Hyogo Framework for Action*. *Sendai Framework* memiliki tujuh tujuan global, yaitu:

- a. Secara substansial mengurangi angka kematian akibat bencana global pada tahun 2030, dengan tujuan menurunkan rata-rata per 100.000 angka kematian global pada dekade 2015-2030 dibandingkan dengan periode 2005-2015.
- b. Secara substansial mengurangi jumlah orang yang terkena dampak secara global pada tahun 2030, bertujuan untuk menurunkan angka global rata-rata per 100.000 pada dekade 2015-2030 dibandingkan dengan periode 2005- 2015.

- c. Mengurangi kerugian ekonomi akibat bencana langsung terkait dengan produk domestik bruto global (PDB) pada tahun 2030.
- d. Secara substansial mengurangi kerusakan bencana pada infrastruktur kritis dan gangguan layanan dasar, di antaranya fasilitas kesehatan dan pendidikan, termasuk melalui pengembangan ketahanan terhadap bencana pada tahun 2030.
- e. Secara substansial meningkatkan jumlah negara dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional dan lokal pada tahun 2020.
- f. Secara substansial meningkatkan kerja sama internasional dengan negaranegara berkembang melalui dukungan yang memadai dan berkelanjutan untuk melengkapi tindakan nasional dalam implementasi Kerangka Pengurangan Risiko Bencana pada tahun 2030.
- g. Secara substansial meningkatkan ketersediaan dan akses ke sistem peringatan dini multi-bahaya dan informasi penilaian risiko bencana kepada masyarakat pada tahun 2030.

2.3.1 Kualitas Air Sungai Musi

Berdasarkan portal berita antara news 7 November 2022 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan Provinsi Sumatera Selatan (DLHP Sumsel) menyoroti penurunan kualitas air alira Sungai Musi yang dapat merusak ekosistem makhluk hidup di dalamnya termasuk kesehatan manusia.

Kabid Pencemaran, pengelolaan sampah dan limbah DLHP Sumsel Aries Syahfrizal mengatakan, penurunan kualitas air itu berada di aliran Sungai Musi yang berlokasi di wilayah KABUPATEN Lahat dan Muara Enim. Penurunan itu ditandai setelah petugas DLHP Sumsel menemukan adanya peningkatan konsentrasi Total Suspended solid (TSS) di aliran Sungai Musi kawasan tersebut. Konsentrasi TSS di sana melebihi kenormalan baku mutu air hingga warnanya menjadi sangat keruh.

TSS (Total Suspended Solid) atau total padatan tersuspensi adalah padatan yang tersuspensi di dalam air berupa bahan-bahan organik dan inorganic yang dapat disaring dengan kertas millipore berporipori 0,45 µm.

Kondisi tersebut tentu mendapat perhatian dari DLHP Sumsel yang meminta instansi terkait di Kabupaten Lahat dan Muara Enim untuk menindaklanjuti sesuai kewenangannya. Kalau kekeruhan terjadi karena tambang, apa langkah selanjutnya, dan identifikasi serta berikan

penyelesaian pada permasalahan sesuai dengan kewenangan di pemerintah kabupaten yang bersangkutan.

2.3.2 Kualitas Udara Kota Palembang

Berdasarkan website iqair.com yang menampilkan secara update kualitas udara setiap daerah, Kota Palembang memiliki rata-rata kualitas udara yang baik setiap harinya. Per 1 Juli 2023 Kota Palembang memiliki tingkat polusi udara dengan kualitas baik, dengan Indeks Kualitas udara sebesar 16 AQI US, polutan utama Kota Palembang adalah PM10 kemudian diikuti PM2,5 di urutan kedua. Dua cara melindungi diri dari polusi udara Palembang saat ini adalah buka jendela rumah untuk membawa udara bersih dan segar ke dalam ruangan dan nikmati aktivitas diluar rumah.

2.3.3 Sampah di Kota Palembang

Melalui portal berita Republika tanggal 19 Desember 2022, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palembang, Sumatera Selatan mencatat produksi sampah di Kota Palembang mencapai 1.180 ton per hari, namun baru terangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah sekitar 800-900 ton per hari. DLHK memprakirakan sisa sampah yang belum terangkut kemungkinan ada juga dimanfaatkan masyarakat untuk membuat pupuk kompos dan pengelolaan yang dilakukan bank-bank sampah oleh masyarakat. Di Palembang tercatat 30 bank sampah yang dibina Pemerintah Kota Palembang dan sejumlah perusahaan BUMN di daerah setempat. Dia menjelaskan, petugas DLHK Palembang saat ini baru mengangkut sampah sekitar 800-900 ton per hari ke TPA Sukawinatan dengan 121 armada sampah. 121 unit armada angkut sampah masih belum memadai, namun DLHK terus mengupayakan secara bertahap agar infrastruktur angkutan memadai dan bisa mengangkut produksi sampah yang ada di tengah masyarakat.

Upaya sementara dilakukan DLHK Palembang bekerja sama dengan badan usaha lain untuk mengangkut sampah. Upaya lain Pemerintah Kota Palembang bekerja sama dengan PT Indo Green Power akan membangun konstruksi proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) yang dimulai pada 2023. Proyek PSEL atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTsa) ini dalam kajian jual-beli listrik oleh PLN sudah dinyatakan lulus dan layak. Kami saat ini juga sedang melakukan analisis dampak lingkungan (amdal). Ini menjadi sebuah solusi DLHK untuk mengatasi sampah. DLHK mengimbau masyarakat untuk membuang sampah

pada tempatnya dan tidak lagi menggunakan kantong plastik untuk berbelanja sehingga bisa menekan produksi sampah guna menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

2.3.4 Kantong Parkir

Berdasarkan informasi di portal berita anata news, tanggal 14 Maret 2018 Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang Sulaiman Amin mengatakan persoalan parkir terus menjadi permasalahan serius, sehingga membutuhkan langkah-langkah nyata dari pemerintah. Masalah parkir bukan hanya sebatas tarif dan pengelolannya, sehingga berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun juga masalah lokasinya. Ke depan, kantong parkir akan ditambah.

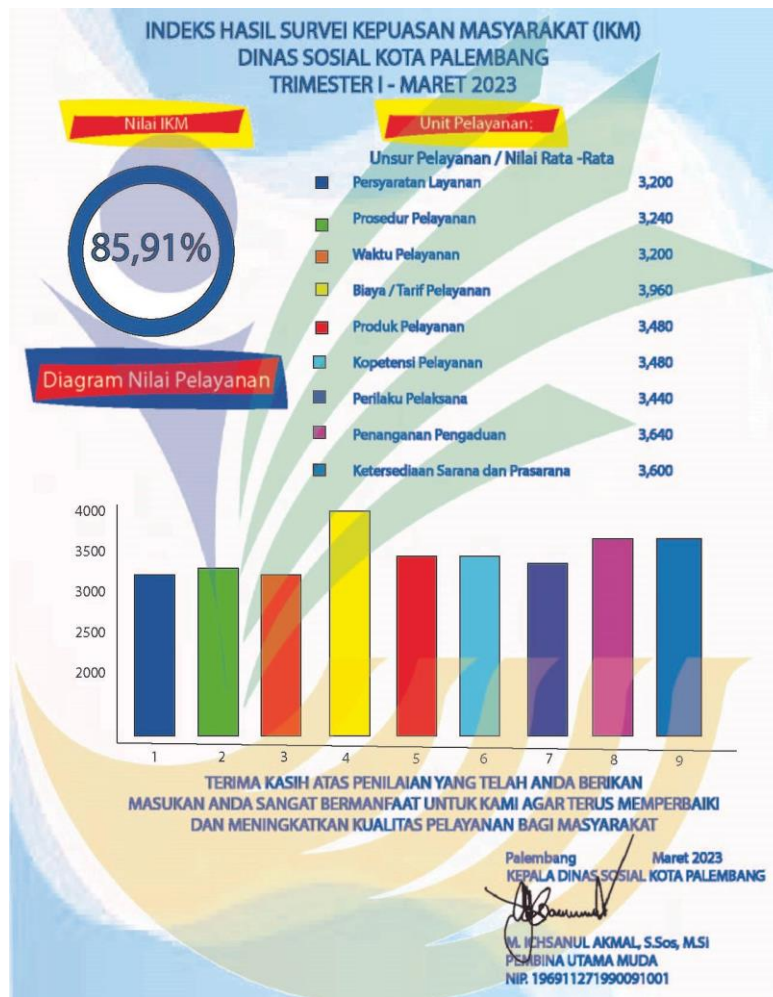
Saat ini persoalan parkir terjadi di kawasan Jalan Merdeka, BKB dan Pasar 16 Ilir, terutama persoalan tarif parkir yang tinggi akibat oknum yang tidak bertanggung jawab. Gate sudah dibuat, setelah itu tata lahan parkir akan disusun, sehingga pengunjung yang melintas di Jalan Merdeka bisa parkir juga disana.

Pemkot terus menata terkait masalah kantong parkir, salah satunya dengan revisi Peraturan Daerah (Perda) Parkir nomor 16 tahun 2011 yang mengatur tarif hingga transparansi pengelolaan. Perda nomor 16 juga sudah sangat lama, perlu ada perubahan yang disesuaikan dengan kondisi sekarang. Salah satunya adalah terkait tarif parkir.

2.3.5 Rumah Singgah

Keberadaan anak jalanan terkadang membuat kenyamanan pengguna jalan terganggu, dalam hal ini kebanyakan dari anak jalanan dapat berkonotasi negatif sehingga pada akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan. Pengertian rumah singgah menurut para ahli adalah tempat perantara yang sifatnya sementara, bagi para anak jalanan yang erat hubungannya dengan pihak pihak yang mau menolong mereka.

Berikut ini adalah indeks hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Sosial Kota Palembang.



Gambar 2.6 Indeks Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Dinas Sosial Kota Palembang Trimester I – Maret 2023

Sumber : website resmi milik Dinas Sosial Kota Palembang

Berdasarkan tingkat kepuasan pada grafik diatas, unit pelayanan dengan tingkat kepuasan tertinggi adalah bagian unit biaya/ tarif pelayanan sedangkan kepuasan terendah pada unit persyaratan layanan dan waktu layanan.

2.3.6 Koordinasi Pendataan Unit Perangkat Daerah (UPD)

Mengajukan dokumen di Kelurahan dan Kecamatan kini semakin mudah. Masyarakat kota Palembang yang ingin mengajukan surat keterangan tidak harus datang langsung ke kantor lurah atau kecamatan. Cukup akses Sidemang melalui website atau mobile app, masyarakat dapat melakukan pengajuan dokumen secara online, cepat, singkat dan transparan. Dokumen

akan di-tandatangani oleh Lurah/Camat menggunakan TTE tersertifikasi. Website terkait adalah <https://sidemang.palembang.go.id/welcome-page> .

Pemerintah Republik Indonesia membentuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS). SP4N-LAPOR! dibentuk untuk merealisasikan kebijakan “no wrong door policy” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya. Website terkait adalah <https://www.lapor.go.id/index.php/tentang> .

Situs Disdukcapil Kota Palembang merupakan media informasi elektronik satu pintu meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dan pelayanan dokumen kependudukan dan catatan sipil dapat dilakukan disini.

Moto pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Palembang “Dukcapil Prima”.

1. Kebijakan pelayanan : kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur
2. Profesionalisme SDM penyelenggara : Kompetensi pelaksana pelayanan publik sesuai jenis layanan yang diselenggarakan. Responsif dan sigap memberikan pelayanan kepadamasyarakat serta memiliki kode etik pelaksana layanan sebagai aturan perilaku dalam melayani masyarakat
3. Sarana prasarana pelayanan publik : sarana prasarana pelayanan yang bersifat fisik seperti patkir, front office, ruang tunggu, hingga toilet abgi pengguna layanan serta ruang laktasi dan sarana penunjang lainnya bagi yang berkebutuhan khusus (disabilitas)
4. Sistem informasi pelayanan publik : sistem informasi berbasis elektronik memuat informasi tentang profil penyelenggara, pelaksana, standar layanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan dan penilaian kinerja unit penyelenggara dan on elektronik dapat berupa poster, spanduk, leaflet, buku dokumen dan bahan cetak lainnya
5. Konsultasi dan pengaduan : ketersediaan sarana wahana pengaduan dan komunikasi berupa media sosial, email, surat, telepon, tatap muka. Tempat khusus dan petugas

khusus. Hasil konsultasi masyarakat didokumentasikan sebagai arsip yang terdokumentasi dan mudah diakses dalam website/ situs

6. Inovasi pelayanan : berfokus pada kualitas pelaksana pelayanan publik melakukan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat berkelanjutan sehingga dapat dirapikan dan sudah dilaksanakan minimal dalam rentang waktu satu tahun

Maklumat pelayanan :

1. Berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
2. Memberikan pelayanan publik sesuai dengan kewajiban dan aka melakukan perbaikan secara terus-menerus
3. Bersedia untuk menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan

Keterlibatan UPD dalam program pencatatan sipil sangat diperlukan, keterlibatan ini menyangkut pelayanan dan data diri dari UPD itu sendiri, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan masimal dan mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru melalui pendataan itu sendiri. Hal ini sudah dijabarkan dalam Moto pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Palembang poin nomor 1, 4 dan 6.

2.3.7 Pendataan UMKM terkait Program TIK

Berdasarkan portal website kemnperin.go.id tanggal 100 Februari 2023, Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) terus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menyelaraskan program peningkatkan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) di masing-masing daerah. Direktur Jenderal IKMA Kemenperin, Reni Yanita mengatakan pemanfaatan dana dekonsentrasi dapat membangkitkan sektor IKM yang terimbas pandemi Covid-19 agar tetap dapat berproduksi untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik hingga ekspor, serta memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Indonesia. Anggaran dekonsentrasi tahun 2023 akan difokuskan pada tiga hal, yakni penanganan kemiskinan ekstrem, pendataan, serta pembinaan melalui kegiatan One Village One Product (OVOP) atau Satu Desa Satu Produk. Dengan ditiadakannya PPKM, kegiatan penumbuhan, pengembangan, serta peningkatan daya saing pelaku IKM di berbagai daerah semakin meningkat.

Pemerintah akan lebih mengoptimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk belanja produk dalam negeri, khususnya produk IKM/UMKM. Terkait sasaran tersebut, Kemenperin bertugas memfasilitasi penerbitan sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) bagi industri kecil agar dapat bersaing dan memperoleh prioritas dalam belanja Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD. Untuk mendapatkan sertifikat TKDN IK, pelaku industri kecil melakukan perhitungan nilai TKDN-IK secara mandiri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Oleh karena itu, pelaku industri kecil yang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat TKDN-IK diwajibkan untuk memiliki akun SIINas melalui situs siinas.kemenperin.go.id. Dalam hal ini, Ditjen IKMA bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi, secara aktif menggelar sosialisasi dan bimbingan pengisian aplikasi pendataan bagi industri kecil agar industri kecil aktif mengisi data dan pelaporan semester pada SIINas. Tahun 2023, Ditjen IKMA menargetkan sebanyak 40.500 industri kecil terdaftar di SIINas dan melengkapi laporan 273 pendataan IKM di sentra-sentra industri yang kabupaten atau kotanya mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK). Provinsi wajib melaporkan akun industri kecil yang sudah terdaftar di SIINas untuk monitoring capaian. Melalui situs <https://diskopukm.palembang.go.id/form-ukm> Kota Palembang yang dimiliki Dinas Koperasi & UMKM Kota Palembang, juga memfasilitasi pendataan UMKM di Kota Palembang. Artinya Kota Palembang dibawah naungan Provinsi Sumatera Selatan ikut berperan aktif dalam pendataan dan kemajuan perkembangan UMKM daerahnya. Diperlukan keberlanjutan, konsistensi dan pengembangan dalam program pendataan UMKM Kota Palembang, sehingga kedepannya program ini dapat berdampak untuk kemajuan bidang UMKM Kota Palembang.

2.3.8 Revitalisasi Pasar

Melalui portal berita detik.com tanggal 25 Mei 2023, Revitalisasi pasar sangat dibutuhkan untuk mendorong pasar rakyat lebih modern dan mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern, sehingga dapat meningkatkan omset pedagang pasar rakyat. Per 2023, Kota Palembang sudah merevitalisasi Pasar KM5, Pasar 9/10 Ulu, Pasar Tangga Buntung, Pasar 26 Ilir dan Pasar Padang Selasa.

Berdasarkan informasi terbaru, akan diadakan revitalisasi pasar 16 Ilir untuk kedepannya. Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin dalam wawancara 25 Mei 2023 oleh

portal berita detik.com mengatakan bahwa rencana ini sudah disampaikan oleh Pemkot Palembang kepada dewan. Perbaikan 16 Ilir akan diserahkan kepada pihak ketiga. Diharapkan renovasi Pasar 16 Ilir dilakukan dengan cepat dan tidak terlalu mengganggu aktivitas pedagang sehingga para pedagang tetap dapat berjualan. Diharapkan pula pihak Pemkot Palembang melakukan sosialisasi secara maksimal dengan harapan para pedagang yang berjualan disana dapat setuju dan tidak ada penolakan. Per bulan Mei tahun 2023, banyak pedagang di Pasar 16 Ilir belum mengetahui berita ini, hanya sedikit dari mereka yang sudah mengetahuinya dari sosial media. Menurut Walikota Palembang, Harnojoyo ketika diwawancarai oleh detik.com sudah ada titik temu untuk revitalisasi Pasar 16 Ilir dan nanti dalam waktu dekat akan disosialisasikan dengan pedagang. Revitalisasi ini dilakukan untuk para pedagang dan yang akan melakukan revitalisasi ini masih pihak ketiga.

2.3.9 Penanggulangan bencana, Mitigasi, dan Keterlibatan UPD Damkar dalam Program TIK (Teknologi Informatika dan Komunikasi)

Keterlibatan Damkar saat ini dalam upaya penanggulangan bencana dan mitigasi diharapkan dapat memperkuat barikade dalam kegiatan yang bersangkutan.

Penanggulangan Bencana

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota dalam melaksanakan urusan di bidang pemadaman kebakaran, penanggulangan bencana, penyelamatan dan pertolongan keadaan darurat serta tugas pembantuan.

Berdasarkan data dari Renana Penanggulangan Bencna (RPB) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022-2026, Pada 5 (lima) tahun mendatang, bencana semakin meningkat dengan adanya permasalahan : fenomena geologi yang semakin dinamis, perubahan iklim yang semakin ekstrim, peningkatan degradasi lingkungan, bonus demografi yang tidak terkelola dengan baik.. Berdasarkan hasil evaluasi penanggulangan bencana di Indonesia diidentifikasi adanya kendala-kendala sebagai berikut :

- (1) koordinasi dalam penyadaran masyarakat rentan bencana;
- (2) sinkronisasi kebijakan vertikal (pusat dan daerah);
- (3) pengurangan risiko bencana (PRB) belum menjadi isu strategis Pemerintah;
- (4) ketidakpastian anggaran penanggulangan bencana di daerah;

(5) masih lemahnya penegakan hukum terkait penanggulangan bencana.

Kompleksitas dari permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu.

Penanggulangan yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah upaya yang penting tidak tertangani. Oleh karena karena persoalan penanganan bencana tidak sekedar hanya mengelola saat bencana saja, namun juga pada proses sebelum dan sesudah terjadinya bencana sehingga dapat mengurangi risiko atau dampak yang timbul dari bencana.

Saat ini, telah ada perubahan paradigma dalam penanganan bencana di Indonesia yang menyangkut tiga hal, yakni:

- a). Penanganan bencana tidak lagi berfokus pada aspek tanggap darurat tetapi lebih pada keseluruhan manajemen risiko,
- b). Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak asasi rakyat dan bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah,
- c). Penanganan bencana bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi menjadi urusan bersama masyarakat, karenanya untuk mencapai sasaran yang diinginkan maka Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) bencana provinsi Sumatera Selatan harus mencakup semua aspek termasuk diantaranya kondisi geografis dan kearifan lokal masyarakat sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana yang diimplementasikan pada kegiatan penanggulangan bencana dalam setiap tahapannya dapat dilaksanakan secara maksimal.

No.	Kabupaten/Kota	Multi Kerentanan				Kelas
		Luas (Ha)			Total	
		Rendah	Sedang	Tinggi		
A	Kabupaten					
1	Banyuasin	1131.005	16.980	0	1.147.985	Sedang
2	Empat Lawang	317.428	1340	0	318.768	Sedang
3	Lahat	367.762	3396	0	371.158	Sedang
4	Muara Enim	647.013	6480	0	653.493	Sedang
5	Musi Banyuasin	1221.608	7896	0	1.229.504	Rendah
6	Musi Rawas	503.701	8006	0	511.707	Sedang
7	Musi Rawas Utara	559.353	0	0	559.353	Rendah
8	Ogan Ilir	152.300	5395	0	157.695	Sedang
9	Ogan Komering Ilir	1437.201	18.554	0	1.455.755	Sedang
10	Ogan Komering Ulu	356.250	4475	0	360.725	Sedang
11	Ogan Komering Ulu Selatan	322.545	2063	0	324.608	Sedang
12	Ogan Komering Ulu Timur	266.539	14.205	0	280.744	Sedang
13	Penukal Abab Lematang Ilir	180.498	0	0	180.498	Rendah
B	Kota					
1	Kota Lubuk Linggau	30.670	2228	0	32.898	Sedang
2	Kota Pagar Alam	57.227	980	0	58.207	Sedang
3	Kota Palembang	18.479	7.195	0	25.674	Sedang
4	Kota Prabumulih	41.256	1.927	0	43.183	Sedang
	Provinsi Sumatera Selatan	7.610.835	101.120	0	7.711.955	Sedang

Tabel 2.15 Potensi Kerentanan Multibahaya di Provinsi Sumatera Selatan

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana(RPB) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2026

Berdasarkan informasi diatas, bahwa Kota Palembang termasuk daerah dengan risiko bencana tingkat sedang.

Mitigasi

Mitigasi adalah upaya yang memiliki sejumlah tujuan yakni untuk mengenali risiko, penyadaran akan risiko bencana, perencanaan penanggulangan, dan sebagainya. Program pencegahan-mitigasi dilakukan ketika kondisi normal dan dimaksudkan untuk mengurangi risiko, kerentanan dan ancaman. Program-program yang termasuk dalam mitigasi adalah :

1. Peningkatan Perencanaan Tata Ruang.
2. Peningkatan Pemahaman Masyarakat dan Pelayanan dalam Penataan Ruang.
3. Pengelolaan Lingkungan.
4. Lingkungan Sehat, Perilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat.

5. Penguatan dan Dukungan Penanganan Permasalahan Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan.
6. Fasilitasi Pengembangan Masyarakat.
7. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
8. Pengendalian Banjir.
9. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
10. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
11. Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan
12. Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya.
13. Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan.
14. Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan.
15. Perbaikan Gizi Masyarakat.
16. Pengawasan Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya.

UPD Damkar dalam penerapan program TIK

Dalam hal penanggulangan bencana masyarakat menduduki tempat penting karena masyarakat merupakan subyek, obyek sekaligus sasaran utama upaya penanggulangan bencana, dengan mengadopsi dan memperhatikan kearifan lokal (local wisdom) dan pengetahuan tradisional (traditional knowledge) yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Kedua aspek ini merupakan faktor penentu dalam keberhasilan upaya penanggulangan bencana, mengingat banyaknya tradisi penanganan bencana yang telah ada dan berkembang di masyarakat.

Program tanggap darurat merupakan rangkaian tindakan pasca bencana yang berkaitan dengan penanganan/penyelamatan korban, penyelamatan aset, penyediaan kebutuhan dasar dan pencegahan dampak yang lebih luas. Program-program tersebut adalah:

1. Penanggulangan Bencana.
2. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
3. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.

4. Upaya Kesehatan Masyarakat.
5. Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

Pokok program dalam pengelolaan bencana tersebut, selain berpijak pada kemampuan pengampu dalam pengelolaan bencana juga dikembangkan pada arah penggunaan teknologi yang berguna untuk peringatan dini, pengurangan ancaman dan penyebaran informasi ketika terdapat ancaman bencana.

Keterpaduan antara kemampuan masyarakat dalam mengelola bencana dan pemanfaatan teknologi dalam pengurangan ancaman merupakan langkah yang efektif agar dampak bencana dapat dibatasi secara signifikan. Selain itu, program pembangunan yang berfokus pada peningkatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat berdampak pada pengurangan kerentanan sekaligus peningkatan kapasitas. Masyarakat yang semakin berdaya dengan tingkat perekonomian yang memadai akan memiliki akses lebih luas dalam pengelolaan bencana sehingga akan menurunkan risiko bila terjadi bencana.

2.3.10 Sarana dan Prasarana Olahraga Kota Palembang

Melalui portal berita merdeka.com, tahun 2021 Menpora menunjuk Sumatera Selatan sebagai daerah sentra penghasil atlet nasional. Kota Palembang sebagai ibu Kota Sumatera Selatan merupakan daerah yang berpotensi sebagai pengembangan lokasi sarana dan prasarana olahraga. Kota Palembang sudah memiliki fasilitas olahraga yang bervariasi dan cukup terawat.

NO	Fasilitas Olahraga	Alamat
1.	Taman Ampera Skate Park	Jl. Palembang Darussalam, 9 Ilir, Bukit Kecil, Kota Palembang.
2.	Lapangan Sepakbola Hatta	Kepandean Baru, Ilir Timur I, Kota Palembang.
3.	Lapangan Sepakbola Kamboja	Jl. Mayor Santoso, 20 Ilir D. III, Ilir Timur I, Kota Palembang.
4.	Lapangan Badminton	Kecamatan 26 Ilir, Bukit Kecil, Kota Palembang.
5.	Lapangan Tennis Lapangan	D. I, 20 Ilir D II, Ilir Timur. I, Kota Palembang.

Tabel 2.16 Data Fasilitas Olahraga Dispora Kota Palembang

Sumber : Dispora Kota Palembang 2020

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palembang telah berupaya semaksimal mungkin dalam membuat suatu kebijakan dan mewujudkan suatu pembinaan olahraga dengan baik dan menyeluruh kepada masyarakat, tujuannya untuk memudahkan setiap warga masyarakat yang ingin melakukan aktivitas olahraga dan mendapatkan pelayanan pembinaan olahraga secara menyeluruh terhadap semua fasilitas olahraga di kota Palembang. Pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengalokasikan anggaran guna terlaksananya kegiatan olahraga dimasyarakat yang kecukupan dan berkelanjutan. Faktor pendukung dan penghambat Kebijakan Dispora Kota Palembang dalam mengembangkan minat masyarakat untuk berolahraga, telah disediakan fasilitas-fasilitas olahraga untuk digunakan masyarakat melakukan aktivitas berolahraga yang cukup memadai, tetapi masyarakat sendiri masih belum menyadari tentang pentingnya berolahraga bagi kebugaran tubuh. Kemudian tanggapan masyarakat sendiri tentang kebijakan Dispora Kota Palembang dalam mengembangkan minat masyarakat untuk berolahraga disambut baik oleh masyarakat, karena masyarakat merasa diperhatikan dengan adanya pembinaan olahraga dimasyarakat.

2.3.11 Penanaman Modal Kota Palembang

Dikutip dari Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan berjudul Prosedur Pemberian Intensif dan Kemudahan Investasi di Kota Palembang oleh Suci Flambonita dan Vera Novianti (2021) : Salah satu faktor penting dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi, yang dapat didorong melalui penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan berkualitas, salah satunya dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur dan faktor pendukung lainnya yang memadai, termasuk pemberian insentif dan kemudahan investasi di kota Palembang.

Aktivitas penanaman modal yang didorong oleh iklim yang kondusif akan memunculkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dinamis, yang kemudian berkontribusi terhadap

pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada tingkat nasional, kebijakan pengembangan penanaman modal diarahkan untuk:

1. Mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan meningkatkan iklim penanaman modal;
2. Mendorong FDI untuk memperbaiki daya saing ekonomi nasional; meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik; membangun penanaman modal dalam kerangka pelaksanaan demokrasi ekonomi yang diperuntukkan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat; dan
3. Meningkatkan realisasi penanaman modal ke seluruh Indonesia. Sebagaimana arahan dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dimana pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah yang memuat:
 - a. tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
 - b. kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
 - c. dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
 - d. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan;
 - e. bentuk insentif dan kemudahan yang dapat diberikan; dan pengaturan pembinaan dan pengawasan.

Kebijakan insentif yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang yang sesuai kewenangannya antara lain di bidang perpajakan daerah, retribusi daerah, bantuan permodalan, bantuan riset, dan pelatihan. Pemerintah dapat pula memberikan kemudahan misalnya dari segi data dan informasi penanaman modal, sarana dan prasarana, lahan, bantuan teknis, percepatan pelayanan, pemasaran, dan kenyamanan berinvestasi. Semua itu disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Di era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki keleluasaan di dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk keleluasaan pada aspek *self-regulating power* dan *self-modifying power*, yaitu keleluasaan membuat regulasi dan untuk menyesuaikan regulasi yang ada pada lingkup nasional dengan kondisi khas daerah. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019

mewajibkan kepada daerah untuk menyesuaikan pengaturan pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan. Sebagai pengejawantahan peraturan daerah tersebut dipertegas dengan peraturan walikota tentang mekanisme dan standar operasional prosedur pemberian insentif dan kemudahan investasi di kota Palembang. Bertitik tolak dari uraian tersebut mengenai prosedur pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah khususnya di kota Palembang dan tindak lanjut amanat dari ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu adanya: suatu kajian khusus tentang prosedur pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kota Palembang responsif dalam pelayanan publik yang baik bidang penanaman modal (investasi).

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai kewenangannya. Pemberian Insentif dan/atau dilakukan berdasarkan prinsip: a. kepastian hukum; b. kesetaraan; c. transparansi; d. akuntabilitas; dan e. efektif dan efisien. Adapun bentuk insentif yang diberikan berupa; a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau f. bunga pinjaman rendah.

2.3.12 Stunting

Wali Kota Palembang Sumatera Selatan, Harnojoyo, menyebutkan penurunan kasus stunting atau gagal tumbuh kembang pada anak masuk dalam program kerja yang diprioritaskan oleh pemerintah kota hingga tahun 2024. Harnojoyo di Palembang, Rabu 24 Agustus 2022, mengatakan berdasarkan laporan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan jumlah kasus anak stunting di Palembang tersisa pada angka 16,1 persen per Agustus 2022. Adapun dari persentase tersebut diketahui jumlah kasus anak stunting di Palembang mengalami pengurangan jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021 yakni 24,4 persen atau 490 kasus, dan tahun 2020 sekitar 48,10 persen atau 1.100 kasus. Meski tercatat mengalami penurunan, angka prevalensi stunting Palembang ditarget

hingga 0 kasus, atau sesuai dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) nasional setidaknya capai sebesar 14 persen di 2024. Maka dari itu memerlukan kerja keras lagi untuk menjalankan program yang diprioritaskan pada sektor kesehatan salah satunya penurunan kasus anak stunting untuk mencapai situasi target pada tahun 2024.

Berdasarkan data dari laporan Profil Kesehatan Kota Palembang tahun 2020 oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pelayanan kesehatan. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi :

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan dan
3. Seksi Peningkatan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Visi, Misi, Tujuan, Strategi Prioritas Pembangunan Kesehatan dan Sasaran Utama dalam pelaksanaan pembangunan kota Palembang yang mengacu pada Visi-Misi Kta Palembang Tahun 2019-2023 melalui Dinas Kesehatan Kota Palembang mempunyai motto Bekerja dan Melayani dengan ikhlas. Dinas Kesehatan Kota Palembang Bertekad Melaksanakan Pelayanan yang Bermutu dan Bermitra dengan Semua Pihak Demi Tercapaiannya Palembang Sehat.

Program Kerja Dinas Kesehatan tahun 2020 terdiri dari program dan kegiatan yang merupakan tugas dan kewenangan Dinas Kesehatan Kota yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2018-2023 bidang kesehatan 2 poin bagian pelayanannya diantaranya yaitu:

1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program ini bertujuan untuk menjamin kepastian dan kualitas layanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan. Tolok Ukur keberhasilan program ini adalah :

- a) Persentase sarana kesehatan yang memiliki izin.
- b) Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin.

2. Program Pengadaan, Peningkatan dan Pebaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan akses pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas layanan diantaranya melalui pembangunan/rehabilitasi puskesmas/puskesmas pembantu dan pengadaan sarana kesehatan yang memadai. Tolok ukur keberhasilan program ini adalah Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu.

Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan sampai tingkat kecamatan. Sampai dengan tahun 2020, jumlah Puskesmas di kota Palembang sebanyak 41 Puskesmas Non Rawat Inap. Untuk meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka Dinas Kesehatan kota Palembang melakukan beberapa inovasi, antara lain dengan meningkatkan fungsi Puskesmas.

Dalam meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas dan pendekatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Palembang membentuk Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) yang memberikan pelayanan kesehatan dasar dengan menempatkan tenaga bidan. Poskeskel kota Palembang sebanyak 61 Poskeskel dari 107 kelurahan di kota Palembang. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) adalah suatu upaya kesehatan yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan bersama masyarakat, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan

kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Upaya Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan adalah melalui pembentukan berbagai UKBM, misalnya Posyandu balita, Posyandu lansia, Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel), dan lain-lain.

2.3.13 Kajian Ekonomi Terhadap Jalan Tol Kota Palembang dengan Kota-Kota Terkait

Berdasarkan informasi di website resmi Badan Pengatur Jalan Tol oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat keberadaan Jalan tol memiliki manfaat diantaranya :

1. Pembangunan jalan tol akan berpengaruh pada perkembangan wilayah & peningkatan ekonomi.
2. Meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas orang dan barang.
3. Pengguna jalan tol akan mendapatkan keuntungan berupa penghematan biaya operasi kendaraan (BOK) dan waktu dibanding apabila melewati jalan non tol.
4. Badan Usaha mendapatkan pengembalian investasi melalui pendapatan tol yang tergantung pada kepastian tarif tol.

Melalui portal berita Bisnis.com tertanggal 07 Maret 2019 Oleh M. Rochmad Purboyo, didapatkan data bahwa Pembangunan jalan tol Trans Sumatera akan mendapatkan pendapatan

dari pajak sebesar Rp.2690 triliun hingga 2048, dengan pendapatan PAD terbesar diterima Provinsi Sumatera Utara.

Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Brahmantio Isdijoso dalam laporannya Maret 2019 menyebutkan melalui Peraturan Presiden No.100/2014 yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden No.117/2015, Pemerintah memberi amanat kepada Utama Karya untuk membangun dan mengembangkan JalanTol Trans-Sumatra (JTTS). Jalan tol ini akan menghubungkan Lampung dan Aceh melalui 24 ruas jalan berbeda yang panjang keseluruhannya mencapai 2.765 km. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, katanya, masing-masing berpotensi memperoleh manfaat dana (dampak fiskal) dari penerapan skema Value Capture selama periode kajian(2018-2048) pada Wilayah Studi. Berdasar hasil survei, wawancara dan analisis tim konsultan, keberadaan JTTS akan meningkatkan penerimaan pajak dari kategori pajak penghasilan (PPh), Pajak pertambahan Nilai (PPN) dan pajak lainnya bagi pemerintah pusat.

Keberadaan JTTS, katanya, akan memberikan tambahan bagi penerimaan asli daerah (PAD) di wilayah studi sebesar minimal Rp300,8 triliun (periode proyeksi dampak 2018-2048) dengan rata-rata PAD sebesar Rp9,7 triliun per tahun. Dengan penugasan pemerintah, terdapat potensi dampak yang signifikan terhadap perekonomian di wilayah studi. Output yang diterima Rp37.007 triliun, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Rp19.446 triliun, pendapatan tenaga kerja Rp5.426 triliun dengan jumlah 2.131.244orang.

Kepala Badan Pegatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan terdapat empat ruas Jalan Tol Trans Sumatera yang dalam waktu dekat secara bertahap siap diresmikan dan beroperasi, yakni ruas Bakauheni – Terbanggi Besar (Bakter) (140,93 Km), Medan – Binjai (Segmen Helvetia – Veteran) (2,75 Km), Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi Seksi 7 (9,1 Km), dan Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (189,2 Km).

2.3.14 Karakteristik Dasar ASN dalam Rencana Penerapan Standar Program TIK

Dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa pengembangan kompetensi merupakan hak setiap ASN yang bertujuan untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga dapat memberi kontribusi optimal bagi organisasi. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan bahwa pengembangan kompetensi merupakan

upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier. Pengembangan dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Dari pengembangan kompetensi tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan keahlian personal ASN, melainkan juga dapat mendongkrak performa institusi.

Terdapat tiga jenis kompetensi yang perlu dimiliki ASN, yakni kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural.

1. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
2. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
3. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Demi mewujudkan pengembangan kompetensi ASN yang tepat sasaran, terdapat serangkaian tahapan yang harus ditempuh, yakni penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi, pelaksanaan pengembangan kompetensi, dan evaluasi pengembangan kompetensi. Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut tetap cepat dalam memberikan pelayanan ditengah era disrupsi. Akselerasi kompetensi digital ASN dilakukan dalam merespon tantangan tersebut. Hal utama yang perlu dan wajib dilakukan adalah menggalakkan budaya literasi teknologi pada ASN, antara lain literasi digital dan literasi data. Hal utama yang perlu dan wajib dilakukan adalah menggalakkan budaya literasi teknologi pada ASN, antara lain literasi digital dan literasi data.

Kompetensi atas literasi digital adalah kemampuan dalam penggunaan teknologi digital dan teknologi informasi lainnya yang digunakan dalam penyelesaian pekerjaan, sedangkan kompetensi literasi data yaitu mengetahui potensi data yang melimpah dan penggunaan big data dalam pengambilan kebijakan yang tepat sasaran dan pelayanan publik yang berkualitas.

Perlunya karakteristik yang mendasar usebagai ASN dalam bidang digitalisasi harus lebih ditekankan, baik dari awal penerimaan atau penyesuaian era bagi yang sudah menjadi ASN. Peningkatan kompetensi tersebut, dapat membangun pola pikir ASN yang komprehensif, holistik, dan sistematis melalui penguasaan teknologi., sehingga memiliki integritas yang tinggi dan profesional dalam pelayanan. Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Kominfo (Kemkominfo) sebagai instansi pemerintah yang membidangi bidang digital diharapkan dapat menjadi teladan bagi aparatur pemerintahan lainnya. Khususnya dalam penerapan transformasi digital nasional.

2.3.15 Tempat Penitipan Anak

Pengasuhan anak sejatinya dilakukan oleh orangtua, namun dewasa ini orangtua (ibu) memiliki peran ganda sebagai ibu bekerja. Hal itu membuat perlunya bantuan dalam pengasuhan anak, baik dengan bantuan keluarga atau pengasuh. Umumnya anak yang ditipkan berusia umur 3 bulan-5 tahun.

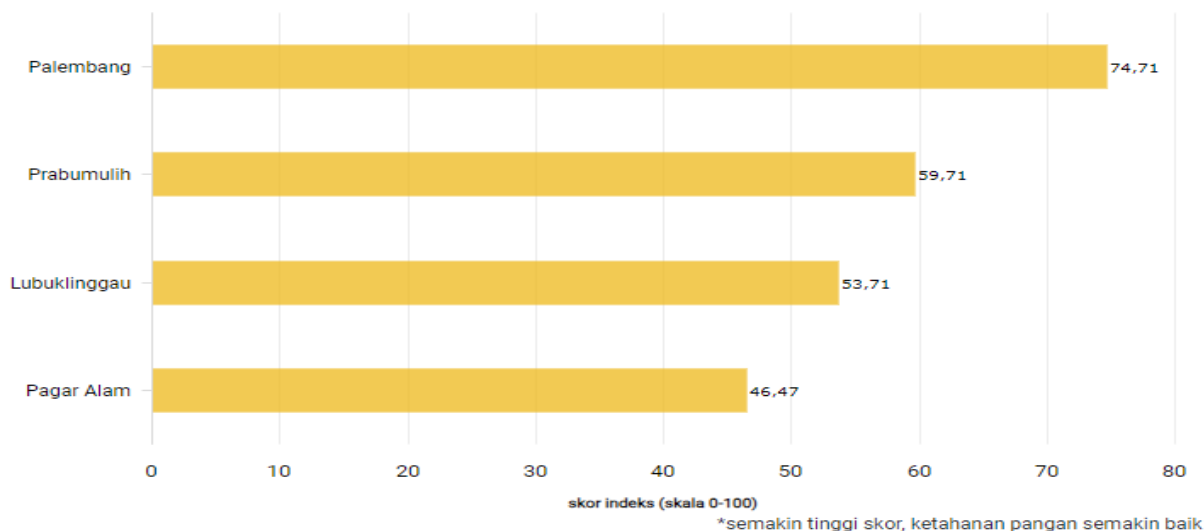
Untuk itu tempat penitipan anak dengan program-program yang terencana dan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak diharapkan mampu menggantikan posisi ibu bekerja pada waktu tertentu. Tenaga pengasuh yang terlatih, bimbingan dan pengawasan langsung oleh Psikolog Anak membuat tumbuh kembang anak dapat terstimulasi dengan tepat.

Di Kota Palembang Jumlah Wanita yang bekerja pada usia diatas 15 tahun sudah cukup tinggi. Seorang ibu dengan kebutuhan khusus yang mengharuskan ia bekerja dan tidak sempat mengasuh anaknya bisa menitipkan anaknya di tempat penitipan anak yang nyaman, layak dan terpercaya. Di Kota Palembang sendiri fasilitas tempat penitipan anak dengan kualitas yang terpercaya masih sangat sedikit dan tergolong rendah. Saat ini TPA di RS Myria, RS Charitas dan di Darma Wanita Persatuan RSUP Dr Mohammad Hoesin.

Di RS Charitas hanya diperuntukan untuk anak-anak pegawai Charitas. Sedangkan yang dibuka untuk umum di RS Myria dan TPA Darma Wanita Persatuan RSUP Dr Mohammad Hoesin. Perlunya fasilitas tambahan yang dapat menampung lebih banyak anak sebaiknya dipertimbangkan untuk tahun selanjutnya demi jaminan keamanan pengasuhan anak yang akan berpengaruh dengan tumbuh kembang anak-anak.

2.3.16 Dinas Pertanian dalam Penerapan *Food Security and Safety*, Masalah Alih Fungsi Lahan Pertanian, dan Keterlibatan UPD dalam program TIK

Food Security and Safety



Gambar 2.7 Grafik Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan

Sumber : Data Indikator Tahun 2021

Dari 4 kota yang berada di Provinsi Sumatra Selatan, Palembang memiliki indeks ketahanan pangan paling tinggi. Hal ini terlihat dari laporan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang bertajuk Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2022 (Data Indikator Tahun 2021).

Mengacu pada UU No. 18 Tahun 2012, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Bapanas mengukur indeks ketahanan pangan di kota-kota Indonesia berdasarkan delapan indikator utama, yakni:

1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan;
2. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan >65% terhadap total pengeluaran;

3. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik;
4. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih;
5. Angka harapan hidup pada saat lahir;
6. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk;
7. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun; dan
8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting).

Berbagai indikator itu kemudian diolah menjadi skor berskala 0-100. Semakin tinggi skornya, ketahanan pangan suatu kota diasumsikan semakin baik pula. Dengan metode tersebut, Palembang meraih skor 74,71 pada 2021, paling baik di antara kota-kota Sumatra Selatan lainnya. Palembang meraih skor tinggi karena warganya relatif lebih mudah mengakses pangan, dibanding warga kota-kota tetangganya. Di Palembang, ada 12,54% rumah tangga yang rasio pengeluaran untuk pangannya >65% dari total pengeluaran. Sementara, di kota-kota Sumatra Selatan lainnya, persentase rumah tangga dengan kriteria tersebut berkisar antara 15% sampai 34%. Ketahanan pangan Kota Palembang juga ditunjang oleh distribusi air bersih yang tergolong sangat baik. Pada 2021, persentase rumah tangga tanpa akses air bersih di Palembang

Alih Fungsi Lahan Pertanian

Melalui portal berita kumparan.com tanggal 28 Agustus 2019, Pemerintah Kota Palembang memberikan larangan keras alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pembangunan perumahan di kota tersebut. Larangan itu sebagai upaya mempertahankan lahan pertanian dari alih fungsi lahan, khususnya di empat kecamatan yakni, Kecamatan Gandus, Kalidoni, Palju, dan Kertapati. Untuk itu, Pemkot Palembang akan melontorkan anggaran yang lebih besar untuk sektor pertanian selain bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi. Kemudian, meningkatkan hasil panen yang ada dengan cara mempercepat proses pengolahan tanah untuk melakukan masa tanam dua kali dalam satu tahun.

Kepala Balai Besar Litbang Pasca Panen, Kementerian Pertanian RI, Prayudi Syamsuri mengatakan, Palembang dicanangkan menjadi lumbung pangan nasional, mengingat dari kota metropolitan yang ada di Indonesia, hanya Palembang yang memiliki lahan pertanian terluas. Palembang merupakan salah satu kota yang pembangunannya pesat, namun hal ini diiringi dengan kondisi sektor pertanian dan perkebunan yang menjanjikan dengan lahan yang masih sangat luas.

Kementerian Pertanian akan menambah 200 ribu hektare lahan baru untuk pertanian di Sumsel, dan Palembang termasuk didalamnya. Tiap tahun Kementerian Pertanian akan memberikan bantuan peralatan untuk pertanian, mulai dari alat pompa, hingga kebutuhan petani lainnya. Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda mengatakan, petani harus menjadi raja di tanahnya sendiri tanpa harus mengandalkan pasokan beras dari luar daerah, meski saat ini hasil panen dari beberapa kawasan yang ada belum mencukupi kebutuhan beras untuk kota sendiri.

Lahan pertanian yang tersebar di pinggiran Sungai Musi memiliki luas lahan yang masih menjanjikan, yakni 4.070 hektare yang tersebar di beberapa kecamatan. Kota Palembang sudah mengalahkannya program khusus, mempercepat proses pengolahan tanah tanam dua kali dalam satu tahun. Tahun 2019, ada 100 hektare lahan yang sudah ditanami selama dua kali dalam satu tahun, artinya kesejahteraan petani mulai membaik. Sebab, kesejahteraan petani lebih dulu harus dipikirkan, sehingga alih lahan tidak terjadi. Larangan alih fungsi lahan sendiri, telah diatur aturan khusus pemetaan lahan pertanian yang ada, sehingga lahan pertanian tidak boleh dialihkan untuk lahan pembangunan yang lainnya.

Peranan Digital Sektor Pertanian Kota Palembang

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa kinerja lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan Indonesia tumbuh sebesar 12,92% pada triwulan II/2021 dan masih tumbuh positif pada triwulan III/2021. Keunggulan sektor pertanian juga bisa dilihat dari sejumlah indikator seperti nilai tukar petani (NTP), nilai tukar usaha petani (NTUP), ekspor produk pertanian, dan penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi pada masa pandemi Covid-19. Sektor pertanian diharapkan sebagai katup penyelamat pemulihan ekonomi sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional. Pertanyaannya adalah bagaimana sektor pertanian dapat tangguh dalam pemulihan ekonomi dan menjaga ketahanan pangan nasional secara berkesinambungan. Hal ini harapannya dilakukan dengan digitalisasi pada ekosistem pertanian.

Survei Angkatan Kerja Nasional dari BPS juga mendapatkan sebanyak 20,62% pemuda Indonesia bekerja di sektor pertanian pada Agustus 2020 naik dibanding periode sebelumnya yang berjumlah 18,43%. Kenaikan jumlah kaum muda di sektor pertanian di masa pandemi ini dapat menjadi momentum yang baik. Sebanyak 85,62% di antaranya merupakan pengguna

internet dan berpeluang menjadi *early adopter* teknologi digital pada sektor pertanian. Teknologi digital pada pertanian dapat didefinisikan sebagai penerapan teknologi informasi dan komunikasi melalui gawai, jaringan, jasa dan aplikasi pada sektor pertanian. Tujuan penggunaannya adalah untuk membantu para pelaku sektor pertanian dalam mengambil keputusan dan memanfaatkan sumber daya (Bank Dunia, 2020). Menurut laporan MercyCorps dan Rabobank, terdapat 55 teknologi digital pertanian di Indonesia. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa 60% teknologi digital pertanian menyorot pada informasi digital seperti informasi pasar atau harga. Sebanyak 40% lainnya fokus ke akses pasar dan hampir sepertiganya menyorot area rantai pasok dan pengelolaan data, sementara sisanya ke jasa keuangan pada pertanian dan mekanisasi pertanian.

Kehadiran teknologi digital pertanian seperti TaniHub yang menghubungkan petani langsung dengan konsumen dapat mempersingkat rantai pasok. Para petani juga dapat mengurangi ketergantungan pada tengkulak. Selama ini, petani lebih banyak menjual hasil pertanian dalam jumlah besar ke tengkulak. Hal ini menyebabkan petani tidak memiliki daya tawar yang kuat untuk menentukan harga produsen. Di samping itu, petani juga memiliki akses terhadap informasi harga komoditas di pasaran yang akurat dan transparan. Digitalisasi memungkinkan diterapkan dari hulu (*on farm*) hingga hilir (*off farm*) yang terintegrasi. Penggunaan teknologi artificial intelligence, robot, internet of things, drone, blockchain dan analisis big data memiliki potensi diterapkan dalam pertanian. Digitalisasi ekosistem pertanian sendiri mencakup bagi petani, pendamping, lembaga pembiayaan, agregator, dan offtaker.

Tantangan pertama adalah adopsi teknologi digital di sektor pertanian belum menjadi prioritas dari pemerintah. Hal ini terlihat dari Rencana Strategis Kementerian Pertanian RI 2020-2024 yang belum secara spesifik menjabarkan strategi untuk adopsi teknologi digital. Akibatnya, dukungan pemerintah untuk program-program tersebut masih terbatas dan tidak merata. Oleh karena itu Kementerian Pertanian dan kementerian lain yang relevan perlu segera menyusun program mengenai pengenalan teknologi digital pertanian. Saat ini, Kementerian Pertanian telah bekerja sama dengan HARA dan Bank BTPN dalam program pinjaman petani dan UMKM. Hal ini memungkinkan untuk dapat meluaskan cakupan kerjasama dengan pihak swasta untuk penetrasi di area lain terkait digitalisasi. Kedua, rendahnya literasi digital petani. Mayoritas petani Indonesia merupakan lulusan sekolah dasar yang rata-rata berumur lebih dari 45 tahun. Keadaan ini menyebabkan sulitnya petani untuk beradaptasi dengan teknologi baru.

Namun demikian, naiknya jumlah pemuda di sektor pertanian menjadi harapan untuk meningkatkan literasi digital di kalangan petani. Hal ini dapat diintegrasikan dalam program penyuluhan pertanian. Peran penyuluhan pertanian oleh pihak swasta juga perlu ditingkatkan mengingat penyuluh pertanian dari pemerintah seringkali kurang dapat menjangkau petani. Ketiga, infrastruktur digital di Indonesia masih lemah dan tidak merata. Laporan dari Speedtest menyebutkan bahwa kecepatan internet di Indonesia berada di urutan 121 dari 139 negara. Hal ini tentunya akan menjadi penghalang bagi petani terutama yang menetap di daerah terpencil untuk memanfaatkan teknologi digital pertanian. Peningkatan infrastruktur digital dapat dilakukan dengan menjamin bahwa regulasi mengenai telekomunikasi stabil dan dapat diprediksi. Pemerintah juga perlu memberikan insentif kepada pihak swasta agar mereka mau membangun infrastruktur digital di daerah terpencil.

Pemerintah dapat memberikan subsidi maupun keringanan pajak bagi pihak swasta yang bersedia dalam pengelolaan rencana ini. Pemerintah bersama swasta perlu terus mendorong pemanfaatan teknologi digital pada pertanian. Lantaran sektor pertanian terbukti menjadi tumpuan selama pandemi Covid-19 berlangsung, termasuk bagi anak muda. Adopsi teknologi digital di pertanian juga dapat dilakukan dengan meningkatkan investasi di sektor pertanian. Adanya investasi dari dalam negeri maupun asing dapat memungkinkan adanya transfer teknologi serta pelatihan bagi sumber daya manusia yang terlibat, termasuk petani. Oleh karena itu, inovasi teknologi digital pada sektor pertanian patut didukung untuk meningkatkan kualitas sektor pertanian Kota Palembang.

Dengan semua potensi dan permasalahan yang sudah dijabarkan diatas, didapatkan kesimpulan dan poin-poin sebagai acuan dalam penentuan program kegiatan yang akan menjadi dasar kegiatan Pemerintah Daerah dalam mengambil tindakan prioritas sebagai upaya memajukan Kota Palembang.

2.4 Potensi

Potensi kelitbangan yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah Kota Palembang meliputi:

1. Pengembangan Perencanaan Pariwisata Budaya dan Olahraga: Kota Palembang memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang kaya, seperti warisan budaya, arsitektur, tradisi-tradisi lokal serta pusat olahraga dengan fasilitas yang lengkap. Potensi kelitbangan di sektor pariwisata dan budaya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan destinasi wisata yang

menarik, peningkatan kualitas infrastruktur pariwisata, pengembangan produk wisata berbasis budaya dan olahraga, serta pemanfaatan teknologi dalam promosi dan pemasaran pariwisata.

2. **Infrastruktur, Fasilitas akomodasi, dan Transportasi:** Palembang merupakan kota besar dan pusat kegiatan ekonomi yang memiliki fasilitas, akomodasi dan akses yang baik di Sumatera Selatan. Hal ini memudahkan dalam perencanaan pembangunan melalui penelitian dan pengembangan yang efektif.
3. **Pendidikan dan Riset:** Pemerintah Kota Palembang dapat melibatkan perguruan tinggi dan lembaga riset dalam kelitbangan di sektor pendidikan dan riset. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset dapat meningkatkan akses pendidikan berkualitas, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta penelitian dan pengembangan inovasi di berbagai sektor untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.
4. **Sumber Daya Manusia yang Terdidik:** Kota Palembang memiliki populasi yang besar dan beragam dengan tingkat pendidikan yang baik. Potensi ini memberikan keunggulan dalam pengembangan sumber daya manusia yang terampil, terdidik, dan berkualitas, yang dapat menjadi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing tinggi.
5. **Dukungan Pemerintah dan Masyarakat:** Palembang memiliki dukungan yang besar dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk pembangunan yang berkualitas. Potensi ini memungkinkan adanya kerjasama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam merumuskan dan melaksanakan rencana pembangunan yang berkelanjutan.

Potensi kelitbangan tersebut dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Palembang dengan melibatkan berbagai stakeholder seperti perguruan tinggi, lembaga riset, komunitas, dan sektor swasta dalam upaya menciptakan program-program inovatif yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi kota.

2.5 Permasalahan

Terdapat beberapa permasalahan yang perlu diatasi dalam implementasi kelitbangan. Beberapa permasalahan tersebut meliputi:

1. Tantangan dalam pengembangan kelitbangan di Kota Palembang adalah keterbatasan sumberdaya yang meliputi aspek pendanaan dan sumber daya manusia yang berkualifikasi di bidang penelitian dan pengembangan. Kondisi ini dapat mempengaruhi kapasitas pemerintah dalam menjalankan program-program kelitbangan yang optimal.
2. Koordinasi antar instansi: Implementasi kelitbangan membutuhkan kolaborasi dan koordinasi yang baik antara berbagai instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor swasta. Tantangan terjadi ketika tidak ada mekanisme yang efektif untuk mengkoordinasikan upaya dan berbagi pengetahuan antarinstansi. Kurangnya kolaborasi dapat menghambat pencapaian tujuan kelitbangan yang holistik.
3. Kurangnya Keterlibatan Masyarakat: Dalam kelitbangan yang sukses, partisipasi aktif masyarakat sangat penting. Namun, masih terdapat kurangnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses kelitbangan di Kota Palembang. Penting untuk mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam program-program kelitbangan agar mereka dapat memahami manfaatnya dan berkontribusi secara aktif.
4. Rendahnya Kesadaran Inovasi: Untuk menciptakan pengetahuan baru dan menghasilkan inovasi, diperlukan budaya inovasi yang kuat di berbagai sektor. Namun, masih terdapat rendahnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya inovasi di kalangan pelaku bisnis, masyarakat, dan pemerintah di Kota Palembang. Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya inovasi dan memberikan dukungan untuk mendorong budaya inovasi di berbagai sektor.
5. Kurangnya Sinergi dengan Rencana Pembangunan Lainnya: Implementasi kelitbangan harus sejalan dengan rencana pembangunan yang ada di Kota Palembang. Namun, terkadang terdapat kurangnya sinergi antara program-program kelitbangan dengan rencana pembangunan lainnya. Penting untuk memastikan bahwa kelitbangan terintegrasi dengan baik dalam rencana pembangunan Kota Palembang dan mendukung visi dan misi pembangunan yang lebih luas.

Dengan mengatasi permasalahan ini, pemerintah Kota Palembang dapat memaksimalkan potensi kelitbangan untuk mengembangkan perekonomian secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.6 Peluang dan Tantangan

Berbagai penjelasan kemampuan Kota Palembang dalam mengelola berbagai peluang dan tantangan yang ada terurai dan tersaji dalam tabel dibawah ini guna menjadi pertimbangan kondisi kelitbangan Kota Palembang.

2.6.1 Peluang

Peluang kelitbangan Kota Palembang

1. Kebijakan Pemerintah untuk Mengembangkan Pariwisata Nasional: Kota Palembang memiliki potensi wisata yang cukup besar, terutama dalam hal budaya dan sejarah. Pemanfaatan pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan pariwisata dapat meningkatkan daya tarik destinasi wisata, meningkatkan pelayanan kepada wisatawan, dan memperluas basis ekonomi kreatif di sektor pariwisata.
2. Kebijakan Pemerintah Pusat untuk Lebih Menggalakkan Pengembangan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik: Dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah Kota Palembang dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan publik. Contohnya, penggunaan aplikasi mobile untuk pembayaran pajak, pendaftaran penduduk, atau pelaporan masalah infrastruktur. Selain itu, penggunaan *teknologi Internet of Things (IoT)* dan big data dapat membantu pemerintah dalam mengumpulkan dan menganalisis data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.
3. Keberpihakan Pemerintah dalam Pengembangan Industri Kreatif: Industri kreatif menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di Kota Palembang. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, seperti e-commerce, platform digital, atau media sosial, dapat mendukung pertumbuhan industri kreatif dan memperluas pasar bagi para pelaku industri tersebut.
4. Peningkatan Inovasi dalam Pembangunan yang Berlanjutan: Konsep Smart City juga dapat mendorong pengembangan kota yang lebih berkelanjutan. Pemerintah Kota Palembang dapat memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan penggunaan energi, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan meningkatkan manajemen limbah. Contoh implementasinya adalah dengan pemasangan sensor

pintar untuk monitoring kualitas udara, penggunaan lampu jalan LED yang hemat energi, atau sistem pengolahan limbah yang efisien.

5. Kebutuhan akan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan: Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan di Kota Palembang. Pengembangan platform e-learning, aplikasi kesehatan online, atau pemanfaatan telemedicine dapat memperluas akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat, terutama di daerah yang sulit dijangkau.

Pemanfaatan peluang kelitbangan ini membutuhkan komitmen pemerintah, kolaborasi dengan pihak terkait, dan investasi dalam pengembangan pengetahuan dan teknologi. Dengan memanfaatkan peluang tersebut, Kota Palembang dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang inovatif dan berdaya saing.

2.6.2 Tantangan

Tantangan dalam pengembangan kelitbangan di Kota Palembang:

1. Pendidikan dan Keterampilan: Pengembangan kelitbangan dalam sektor pariwisata, UMKM, dan pendidikan memerlukan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai.
2. Kesadaran dan Adopsi Teknologi: Pengembangan kelitbangan dalam sektor-sektor tersebut juga memerlukan kesadaran dan adopsi teknologi yang tepat oleh pelaku usaha dan masyarakat. Tantangan dalam bidang ini adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan manfaat teknologi serta mendorong adopsi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sektor masing-masing.
3. Keberlanjutan dan Perlindungan Lingkungan: Dalam pengembangan sektor pariwisata, UMKM, Pemerintah dan Swasta perlu perhatian terhadap keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Tantangan dalam bidang ini adalah mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengembangan sektor-sektor tersebut, seperti pengelolaan limbah, penggunaan energi terbarukan, dan pelestarian budaya dan lingkungan.
4. Kolaborasi dan Kemitraan: Pengembangan kelitbangan dalam sektor-sektor ini juga membutuhkan kolaborasi dan kemitraan yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, lembaga akademik, dan masyarakat. Tantangan dalam bidang ini adalah membangun

hubungan yang saling menguntungkan dan sinergis, serta memperkuat kerjasama dalam pengembangan inovasi dan peningkatan daya saing sektor-sektor tersebut.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, Pemerintah Kota Palembang dapat mendorong pengembangan kelitbangan yang holistik dan berkelanjutan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN



BAB 3 ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN

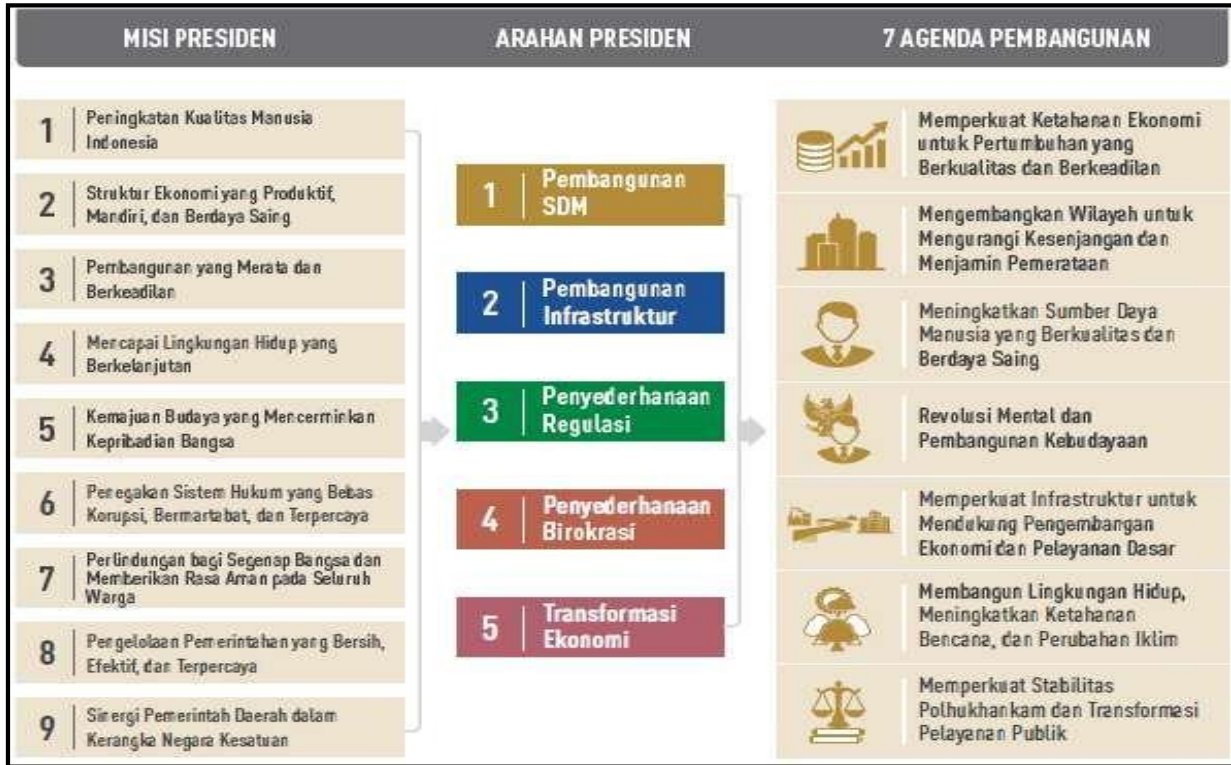
2.7 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan pembangunan daerah merupakan suatu panduan strategis yang dirumuskan oleh pemerintah daerah untuk mengarahkan pembangunan dan mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Kebijakan tersebut mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, infrastruktur, lingkungan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan lain sebagainya. Tujuan dari arah kebijakan pembangunan daerah adalah menciptakan kondisi yang optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah, pemerintah daerah mengacu pada visi, misi, dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan serta mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang ada di wilayah tersebut. Melalui arah kebijakan pembangunan daerah, diharapkan dapat tercipta sinergi antara berbagai sektor dan pemangku kepentingan dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut.

2.7.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disepakati. Rencana Induk Kelitbangan. Penyusunan rencana tersebut berdasarkan beberapa dokumen penting sebagai pedoman dan pertimbangan analisis konteks yang berkembang. Untuk kepentingan penyusunan Pendahuluan Rencana Induk Kelitbangan Kota Palembang Tahun 2024-2029, beberapa dokumen penting menjadi acuan, antara lain adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang 2012-2032 serta RPD Kota Palembang tahun 2024-2026 dan RPJPD yang mengacu dari RPJMN terbaru dan isu terbaru dari sumber bidang terkait secara langsung.

Visi RPJMN untuk periode 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dengan misi yang meliputi:



Gambar 3.1 Misi dan Agenda Pembangunan RPJMN tahun 2020-2024

Sumber : RPJMN tahun 2020-2024

Untuk menentukan tujuan dan sasaran RPD Kota Palembang tahun 2024- 2026, perlu mengacu pada visi, misi serta arah kebijakan RPJPD Kota Palembang di tahapan RPJMD berkenaan. Untuk itu pemetaan bidang-bidang Arah Kebijakan terhadap Tujuan dalam RPD dapat diilustrasikan sebagai berikut :



Gambar 3.2 Implementasi Arah Kebijakan ke dalam Tujuan

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Kota Palembang Tahun 2024-2026

Berdasarkan hasil analisis pengejawantahan Visi dan Misi RPJPD Kota Palembang tahun 2005-2025, arah kebijakan dan sasaran pokok periode ke-IV dari RPJPD Kota Palembang serta memerhatikan isu-isu strategis di Kota Palembang, maka dirumuskan Tujuan Pembangunan Kota Palembang. Tujuan Pembangunan Kota Palembang dalam Rencana Pembangunan Daerah periode 2024–2026 diukur melalui indikator tujuan yang diturunkan menjadi indikator makro bagi pembangunan Kota Palembang, sebagai berikut :

Tujuan	Indikator	Kondisi Awal 2022	Target Akhir 2026
Meningkatnya pertumbuhan dan kemandirian ekonomi masyarakat	Laju pertumbuhan Ekonomi (yoy)	3,17*	4,50
Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan	Tingkat kemiskinan (maret)	10,48	10,33
	Indeks Gini	0,350	0,325
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas terhadap pelayanan Pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,47	79,72
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,24	96,80
Terwujudnya penataan kota yang berkualitas dan infrastruktur yang berkelanjutan	Indeks Infrastruktur PU	n/a	78,54
	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	7,00*	8,00
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	CC	B

Tabel 3.1 Tujuan dan Indikator Tujuan RPD Kota Palembang Tahun 2024-2026

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Kota Palembang Tahun 2024-2026

Indikator Tujuan Pembangunan tersebut adalah beberapa indikator makro pembangunan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2.7.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator beserta target dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palembang Tahun 2024-2026

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Indikator beserta target dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palembang Tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH			Satuan	Kondisi Awal	Target RPD		
Tujuan	Sasaran	Indikator		2022	2024	2025	2026
Meningkatnya pertumbuhan dan kemandirian ekonomi masyarakat		Laju Pertumbuhan Ekonomi (yoy)	%	3,17*	4,30	4,40	4,50
	Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan, sektor konstruksi dan sektor perdagangan besar & eceran, reparasi mobil & sepeda motor (ADHK)	%	2,69*	4,50	4,70	4,80
	Meningkatnya nilai investasi	Pertumbuhan nilai investasi PMA/PMDN	%	76,88*	23,00	28,00	36,00
	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM dan koperasi	Pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil & sepeda motor dan sub sektor penyediaan makan minum (ADHK)	%	4,27*	6,50	6,80	6,90
	Terkendalinya inflasi daerah	Tingkat inflasi Kota Palembang (yoy)	%	5,95	4,00	4,00	4,00

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH			Satuan	Kondisi Awal	Target RPD		
Tujuan	Sasaran	Indikator		2022	2024	2025	2026
Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan		Tingkat Kemiskinan (maret)	%	10,48	10,43	10,38	10,33
		Indeks Gini	Indeks	0,350	0,335	0,330	0,325
	Berkurangnya beban pengeluaran penduduk miskin	Persentase Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima bantuan sosial	%	7,00	9,00	10,00	11,00
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Jumlah pengeluaran perkapita	Rp ribu	15.168	15.500	15.800	16.100
	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,20	8,00	7,80	7,50
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	64,48	64,80	65,00	65,20
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	79,47	79,50	79,52	79,72
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	96,24	96,40	96,60	96,80
	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,43	14,45	14,46	14,47
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,91	10,93	10,94	10,95
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71,00	71,60	71,77	71,97
		Prevalensi Stunting	%	14,30	13,80	13,50	13,30

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH			Satuan	Kondisi Awal	Target RPD		
Tujuan	Sasaran	Indikator		2022	2024	2025	2026
Terwujudnya penataan kota yang berkualitas dan infrastruktur yang berkelanjutan		Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	n/a	76,71	77,64	78,54
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	8,00	8,00	8,00	8,00
	Menurunnya titik kemacetan	Titik kemacetan	%	32,26*	19,35	12,90	6,45
	Meningkatnya kualitas permukiman	Pengurangan titik genangan air	%	84,85	82,00	82,50	82,75
		Luas permukiman kumuh	%	2,32	2,30	2,20	2,10
		Penanganan Sampah Rumah Tangga dan SSRT	%	74,60	71,00	70,00	70,00
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	60,78	60,97	61,37	61,76
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Kesesuaian Terhadap RTRW	%	89,20*	90,00	90,50	91,00	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH			Satuan	Kondisi Awal	Target RPD		
Tujuan	Sasaran	Indikator		2022	2024	2025	2026
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	CC	CC	CC	B
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Nilai	B	B	B	BB
		Opini BPK terhadap LKPD	-	WTP	WTP	WTP	WTP
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	65,62*	67,00	68,00	69,00
	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Indeks	n/a	83,75	85,25	88,00
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik ke masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	86,75*	87,75	88,75	90,00
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,66*	2,70	2,80	2,90
	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Kategori	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif

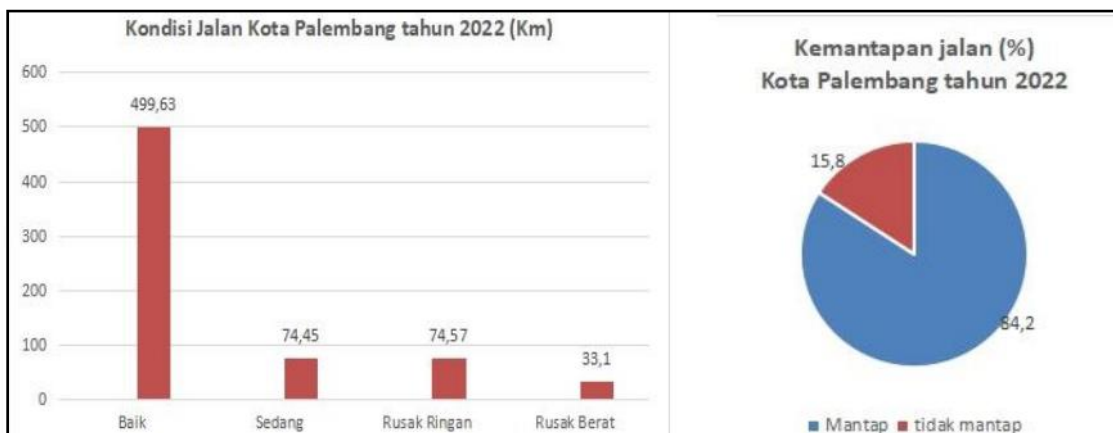
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Rencana Pembangunan Daerah Kota Palembang Tahun 2024-2026

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Kota Palembang gTahun 2024-2026

Pencapaian pembangunan daerah tidak lepas dari peran perangkat daerah, dengan mengaitkan kebijakan daerah dengan perangkat daerah menjadi salah satu tahapan penting dalam melihat konsistensi antara implementasi pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan pembangunan. Secara keseluruhan, beberapa indikator menunjukkan capaian yang baik dan mendekati atau melebihi target yang ditetapkan, seperti pengelolaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup, penyediaan permukiman yang layak, peningkatan IPM, kelurahan yang menyelenggarakan gotong royong, opini BPK, jumlah investasi berskala nasional, dan jumlah event olahraga. Namun, masih terdapat beberapa indikator yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan, seperti kondisi jalan, laju pertumbuhan ekonomi, dan persentase penduduk miskin.

Kota Palembang mengalami perbaikan dalam penyediaan infrastruktur penopang pembangunan daerah. Kondisi jalan dengan keadaan mantap tahun 2022 sebesar 15,8%.

Gambar 3.3 Ilustrasi Kondisi dan Kemantapan Jalan Kota Palembang Tahun 2022



Sumber : DPUPR (data diolah)/ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang 2022

Penyediaan permukiman dan kawasan permukiman yang layak dan berwawasan lingkungan hidup yang mencapai cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana Sarana Umum melebihi mencapai 95,8% dari target yang ditetapkan sebesar 99%.

Tabel 3.3 Ilustrasi Kondisi dan Kemantapan Jalan Kota Palembang Tahun 2022

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2022		
			Target	Realisasi	(%)
Tersedianya permukiman dan kawasan permukiman yang layak dan berwawasan lingkungan hidup	Persentase Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	%	99	95,8	96,77
	Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	%	2,4	2,32	103,33

Sumber : DLHK Kota Palembang, DPRKP Kota Palembang/ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang 2022

Sedangkan untuk peningkatan daya saing dan kualitas sumber daya manusia berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dari 78,72% pada tahun 2011 menjadi 79,47% pada tahun 2021, mendekati target akhir RPJM yang ditetapkan yaitu 79,89%.

Dalam hal mewujudkan pranata sosial yang kokoh dan solid di tengah masyarakat, persentase Kelurahan yang menyelenggarakan kegiatan gotong royong mencapai 100%, mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Terlaksananya Good Governance Practices dan Tata Kelola Pemerintah yang berdaya saing tahun 2019-2022

Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target AKHIR RPJM	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Selisih Thd Tahun Lalu	(%) Thd Target Akhir RPJM
10	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang	%	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	tetap	100,0
11	Hasil Evaluasi AKIP Kota Palembang	%	B	A	B	B	B	B	tetap	85,68

Sumber : BPK Kemankeu, KemenPANRB/ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang 2022

Sebagaimana data yang disajikan pada Tabel diatas, capaian indikator berupa predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada tahun 2022 ini dapat mempertahankan pencapaian dari tahun 2021. Pencapaian predikat WTP ini merupakan pencapaian yang kesekiankalinya diraih oleh Pemerintah Kota Palembang. Bahkan pada Tahun 2022 lalu, Kota Palembang

mendapatkan penghargaan atas capaian opini WTP dari BPK minimal 10 kali berturut turut yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2012 hingga 2021. Pemerintah Kota Palembang berhasil mencapai target Kesesuaian Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah Kota juga sudah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Berbasis Akrual. Pemerintah Kota Palembang juga telah melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Terciptanya peraturan yang bermula dari Nasional hingga tingkat daerah harus menemukan keselarasan yang sesuai, berikut tabel keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPD Kota - RPD Provinsi - RPJM Nasional :

Tabel 3.5 Keselarasan dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam RPD - RPD Provinsi - RPJM Nasional

No	Tujuan	RPD Kota Palembang 2024-2026		RPD Prov. Sumsel 2024-2026	RPJMN 2020-2024
		Sasaran /Indikator		Sasaran / Indikator	Sasaran / Indikator
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	Meningkatnya pertumbuhan dan kemandirian ekonomi masyarakat	1	Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	Meningkatnya perekonomian sektor unggulan	Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor dan Daya Saing
		a.	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan, sektor konstruksi dan sektor perdagangan besar & eceran, reparasi mobil & sepeda motor (ADHK)	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (pertanian, pertambangan, industri pengolahan)	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Pertumbuhan Sektor Perdagangan
		2	Meningkatnya nilai investasi	Meningkatnya investasi daerah	Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor dan Daya Saing
		a.	Pertumbuhan nilai investasi PMA/PMDN (%)	Persentase peningkatan investasi	Pertumbuhan investasi (PMTB) (%)
		3	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM dan koperasi	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM	Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi
		a.	Pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil & sepeda motor dan sub sektor penyediaan makan minum (ADHK)	Pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil & sepeda motor serta penyediaan makan dan minum	Kontribusi UMKM terhadap PDB (%) Kontribusi koperasi terhadap PDB (%)
		4	Terkendalinya inflasi daerah	Terkendalinya laju inflasi daerah	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian
		a.	Tingkat inflasi Kota Palembang (yoy)	Tingkat Inflasi Daerah	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan

No	Tujuan		RPD Kota Palembang 2024-2026 Sasaran /Indikator	RPD Prov. Sumsel 2024-2026 Sasaran / Indikator	RPJMN 2020-2024 Sasaran / Indikator
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
2	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan	5	Berkurangnya beban pengeluaran penduduk miskin	Pengurangan beban Rumah Tangga Miskin	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk
		a.	Jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	Persentase rumah tangga miskin yang mendapat perlindungan sosial	Persentase penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial
		6	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Meningkatnya pendapatan Rumah Tangga	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian
		a.	Jumlah pengeluaran perkapita (Rp 000)	Pengeluaran per kapita	Jumlah PDB Per Kapita
		7	Menurunnya tingkat pengangguran	Menurunnya tingkat pengangguran	Menurunnya Pengangguran
		a.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka
		b.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	
3	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan	8	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan daerah	Terpenuhinya Layanan Dasar
		a.	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
		b.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
		9	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Terpenuhinya Layanan Dasar
		a.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Usia Harapan Hidup (AHH)	Angka Harapan Hidup (AHH)
		b.	Prevalensi Stunting (%)	Persentase kasus gizi buruk pada rumah tangga miskin	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)

No	Tujuan		RPD Kota Palembang 2024-2026 Sasaran /Indikator	RPD Prov. Sumsel 2024-2026 Sasaran / Indikator	RPJMN 2020-2024 Sasaran / Indikator
4	Terwujudnya penataan kota yang berkualitas dan infrastruktur yang berkelanjutan	10	Menurunnya titik kemacetan	Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata	Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan
		a	Titik kemacetan (%)	Indeks Infrastruktur	Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota)
		11	Meningkatnya kualitas permukiman	Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar dan Konektivitas Wilayah
		a.	Pengurangan titik genangan air (%)	Indeks Infrastruktur	
		b.	Luas permukiman kumuh (%)	Persentase luasan kawasan kumuh	Rumah tangga dengan akses sanitasi Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau
		c.	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan SSRT (%)	Indeks Kualitas Air	Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan (%)
		12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
		a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	- Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut IKL) - Indeks Kualitas Air Laut dan Pesisir (IKAL)	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
		13	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
a.	Kesesuaian Terhadap RTRW (%)				

No	Tujuan		RPD Kota Palembang 2024-2026 Sasaran /Indikator	RPD Prov. Sumsel 2024-2026 Sasaran / Indikator	RPJMN 2020-2024 Sasaran / Indikator
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	14	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Menguatnya stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik
		a.	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor SAKIP \geq B
		b.	Opini BPK terhadap LKPD	Opini BPK	Persentase Instansi Pemerintah yang mendapatkan Opini WTP
		c.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	
		15	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas	Menguatnya stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik
		a.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Indeks Perilaku Anti Korupsi
		16	Meningkatnya kualitas pelayanan publik ke masyarakat	- Meningkatkan kualitas pelayanan publik - Meningkatkan kapabilitas birokrasi	Menguatnya stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik
		a.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Konten Informasi Publik
		b.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik
		17	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Menguatnya stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik
a.	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Indeks Inovasi Daerah			

2.8 Strategi dan Arah Kebijakan Kelitbangan Daerah

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang memperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan Daerah, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itu perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RIK Kota Palembang tahun 2018-2023, dirumuskan strategi dan arah kebijakan melalui penjabaran faktor internal, eksternal, serta penjabaran strategi.

2.8.1 Strategi Kelitbangan Daerah

Pengembangan strategi harus mencakup langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan utama dan memberikan dampak pembangunan yang signifikan, memanfaatkan potensi, dan memanfaatkan peluang yang ada. Strategi disusun terukur, realistis, dan terpadu dengan beragam kebijakan daerah lainnya agar sasaran pembangunan tercapai melalui kolaborasi antar lembaga.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan pada pembahasan sebelumnya, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan, maka dirumuskan Strategi Pembangunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Palembang Tahun 2024–2026. Dengan strategi yang disusun, diharapkan mampu mengarahkan sasaran pembangunan menjadi lebih mudah untuk diimplementasikan dalam bentuk program pembangunan. Rumusan strategi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan strategi pembangunan daerah Kota Palembang tahun 2024-2026

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah Kota Palembang Tahun 2024-2026

Tujuan dan Sasaran		Strategi
Tujuan 1: Meningkatnya pertumbuhan dan kemandirian ekonomi masyarakat		
	Sasaran 1: Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	Strategi 1: Peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah
	Sasaran 2: Meningkatnya nilai investasi	Strategi 2: Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi investasi dan pengembangan usaha ekonomi kreatif
	Sasaran 3: Meningkatnya kontribusi sektor UMKM dan koperasi	
	Sasaran 4: Terkendalnya inflasi daerah	Strategi 3: Pengembangan pasar serta mendorong digitalisasi ekonomi
Tujuan 2: Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan		
	Sasaran 5: Berkurangnya beban pengeluaran penduduk miskin	Strategi 4: Penguatan program jaminan sosial
	Sasaran 6: Meningkatnya pendapatan masyarakat	Strategi 5: Percepatan penurunan kemiskinan melalui optimalisasi pemberdayaan masyarakat
	Sasaran 7: Menurunnya tingkat pengangguran	Strategi 6: Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
Tujuan 3: Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan		
	Sasaran 8: Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat	Strategi 7: Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
	Sasaran 9: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	

Tujuan 4: Terwujudnya penataan kota yang berkualitas dan infrastruktur yang berkelanjutan		
	Sasaran 10: Menurunnya titik kemacetan	Strategi 8: Percepatan penataan kota yang berkualitas dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
	Sasaran 11: Meningkatnya kualitas permukiman	
	Sasaran 12: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	
	Sasaran 13: Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	
Tujuan 5: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik		
	Sasaran 14: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Strategi 9: Percepatan Pencapaian Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kota Palembang
	Sasaran 15: Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	
	Sasaran 16: Meningkatnya kualitas pelayanan publik ke masyarakat	
	Sasaran 17: Meningkatnya kualitas inovasi daerah	

Strategi pembangunan diatas akan dilaksanakan pada Tahun 2024, 2025 dan 2026, berikut penjabaran dari strategi pembangunan daerah Kota Palembang Tahun 2024 – 2026:

1) Peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah

Kriteria sektor unggulan menurut Sambodo dalam Usya (2006:15) yaitu: Pertama, sektor unggulan memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menghasilkan nilai tambah yang besar; Kedua, sektor unggulan memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar; Ketiga, sektor unggulan memiliki keterkaitan antara sektor yang tinggi baik ke depan maupun ke belakang. Berdasarkan data PDRB Kota Palembang menurut lapangan usaha ada 3 (tiga) sektor/lapangan usaha unggulan di Kota Palembang, yaitu sektor Industri pengolahan, sektor Konstruksi dan sektor Perdagangan besar & eceran, reparasi mobil & sepeda motor. Ketiga sektor ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada jumlah PDRB Kota Palembang. Untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang maka sektor-sektor ini harus terus didorong perkembangannya dengan terus meningkatkan

produktivitas, tetapi dengan tidak meninggalkan pengembangan sektor lainnya. Hal ini dapat ditempuh dengan mengoptimalkan implementasi riset dan penelitian sehingga dihasilkan inovasi dan langkah terobosan untuk meningkatkan nilai tambah produk.

2) Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi investasi dan pengembangan usaha ekonomi kreatif

Dengan melihat potensi dan Sumber Daya Kota Palembang, keunikan dan kekhasannya, mampu menjadi daya Tarik utama Investor dalam menanamkan investasinya di Kota Palembang. Pengembangan ekonomi pada sector unggulan Kota Palembang sudah terlihat capaiannya beberapa tahun, sehingga hal ini perlu diperkuat dengan optimalisasi investasi pada ekonomi berbasis kerakyatan. Investasi merupakan hal yang penting dalam mempercepat pembangunan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk berinovasi membuat aturan-aturan yang memberikan dorongan menarik investor menanamkan modalnya, namun juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu perlu didukung oleh aparatur-aparatur yang memiliki kompetensi dan keahlian dibidang masing-masing agar pelaksanaan investasi dapat berjalan lancar. Adanya Lembaga perizinan terpadu dalam konteks Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) juga sangat penting dalam rangka untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi investor untuk menanamkan modalnya. Dengan pemahaman yang komprehensif tentang investasi daerah, diharapkan dapat dirumuskan suatu perspektif kebijakan yang holistic dan integrative dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di masa yang akan datang. Dengan demikian Kota Palembang daerah mampu bersaing dalam menarik investasi bagi percepatan pembangunan ekonomi Kota Palembang.

3) Pengembangan pasar serta mendorong digitalisasi ekonomi

Peningkatan produktivitas sektor ekonomi, seperti UMKM, Koperasi dan industri kecil harus didukung dengan jaringan pemasaran produk sehingga dapat bernilai ekonomis yang berujung pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Pemerintah khususnya Pemerintah Kota Palembang harus bisa menjadi fasilitator dalam

menciptakan dan mengembangkan pasar, melalui kerja sama dengan pemerintah daerah lain, dunia usaha maupun pihak-pihak lain termasuk mendorong pemasaran melalui digitalisasi ekonomi. Perkembangan teknologi informasi membuka peluang pemasaran produk-produk tidak lagi melalui pasar fisik, tetapi melalui online yang tingkat kapitalisasinya terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

4) Penguatan program jaminan sosial

Angka kemiskinan di Kota Palembang dalam kurun waktu 2018-2022 relatif terus mengalami penurunan, kecuali di tahun 2021 akibat pandemi covid 19. Walaupun menunjukkan tren menurun tetapi cenderung melambat. Hal ini disebabkan salah satu faktor karena masih belum tepatnya sasaran penerima program jaminan sosial (perlindungan sosial) baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah. Berdasarkan siaran pers SMERU Research Institute dalam webinar Forum Kajian Pembangunan dengan tema “Pelaksanaan Program Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19 dan Urgensi Pemutakhiran DTKS” bahwa masih terdapat penerima bantuan belum tepat sasaran, terdapat tumpang tindih penerima bantuan, pencairan terlambat dan tidak sesuai dengan periode bantuan, alur distribusi dan pengajuan bantuan kurang ringkas, dan bentuk, jumlah serta nilai bantuan yang diterima sasaran tidak selalu sesuai dengan ketentuan. Keakuratan data penerima manfaat dari program-program jaminan sosial sangat mendesak dibutuhkan sehingga program pengentasan kemiskinan di Kota Palembang dapat berjalan efektif.

5) Percepatan penurunan kemiskinan melalui optimalisasi pemberdayaan masyarakat

Kemiskinan menjadi permasalahan multidimensi yang perlu ditangani oleh beberapa pihak, beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan ialah kualitas SDM, produktivitas dan daya saing tenaga kerja, ketersediaan peluang kerja, bantuan kurang tepat sasaran, terbatasnya akses dan permodalan, dampak bencana alam, dsb. Kondisi Kemiskinan merupakan ketidakmampuan secara ekonomi untuk dapat memenuhi kebutuhan standar hidup rata-rata disuatu daerah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Percepatan pengurangan kemiskinan telah menjadi fokus Pemerintah untuk dapat ditangani dengan lebih baik, salah satunya dengan melakukan pengembangan

UMKM, memfasilitasi tenaga kerja dengan Prakerja, memberikan bantuan yang tepat sasaran dan pendampingan dalam pengelolaan usaha/bisnis. Dengan upaya ini diharapkan pendapatan masyarakat Kota Palembang dapat meningkat dan kemiskinan dapat berangsur berkurang.

6) Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja

Kebutuhan peningkatan produktivitas semakin penting dan mendesak dalam menyikapi perubahan teknologi yang sangat cepat dalam menghadapi situasi ekonomi saat ini. Dengan ini dibutuhkan peningkatan kualitas tenaga kerja yang profesional dan kompeten, Menindaklanjuti hal tersebut, perlu dilakukan perbaikan mutu kehidupan secara berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas SDM yang berdaya saing sesuai standar yang dibutuhkan pasar tenaga kerja. Kompetensi SDM menjadi ujung tombak keberhasilan dalam meningkatkan produktivitas daya saing tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja merupakan variabel kunci untuk memenangkan persaingan antar individu, antar industri, antar sektor, antar daerah. Semakin tinggi kompetensi tenaga kerja maka akan semakin tinggi pula nilai tambah yang dihasilkannya. Kemudian, semakin tinggi produktivitas tenaga kerja maka akan semakin tinggi daya saing tenaga kerja yang bersangkutan dan akan berpengaruh pada tingginya Pendapatan per kapita sehingga semakin tinggi juga tingkat kesejahteraannya.

7) Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan

Pembangunan SDM menjadi faktor yang penting dalam membangun kualitas daya saing manusia, pembangunan SDM dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan informal yang dilakukan oleh sekolah dan atau institusi lembaga pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu cara menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kesetaraan gender, pemahaman nilai-nilai budaya dan meningkatkan keadilan sosial. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang terjangkau dan berkualitas merupakan hak setiap warga masyarakat. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraannya. Pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan akses Pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Oleh

karena itu, pembangunan Pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen Pendidikan untuk menghadapi tantang sesuai tuntutan perubahan kehidupan. Pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan SDM tidak hanya dibidang Pendidikan, kesehatan juga menjadi factor penting dalam meningkatkan produktivitas SDM. Aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan dipengaruhi oleh banyak hal yang sangat multidimensional. Aksesibilitas tidak hanya dipengaruhi oleh factor supply semacam ketersediaan tenaga kesehatan dan fasilitas, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa hal yang justru menjadi hambatan bila tidak dikelola dan diantisipasi dengan baik, Dengan ini diperlukan strategi yang perlu diperhatikan secara komprehensif pada setiap faktor yang menjadi determinan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Sehingga diharapkan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Palembang dapat dijangkau dan dinikmati pada seluruh lapisan masyarakat.

8) Percepatan penataan kota yang berkualitas dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan

Konsep pembangunan infrastruktur berkelanjutan merupakan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik saja, namun juga harus memperhatikan dampak pembangunan infrastruktur dalam beberapa aspek dari hulu ke hilir. Pembangunan Infrastruktur tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Palembang. infrastruktur yang akan dibangun harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dari masyarakat sekitar. Konsep ini juga berkaitan dengan sistem infrastruktur yang dibangun, yaitu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti infrastruktur jalan, jembatan, pengembangan transportasi antar moda, kebutuhan akan perumahan yang layak serta lingkungan permukiman yang baik dilengkapi prasarana air bersih dan pengolahan air limbah termasuk pengelolaan sampah dan sebagainya dengan memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan. Dengan konsep pembangunan berkelanjutan, tidak ada lagi infrastruktur yang terbangun dengan mengabaikan aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan. Dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, akan mempermudah dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Sehingga diharapkan

penyediaan infrastruktur pembangunan daerah ini mampu mempercepat pergerakan pembangunan ekonomi, sosial, dan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat Kota Palembang.

9) Akselerasi Pencapaian Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kota Palembang

Reformasi Birokrasi pada tataran pemerintahan tidak lagi sekedar mengandalkan perombakan institusional semata, tetapi harus diimbangi dengan perombakan mentalitas sampai kepada perubahan paradigma Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus lebih peka dalam menyambut perubahan. Perubahan sikap dan mentalitas dari birokrasi akan mewujudkan pola baru "new public service" serta meninggalkan pola lama yang telah 'berkerak' dan menjadi tradisi di pemerintahan yang selama ini menghambat percepatan dalam pembangunan daerah. Pola tradisional dalam pelayanan publik oleh birokrasi sudah tidak akan mampu mengimbangi tantangan yang ada saat ini. Sehingga mengakibatkan target-target pembangunan yang seharusnya dapat dicapai dengan mudah akan meleset atau tidak tercapai dengan maksimal. Oleh karena itu, reformasi birokrasi pada tata kelola pelayanan di dalam pemerintahan harus dilakukan.

3.2.2 Arah Kebijakan Kelitbangan Daerah

Arah kebijakan merupakan rangkaian prioritas yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah program dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih fokus dalam mencapai target tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Palembang periode 2024 – 2026, Dengan demikian diharapkan dapat memberikan hasil pembangunan yang optimal. Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan harus disesuaikan dengan fokus atau tema pembangunan pada setiap tahap yang menjadi acuan dalam penentuan prioritas pembangunan RKPD dalam setiap tahunnya. Fokus/Tema pembangunan Kota Palembang tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.4 Fokus/Tema Pembangunan Kota Palembang Tahun 2024-2026
 Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Kota Palembang Tahun 2024-2026

Dengan fokus/tema pembangunan diatas, berikut penjabaran agenda pembangunan Kota Palembang Tahun 2024 – 2026.

1) Agenda Pembangunan Tahun I (2024)

Pada Tahun 2024 ini Kota Palembang memiliki tema pembangunan “Optimalisasi Kinerja Pemerintahan sebagai penyokong perekonomian daerah yang berdikari”. Merujuk tema tersebut maka pembangunan Kota Palembang difokuskan pada bidang ekonomi, dan pemerintahan. Beberapa bidang terserbut menjadi prioritas pembangunan dikarenakan merupakan bidang krusial dalam pembangunan daerah. Dengan ini diharapkan akan mempercepat meningkatkan kualitas perekonomian daerah terutama yang ditumpukan dengan pengembangan perekenomian yang didasarkan pada sektor-sektor yang mampu digerakan oleh masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut maka pemerintah daerah perlu melaksanakan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah, Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan. Dengan tema dan fokus pembangunan diharapkan pada tahun 2024 ini menjadi titik awal yang maksimal dalam pembagunan Kota Palembang.

2) Agenda Pembangunan Tahun II (2025)

Melanjutkan pembangunan tahun pertama (2024), kebijakan pembangunan tahun kedua (2025) Kota Palembang memiliki tema “Kota Palembang yang Berdaya Saing, Mandiri dan Berbudaya”. Merujuk tema pembangunan ini Kota Palembang pada tahun ini akan berupaya untuk mengoptimalkan capaian-capaian yang sudah diraih untuk

meningkatkan pelayanan pemerintah daerah bagi masyarakat. Beberapa upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah yaitu pada bidang ekonomi dengan Dorongan implementasi upah tenaga kerja di atas Upah Minimum Regional (UMR). Dengan melihat kebutuhan infrastruktur pembangunan di Kota Palembang, perlu upaya Peningkatan kualitas infrastruktur perhubungan, Peningkatan kualitas kawasan permukiman dan perumahan layak huni, dan Penguatan perijinan dan pengawasan aktivitas pembangunan yang berpotensi degradasi kualitas lingkungan hidup. Upaya-upaya tersebut perlu didukung oleh Pemerintah daerah.

3) **Agenda Pembangunan Tahun III (2026)**

Kebijakan pembangunan tahun ketiga (2026) menjadi tahun penentuan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam RPD Kota Palembang Tahun 2024-2026. Pada tahun ini mengusung tema pembangunan “Pemantapan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Pemerataan Kesejahteraan”. Berdasarkan tema tersebut, maka tahun 2026 pembangunan Kota Palembang fokus utama pembangunannya adalah SDM dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan potensi sektor unggulan daerah, upaya yang perlu dilakukan adalah penguatan pada bidang ekonomi, serta penguatan pembangunan pada bidang kesehatan dan Pendidikan. Hal ini untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan berguna untuk mengoptimalkan potensi daerah yang menjadi daya khas ekonomi sektor unggulan, selain itu pembangunan fasilitas kesehatan dan layanan Pendidikan sudah dapat terakses dengan mudah oleh masyarakat. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat yang perlu melakukan optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, penguatan komoditas sektor perdagangan berskala ekspor, peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja, dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan kewirausahaan. Kemudian mendukung upaya dalam pembangunan daerah agar berjalan dengan semestinya maka perlu digitalisasi tata kelola keuangan daerah, sehingga penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Palembang dapat berjalan dengan optimal dan mencapai sasaran pembangunan yang telah direncanakan. Pelaksanaan pembangunan tahun terakhir ini diharapkan mampu memberikan hasil yang maksimal dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Palembang.

Sesuai dengan penjabaran diatas, maka Arah Kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Palembang Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Tabel 3.7 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kota Palembang Tahun 2024-2026

Tujuan dan Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	Tahun		
				2024	2025	2026
Tujuan 1: Meningkatnya pertumbuhan dan kemandirian ekonomi masyarakat						
	Sasaran 1: Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	Strategi 1: Peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah	1. Peningkatan produktivitas lapangan usaha			
			2. Pengembangan hilirisasi produk unggulan daerah			
			3. Pengembangan potensi wisata unggulan daerah			
			4. Optimalisasi kajian/penelitian pengembangan sektor ekonomi unggulan daerah			
	Sasaran 2: Meningkatnya nilai investasi	Strategi 2: Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi investasi dan pengembangan usaha ekonomi kreatif	5. Memberikan kemudahan berinvestasi			
	Sasaran 3: Meningkatnya kontribusi sektor UMKM dan koperasi		6. Pengembangan kewirausahaan pelaku UMKM dan koperasi			
	Sasaran 4: Terkendalnya inflasi daerah	Strategi 3: Pengembangan pasar serta mendorong digitalisasi ekonomi	7. Fasilitasi pemasaran produk unggulan serta mengoptimalkan pasar tradisional dan pasar modern			
			8. Penguatan pengelolaan stok dan ketersediaan pangan.			

Tujuan dan Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	Tahun		
				2024	2025	2026
Tujuan 2: Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan						
	Sasaran 5: Berkurangnya beban pengeluaran penduduk miskin	Strategi 4: Penguatan program jaminan sosial	9. Penguatan sistem jaminan perlindungan dan rehabilitasi sosial			
			10. Mempercepat pelaksanaan verifikasi data penerima perlindungan sosial			
	Sasaran 6: Meningkatnya pendapatan masyarakat	Strategi 5: Percepatan penurunan kemiskinan melalui optimalisasi pemberdayaan masyarakat	11. Peningkatan penyediaan infrastruktur dasar dan akses terhadap layanan dasar			
			12. Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin			
	Sasaran 7: Menurunnya tingkat pengangguran	Strategi 6: Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	13. Perluasan lapangan/kesempatan kerja			
			14. Peningkatan kualitas (keterampilan dan keahlian) tenaga kerja			
Tujuan 3: Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan						
	Sasaran 8: Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat	Strategi 7: Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat	15. Peningkatan kualitas pelayanan dan akses terhadap fasilitas pendidikan			
			16. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik/ kependidikan			
	Sasaran 9: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		17. Peningkatan kualitas pelayanan dan akses terhadap fasilitas kesehatan			
			18. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan			

Tujuan dan Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	Tahun		
				2024	2025	2026
Tujuan 4: Terwujudnya penataan kota yang berkualitas dan infrastruktur yang berkelanjutan						
	Sasaran 10: Menurunnya titik kemacetan	Strategi 8: Percepatan penataan kota yang berkualitas dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	19. Peningkatan konektivitas wilayah, kualitas jalan/jembatan dan revitalisasi fungsi badan jalan			
			20. Optimalisasi penerapan sistem transportasi antar moda			
			21. Normalisasi aliran sungai dan drainase			
			22. Peningkatan layanan dan kualitas air bersih			
			23. Peningkatan ketersediaan perumahan layak huni dan terjangkau (MBR)			
			24. Optimalisasi penataan permukiman kumuh			
			25. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah			
			26. Peningkatan penngendalian dan pengawasan kualitas lingkungan hidup			
			27. Penguatan inovasi teknologi yang ramah lingkungan			
			28. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim			
	Sasaran 11: Meningkatnya kualitas permukiman					
	Sasaran 12: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup					
	Sasaran 13: Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang					
			29. Penguatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang			
			30. Optimalisasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			

Tujuan dan Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	Tahun		
				2024	2025	2026
Tujuan 5: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik						
	Sasaran 14: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Strategi 9: Percepatan Pencapaian Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kota Palembang	31. Peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah			
	Sasaran 15: Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN		32. Optimalisasi dan diversifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah			
	Sasaran 16: Meningkatnya kualitas pelayanan publik ke masyarakat		33. Peningkatan akuntabilitas dan pengawasan penggunaan keuangan daerah berbasis IT			
	Sasaran 17: Meningkatnya kualitas inovasi daerah		34. Digitalisasi tata kelola kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik			
			35. Peningkatan ketentraman dan ketertiban			
		36. Optimalisasi penerapan inovasi untuk tata kelola pemerintahan daerah, pelayanan publik dan inovasi bentuk lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah				

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Kota Palembang Tahun 2024-2026

2.9 Program Prioritas Daerah

Program dan capaian prioritas pembangunan menjadi landasan penentuan program dan kebijakan strategis bidang Kelitbangan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi sebagai jawaban atas isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang telah berjalan. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, maka diperoleh permasalahan dan target yang perlu diprioritaskan daerah dalam 5 tahun ke depan dan menjadi dasar bagi kegiatan kelitbangan selanjutnya, yaitu:

Tabel 3.8 Program Prioritas Kota Palembang

Indikator Tujuan, Sasaran dan Program	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Perangkat Daerah	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026
[TUJUAN] Meningkatnya Pertumbuhan dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat									
Laju Pertumbuhan Ekonomi (yoy)	3,17%	4,30%	4,40%	4,50%	4,50%				
[SASARAN] Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Ekonomi Unggulan Daerah									
Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan, sektor konstruksi dan sektor perdagangan besar & eceran, reparasi mobil & sepeda motor (ADHK)	2,69%	4,50%	4,70%	4,80%	4,80%				
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP									
Jumlah produksi perikanan tangkap	375.56 Ton	410.11 Ton	422.41 Ton	430.36 Ton	430.36 Ton	Dinas Perikanan	563.800.000,00	590.000.000,00	610.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA									
Jumlah produksi perikanan budidaya	52041 Ton	54643 Ton	57375 Ton	60244 Ton	60244 Ton	Dinas Perikanan	1.259.950.000,00	1.315.000.000,00	1.460.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN									
Jumlah kawasan perikanan yang terlindungi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas Perikanan	86.400.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN									
Produksi olahan hasil perikanan	8230 Ton	8350 Ton	8400 Ton	8450 Ton	8450 Ton	Dinas Perikanan	454.700.000,00	465.000.000,00	465.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA									
Jumlah destinasi wisata yang ada	77 Destinasi	78 Destinasi	79 Destinasi	80 Destinasi	80 Destinasi	Dinas Pariwisata	971.610.000,00	1.100.580.000,00	1.272.884.557,00
[PROGRAM] PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA									
Jumlah promosi dan publikasi pariwisata	52 Publikasi	53 Publikasi	54 Publikasi	55 Publikasi	55 Publikasi	Dinas Pariwisata	948.297.669,00	1.027.226.669,00	1.101.005.569,00
[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL									

Indikator Tujuan, Sasaran dan Program	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Perangkat Daerah	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026
Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	75 Usaha	20 Usaha	25 Usaha	31 Usaha	86 Usaha	Dinas Pariwisata	619.260.000,00	681.186.000,00	722.736.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF									
Jumlah SDM pariwisata yang profesional	200 Orang	10 Orang	15 Orang	20 Orang	20 Orang	Dinas Pariwisata	1.020.981.200,00	1.109.479.412,00	1.252.879.412,00
[PROGRAM] PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN									
Persentase Perusahaan yang mempunyai legalitas sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perdagangan	100.000.000,00	180.000.000,00	195.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN									
Persentase Sarana Perdagangan yang lebih baik	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perdagangan	50.000.000,00	125.000.000,00	135.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR									
Persentase Produk Ekspor Unggulan yang lebih baik	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perdagangan	122.217.639,00	150.000.000,00	155.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI									
Persentase Produk unggulan yang berinovasi	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perdagangan	0	85.000.000,00	90.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI									
Persentase Terlaksananya Rencana Pembangunan Industri	0%	25%	50%	75%	75%	Dinas Perindustrian	1.240.000.000,00	1.650.000.000,00	1.890.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI									
Persentase Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Izin Usaha Industri	24%	25%	27%	30%	30%	Dinas Perindustrian	250.000.000,00	330.000.000,00	360.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL									
Persentase Terlaksananya Pengelolaan Data Industri melalui SIINas	3,20%	3,20%	3,30%	3,40%	3,40%	Dinas Perindustrian	160.000.000,00	235.000.000,00	300.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN									
Persentase Cakupan Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah	4.583.141.665,00	5.066.166.611,00	5.357.608.555,00
[SASARAN] Meningkatnya Nilai Investasi									
Pertumbuhan nilai investasi PMA/PMDN (%)	76,88%	23,00%	28,00%	36,00%	36,00%				
[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL									
Persentase ketersediaan dokumen kebijakan dibidang penanaman modal	0%	100%	100%	100%	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	140.000.000,00	370.000.000,00	570.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL									
persentase penyediaan promosi penanaman modal	0%	100%	100%	100%	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	318.800.000,00	568.800.000,00	768.800.000,00

Indikator Tujuan, Sasaran dan Program	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Perangkat Daerah	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026
[PROGRAM] PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL									
Persentase pelayanan kewenangan DPMPSTP	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	360.000.000,00	860.000.000,00	1.160.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL									
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	431.503.000,00	731.503.000,00	931.503.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL									
Persentase penyediaan data sistem informasi bagi pelayanan perizinan dan non perizinan	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	198.932.000,00	298.932.000,00	398.932.000,00
[PROGRAM] PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN									
Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan Ditera Ulang	2959 Unit	2959 Unit	3253 Unit	3020 Unit	3020 Unit	Dinas Perdagangan	172.000.000,00	180.000.000,00	185.000.000,00
[SASARAN] Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM dan Koperasi									
Pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil & sepeda motor dan sub sektor penyediaan makan minum (ADHK)	4,27%	6,50%	6,80%	6,90%	6,90%				
[PROGRAM] PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM									
[PROGRAM] PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	17,54%	50,17%	65,15%	79,11%	79,11%	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	71.253.900,00	77.083.900,00	86.259.900,00
[PROGRAM] PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)									
[PROGRAM] PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	270.000.000,00	280.000.000,00	294.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI									
[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	17,54%	18,39%	18,89%	18,99%	18,99%	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	321.000.000,00	331.000.000,00	344.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI									
Persentase Koperasi Aktif	15,79%	45,15%	60,26%	74,37%	74,37%	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	480.920.800,00	480.920.800,00	480.920.800,00
Persentase Koperasi Sehat									
Persentase Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	41,75%	44,82%	45,60%	45,89%	45,89%	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	844.840.070,00	875.059.070,00	903.750.070,00
Persentase Koperasi yang Mendapatkan Pelayanan Usaha Simpan Pinjam									

Indikator Tujuan, Sasaran dan Program	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Perangkat Daerah	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026
Persentase partisipasi Usaha Mikro dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil	0,17%	0,64%	0,88%	1,10%	1,10%	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	707.710.000,00	741.095.500,00	778.150.276,00
Persentase partisipasi wirausaha dalam pengembangan kewirausahaan	0%	0,74%	1,35%	1,96%	1,96%	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	493.473.000,00	493.473.000,00	537.469.000,00
Persentase SDM Koperasi yang Mendapatkan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian									
Persentase Usaha Mikro yang Difasilitasi dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil	0,60%	0,89%	1,01%	1,14%	1,14%	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1.634.134.639,00	1.707.335.380,00	2.176.150.919,00
Persentase Wirausaha yang difasilitasi dalam Pemberdayaan Kewirausahaan	0%	0,74%	1,35%	1,96%	1,96%	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	610.000.000,00	610.000.000,00	725.100.000,00
[SASARAN] Terkendalnya inflasi									
Tingkat Inflasi Kota Palembang (yoy)	5,95%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%				
[PROGRAM] PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT									
Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	700.000.000,00	900.000.000,00	990.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN									
Persentase Penanganan Kerawanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	200.000.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN									
Persentase Pengawasan Keamanan Pangan yang dilakukan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	275.000.000,00	350.000.000,00	400.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING									
Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Penting	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perdagangan	197.217.639,00	335.000.000,00	355.000.000,00
[TUJUAN] Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan									
Indeks Gini	0,350 Indeks	0,335 Indeks	0,330 Indeks	0,325 Indeks	0,325 Indeks				
Tingkat Kemiskinan	10,48%	10,43%	10,38%	10,33%	10,33%				
[SASARAN] Berkurangnya Beban Pengeluaran Penduduk Miskin									
Persentase Rumah Tangga Miskin (RTM) Penerima Bantuan Sosial	7,00%	9,00%	10,00%	11,00%	11,00%				
[PROGRAM] PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL									
Persentase pelaksanaan pemberdayaan kesejahteraan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial	767.937.200,00	806.334.060,00	846.650.763,00
[PROGRAM] PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN									

Indikator Tujuan, Sasaran dan Program	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Perangkat Daerah	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026
Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial	20.000.000,00	21.000.000,00	22.050.000,00
[PROGRAM] PROGRAM REHABILITASI SOSIAL									
Persentase pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial	1.838.842.429,00	1.930.784.550,00	2.027.323.778,00
[PROGRAM] PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL									
Persentase pelaksanaan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial	2.276.374.010,00	2.390.192.711,00	2.509.702.346,00
[PROGRAM] PROGRAM PENANGANAN BENCANA									
Persentase Kegiatan Penanganan Bencana Yang Terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial	996.057.600,00	1.045.860.480,00	1.098.153.504,00
[SASARAN] Meningkatnya Pendapatan Masyarakat									
Jumlah Pengeluaran Perkapita	15.168 Rp Ribu	15.500 Rp Ribu	15.800 Rp Ribu	16.100 Rp Ribu	16.100 Rp Ribu				
[PROGRAM] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN									
Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	475.000.000,00	575.000.000,00	630.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN									
Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	417.000.000,00	510.000.000,00	700.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER									
Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dilakukan	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	450.000.000,00	525.000.000,00	625.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN									
Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang dilakukan	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	165.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN									
Persentase Penyuluhan Pertanian yang dilakukan	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	678.996.000,00	775.000.000,00	840.000.000,00
[SASARAN] Menurunnya Tingkat Pengangguran									
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	64,48%	64,80%	65,00%	65,20%	65,20%				
Tingkat Pengangguran Terbuka	8,20%	8,00%	7,80%	7,50%	7,50%				
[PROGRAM] PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA									
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja	150.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA									
Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	77,12%	77,20%	77,25%	77,30%	77,30%	Dinas Tenaga Kerja	1.900.000.000,00	2.457.500.000,00	2.975.000.000,00

Indikator Tujuan, Sasaran dan Program	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Perangkat Daerah	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026
Tingkat produktivitas tenaga kerja	4.26 Rp Juta	144.8 Rp Juta	144.84 Rp Juta	144.88 Rp Juta	144.88 Rp Juta	Dinas Tenaga Kerja	0	0	0
[PROGRAM] PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA									
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	80,70%	82,50%	85,50%	87,50%	87,50%	Dinas Tenaga Kerja	1.130.000.000,00	1.285.000.000,00	1.460.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL									
Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	37,34%	37,75%	38,25%	38,75%	38,75%	Dinas Tenaga Kerja	1.010.000.000,00	1.200.000.000,00	1.325.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN									
Persentase Pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.689.610.106,00	1.730.000.000,00	1.870.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN									
Persentase Pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8.538.671.480,00	8.997.166.351,00	9.257.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN									
Persentase Pemenuhan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	260.000.000,00	300.000.000,00	320.000.000,00
[TUJUAN] Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan									
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,24 Indeks	96,40 Indeks	96,60 Indeks	96,80 Indeks	96,80 Indeks				
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,47 Indeks	79,50 Indeks	79,52 Indeks	79,72 Indeks	79,72 Indeks				
[SASARAN] Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat									
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,43 Tahun	14,45 Tahun	14,46 Tahun	14,47 Tahun	14,47 Tahun				
Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	10,91 Tahun	10,93 Tahun	10,94 Tahun	10,95 Tahun	10,95 Tahun				
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									
Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan	93,71%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	431.396.345.964,00	514.450.056.237,00	587.882.425.621,00
[PROGRAM] PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN									
Rerata Kemampuan Literasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional	57,35%	58,35%	59,35%	60,35%	60,35%	Dinas Pendidikan	519.516.060,00	519.516.060,00	519.516.060,00
[PROGRAM] PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)									
Persentase Kelurahan Layak Anak (DEKELA) di Kota Palembang	0%	33,64%	42,06%	59,81%	59,81%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	385.000.000,00	454.250.000,00	476.962.500,00
[PROGRAM] PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK									

Indikator Tujuan, Sasaran dan Program	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Perangkat Daerah	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	450.000.000,00	546.000.000,00	573.300.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN									
Persentase Pencapaian Pemajuan Kebudayaan	80%	85%	90%	95%	95%	Dinas Kebudayaan	601.416.200,00	661.557.820,00	662.264.958,00
[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL									
Persentase Pencapaian Pengembangan Kesenian Tradisional	80%	85%	90%	95%	95%	Dinas Kebudayaan	134.090.000,00	147.499.000,00	147.499.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH									
Persentase Pencapaian Pembinaan Sejarah	80%	85%	90%	95%	95%	Dinas Kebudayaan	37.171.332,00	40.888.465,00	40.888.465,00
[PROGRAM] PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA									
Persentase Cagar Budaya yang Dikelola dan Diselesaikan	80%	85%	90%	95%	95%	Dinas Kebudayaan	86.294.450,00	94.923.895,00	94.923.895,00
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN									
Persentase Pencapaian Pengelolaan Permuseuman	80%	85%	90%	95%	95%	Dinas Kebudayaan	1.320.000.000,00	1.452.000.000,00	1.452.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN									
Persentase pemustaka yang mendapatkan layanan perpustakaan sesuai peraturan yang berlaku [PROGRAM] PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	4,45%	4,70%	4,80%	4,90%	4,90%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	315.000.000,00	629.450.000,00	660.922.500,00
Persentase kelurahan yang masyarakatnya melestarikan Naskah Kuno	0%	8,41%	8,41%	8,41%	8,41%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	40.000.000,00	80.500.000,00	84.525.000,00
[SASARAN] Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat									
Angka Harapan Hidup (AHH)	71,49 Tahun	71,60 Tahun	71,77 Tahun	71,97 Tahun	71,97 Tahun				
Prevalensi Stunting (%)	14,30%	13,80%	13,50%	13,30%	13,30%				
[PROGRAM] PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
Persentase keluarga yang diintervensi sesuai dengan hasil pendataan PIS-PK	50%	60%	65%	67%	67%	Dinas Kesehatan	182.674.654.579,00	239.660.774.892,00	267.956.378.780,00
Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (RSUD BARI)	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	19.172.173.000,00	27.529.000.000,00	27.890.700.000,00
Persentase terlaksananya program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (RSUD Gandus)	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	4.701.407.113,00	6.122.534.465,00	7.243.923.906,00
[PROGRAM] PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									
Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	75%	85%	90%	100%	100%	Dinas Kesehatan	1.864.830.000,00	3.669.156.000,00	3.873.482.000,00
Persentase sumber daya manusia kesehatan yang mengikuti pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi (RSUD Gandus)	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	200.000.000,00	220.000.000,00	242.000.000,00

Indikator Tujuan, Sasaran dan Program	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Perangkat Daerah	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026
[PROGRAM] PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN									
Persentase sarana farmasi, usaha mikro obat tradisional, sarana alat kesehatan dan sarana industri rumah tangga yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	22%	25%	30%	35%	35%	Dinas Kesehatan	824.787.000,00	904.905.700,00	956.962.135,00
[PROGRAM] PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									
Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan PHBS	68%	70%	75%	80%	80%	Dinas Kesehatan	1.439.149.800,00	1.756.221.500,00	1.844.032.575,00
Persentase Tersedianya Program Pemberdayaan Masyarakat (RSUD Gandus)	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	100.000.000,00	110.000.000,00	121.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN									
Persentase OPD yang sudah melaksanakan Perencanaan Penganggaran Rensposnif Gender (PPRG)	80%	93%	96%	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	390.000.000,00	446.250.000,00	468.562.500,00
[PROGRAM] PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN									
Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, termasuk TPPO yang ditangani instansi terkait (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	160.000.000,00	343.250.000,00	360.412.500,00
[PROGRAM] PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA									
Persentase Pembentukan Industri Rumah Binaan di Kelurahan	22%	44%	72%	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	50.000.000,00	273.000.000,00	286.650.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK									
Persentase ARG pada Belanja Operasi APBD	0,04%	0,08%	0,09%	1%	1%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	65.000.000,00	96.247.200,00	101.059.560,00
[PROGRAM] PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK									
Tersedianya Data Kependudukan dan Data Program Bangga Kencana	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	245.777.698,00	239.900.000,00	263.950.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)									
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.382.170.008,00	5.661.749.431,00	5.622.732.577,00
[PROGRAM] PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)									
Persentase pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	0%	0%	0%	0%	0%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.234.618.942,00	6.729.990.002,00	6.730.550.002,00
[TUJUAN] Terwujudnya Penataan Kota yang Berkualitas dan Infrastruktur yang Berkelanjutan									
Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum (PU)	n/a Indeks	76.71 Indeks	77.64 Indeks	78.54 Indeks	78.54 Indeks				

Indikator Tujuan, Sasaran dan Program	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Perangkat Daerah	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%				
[SASARAN] Menurunnya Titik Kemacetan									
Titik kemacetan (%)	32,26%	19,35%	12,90%	6,45%	6,45%				
[PROGRAM] PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN									
Indeks Infrastruktur Jalan	0%	74%	77%	79%	79%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	263.608.518.984,00	264.907.583.087,00	265.866.749.957,00
[PROGRAM] PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)									
Persentase Terpenuhi Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Jalan	100%	50,17%	65,15%	79,11%	79,11%	Dinas Perhubungan	21.034.681.450,00	22.156.239.349,00	20.630.800.687,00
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN									
Persentase Terpenuhi Fasilitas Perlengkapan dan Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan	2.996.006.178,00	1.013.663.832,00	1.095.030.214,00
[SASARAN] Meningkatnya Kualitas Permukiman									
Luas Permukiman Kumuh	2,32%	2,30%	2,20%	2,10%	2,10%				
Penanganan Sampah Rumah Tangga dan SSRT	74,60%	71,00%	70,00%	70,00%	70,00%				
Pengurangan Titik Genangan Air	81,85%	82,00%	82,50%	82,75%	82,75%				
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)									
Persentase Pengurangan Titik Genangan Air	84,85%	85%	85,50%	86%	86%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28.200.000.000,00	28.200.000.000,00	28.200.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM									
Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	85,37%	90,25%	90,50%	90,75%	90,75%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	33.500.000.000,00	33.500.000.000,00	33.500.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH									
Persentase penduduk yang terlayani Sistem Air Limbah yang memadai	81,46%	81,75%	82%	82,50%	82,50%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	124.000.000.000,00	124.000.000.000,00	124.000.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE									
Persentase Pengurangan Titik Genangan Air	84,85%	85%	85,50%	86%	86%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	33.650.000.000,00	33.650.000.000,00	33.650.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN									
Persentase ketersediaan rumah layak huni bagi korban relokasi dan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan	17.750.000.000,00	20.750.000.000,00	23.750.000.000,00

Indikator Tujuan, Sasaran dan Program	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Perangkat Daerah	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026
						Permukiman dan Pertanahan			
[PROGRAM] PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN									
Luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	2,30%	2,30%	2,20%	2,10%	2,10%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	43.437.500.000,00	56.137.500.000,00	61.681.231.383,00
[PROGRAM] PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH									
Luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	2,30%	2,30%	2,20%	2,10%	2,10%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.500.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)									
Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	75%	75%	78%	80%	80%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	145.902.039.008,00	161.020.810.846,00	168.020.810.846,00
[PROGRAM] PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
Persentase pengembang bidang perumahan dan kawasan permukiman yang memiliki izin	85%	85%	90%	95%	95%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN									
Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	74,89%	71%	70%	70%	70%	Dinas Lingkungan Hidup	100.849.836.926,00	201.667.836.926,00	223.142.836.926,00
[SASARAN] Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup									
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	60,78 Indeks	60,97 Indeks	61,37 Indeks	61,76 Indeks	61,76 Indeks				
[PROGRAM] PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP									
Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dengan Satuan:Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP									
Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Dengan Satuan:persentase)	7%	8%	8%	8%	8%	Dinas Lingkungan Hidup	0	0	0
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	59,79 Indeks	60,97 Indeks	61,37 Indeks	61,76 Indeks	61,76 Indeks	Dinas Lingkungan Hidup	1.340.220.240,00	1.340.220.240,00	1.340.220.240,00
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)									
Jumlah dokumen pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00

Indikator Tujuan, Sasaran dan Program	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Perangkat Daerah	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026
[PROGRAM] PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)									
Jumlah Dokumen Pengelolaan Limbah B3	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)									
Jumlah Dokumen lingkungan yang mendapatkan persetujuan Lingkungan	12 Dokumen	54 Dokumen	54 Dokumen	54 Dokumen	54 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup	765.040.600,00	765.040.600,00	765.040.600,00
[PROGRAM] PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT									
Jumlah Masyarakat yang Mendapat Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup	200%	100%	100%	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup	241.000.000,00	241.000.000,00	241.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT									
Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	5 Penghargaan	5 Penghargaan	5 Penghargaan	5 Penghargaan	5 Penghargaan	Dinas Lingkungan Hidup	388.225.000,00	388.225.000,00	388.225.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP									
Persentase Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
[SASARAN] Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang									
Persentase Kesesuaian Terhadap RTRW	89,20%	90,00%	90,50%	91,00%	91,00%				
[PROGRAM] PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG									
Persentase bangunan gedung yang memenuhi SPPST	0%	35,71%	35,80%	35,89%	35,89%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23.055.000.000,00	23.055.000.000,00	23.055.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI									
Nilai Rata-Rata Penerapan NSPK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	0%	59,26%	62,96%	66,67%	66,67%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.965.400.000,00	2.965.400.000,00	2.965.400.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG									
Persentase Kesesuaian terhadap RTRW	0%	90%	90,50%	91%	91%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.751.900.000,00	2.751.900.000,00	2.751.900.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN									
Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	75%	75%	76%	77%	77%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN									

Indikator Tujuan, Sasaran dan Program	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Perangkat Daerah	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026
Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan	70%	70%	71%	72%	72%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE									
Persentase penyelesaian redistribusi, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum	70%	70%	71%	72%	72%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT									
Persentase penetapan tanah ulayat	75%	75%	78%	80%	80%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG									
Persentase pengelolaan tanah kosong	75%	75%	78%	80%	80%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH									
Persentase pengelolaan izin membuka tanah	75%	75%	76%	77%	77%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH									
Persentase penatagunaan tanah	75%	75%	76%	77%	77%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
[TUJUAN] Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik									
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	CC Indeks	CC Indeks	CC Indeks	B Indeks	B Indeks				
[SASARAN] Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah									
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	65,62 Indeks	67,00 Indeks	68,00 Indeks	69,00 Indeks	69,00 Indeks				
Nilai SAKIP	B Nilai	B Nilai	B Nilai	BB Nilai	BB Nilai				
Opini BPK terhadap LKPD	WTP Opini	WTP Opini	WTP Opini	WTP Opini	WTP Opini				
[PROGRAM] PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA									
Persentase Lurah dan LPM Berprestasi	14,01%	33,65%	50,47%	67,29%	67,29%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	70.000.000,00	73.500.000,00	77.175.000,00

Indikator Tujuan, Sasaran dan Program	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Perangkat Daerah	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP									
Persentase Pengolahan Arsip Dinamis dan Arsip Statis yang dikelola dengan baik	70%	70,25%	70,50%	70,75%	70,75%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	400.000.000,00	586.500.000,00	622.725.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP									
Persentase arsip/dokumen yang terlindungi dan terselamatkan	0%	9,61%	13,46%	17,30%	17,30%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	28.000.000,00	51.750.000,00	54.337.500,00
[PROGRAM] PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH									
Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2.194.850.000,00	2.423.500.000,00	2.548.500.000,00
[PROGRAM] PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
Persentase dokumen perencanaan (Renstra/Renja) Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur, Kewilayahan dan Pemerintahan yang sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2.996.500.000,00	3.299.400.000,00	3.463.000.000,00
Persentase dokumen perencanaan (Renstra/Renja) Perangkat Daerah Mitra bidang perekonomian, Sumber Daya Alam dan Pembangunan Manusia yang sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	0	0	0
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									
Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	18.924.776.528,00	19.871.015.356,00	20.831.015.357,00
Persentase Perda APBD dan Perda APBD Perubahan yang disahkan sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	0
Persentase SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	0
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH									
Persentase Laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang Disusun Sesuai dengan Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.344.950.837,00	2.462.198.379,00	2.580.798.379,00
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH									
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	32,87%	41,47%	41,90%	42,84%	42,84%	Badan Pendapatan Daerah	0	0	0
Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	29,12%	35,66%	36,30%	37,37%	37,37%	Badan Pendapatan Daerah	7.639.876.000,00	10.373.559.000,00	9.288.562.000,00
[PROGRAM] PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH									
Persentase fasilitasi lembaga profesi ASN	75%	80%	85%	90%	90%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0

Indikator Tujuan, Sasaran dan Program	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Perangkat Daerah	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026
Persentase fasilitasi pengembangan kompetensi pegawai melalui jalur pendidikan	80%	81%	82%	83%	83%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0
Persentase monitoring pengelolaan administrasi penilaian kinerja ASN	70%	75%	80%	85%	85%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0
Persentase pelaksanaan atau fasilitasi pengembangan kompetensi ASN	70%	75%	80%	85%	85%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0
Persentase pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang ditindaklanjuti	75%	80%	85%	90%	90%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.035.376.141,00	5.605.664.513,00	5.984.653.514,00
Persentase pengelolaan kegiatan penghargaan ASN	75%	80%	85%	90%	90%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0
Persentase pengelolaan kegiatan UPT Assessment Centre	70%	71%	72%	73%	73%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0
Persentase Pengelolaan Perizinan Pegawai	70%	75%	80%	85%	85%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0
Persentase pengelolaan promosi dan pengembangan karir ASN	70%	75%	80%	85%	85%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0
Persentase penyelesaian fasilitasi diklat dan sertifikasi ASN	75%	80%	85%	90%	90%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0
Persentase penyelesaian mutasi	70%	75%	80%	85%	85%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0
Persentase penyelesaian pelayanan kepangkatan	75%	75%	80%	85%	85%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0
Persentase penyelesaian proses pemberhentian ASN	70%	75%	80%	90%	90%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0
Persentase penyusunan Buku Kepegawaian Dalam Angka (BKDA)	80%	81%	85%	90%	90%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0
Persentase terpenuhinya formasi ASN melalui pengadaan ASN	70%	75%	80%	90%	90%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0
[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									
Persentase pelaksanaan kegiatan seleksi jabatan pimpinan tinggi	75%	80%	85%	90%	90%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	729.658.736,00	823.808.277,00	885.985.791,00
[PROGRAM] PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									

Indikator Tujuan, Sasaran dan Program	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Perangkat Daerah	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0%	95%	95%	95%	97%	Kecamatan Seberang Ulu Dua	70.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Ilir Barat Dua	46.200.000,00	46.200.000,00	46.200.000,00
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0%	75%	80%	85%	85%	Kecamatan Bukit Kecil	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Kemuning	5.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0%	95%	95%	95%	97%	Kecamatan Alang-Alang Lebar	70.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0%	90%	92%	95%	95%	Kecamatan Ilir Timur Dua	1.400.000,00	4.000.000,00	7.000.000,00
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0%	90%	92%	95%	95%	Kecamatan Sukarami	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0%	96%	97%	98%	98%	Kecamatan Gandus	0	0	0
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0%	65%	70%	85%	100%	Kecamatan Kalidoni	12.556.500,00	12.556.500,00	12.556.500,00
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0%	95%	95%	95%	95%	Kecamatan Jakabaring	30.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0%	90%	90%	90%	90%	Kecamatan Plaju	10.000.000,00	11.000.000,00	12.000.000,00
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0%	95%	95%	95%	95%	Kecamatan Sematang Borang	100.000.000,00	125.000.000,00	150.000.000,00
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0%	85%	85%	85%	85%	Kecamatan Ilir Timur Satu	0	0	0
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Sako	5.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0%	75%	80%	85%	85%	Kecamatan Ilir Barat Satu	40.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0%	90%	90%	90%	90%	Kecamatan Seberang Ulu Satu	40.000.000,00	42.000.000,00	44.000.000,00
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Kertapati	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0%	95%	95%	95%	95%	Kecamatan Ilir Timur Tiga	65.000.000,00	75.000.000,00	85.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Indeks Kepuasan Masyarakat	75 Indeks	76 Indeks	77 Indeks	78 Indeks	78 Indeks	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.014.300.375,00	14.744.958.778,00	16.272.432.059,00
Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perangkat daerah	87.14 Indeks	87.5 Indeks	87.75 Indeks	88 Indeks	88 Indeks	Dinas Tenaga Kerja	15.153.506.105,00	15.632.331.755,00	16.165.700.580,00
Nilai Sakip Unit	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	Kecamatan Ilir Timur Satu	14.848.378.911,00	15.696.814.689,00	16.613.605.078,00
Nilai Sakip Unit	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	Dinas Lingkungan Hidup	36.891.690.883,00	36.891.690.883,00	36.891.690.883,00
Nilai Sakip Unit	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Badan Pendapatan Daerah	111.694.129.604,00	123.152.039.222,00	131.918.378.522,00
Nilai SAKIP Unit	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	22.767.148.394,00	25.409.978.483,00	26.319.234.301,00

Indikator Tujuan, Sasaran dan Program	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Perangkat Daerah	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026
Nilai Sakip Unit	B Nilai	B Nilai	B Nilai	BB Nilai	BB Nilai	Kecamatan Plaju	12.835.204.448,00	13.268.387.519,00	14.130.226.558,00
Nilai Sakip Unit	CC Nilai	B Nilai	B Nilai	BB Nilai	BB Nilai	Kecamatan Sukarami	23.856.584.530,00	26.435.228.408,00	28.120.429.713,00
Nilai SAKIP Unit	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	Satuan Polisi Pamong Praja	54.721.260.523,00	56.162.267.773,00	59.750.996.750,00
Nilai Sakip Unit	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	Kecamatan Bukit Kecil	11.476.681.200,00	11.595.411.598,00	12.286.163.967,00
Nilai SAKIP Unit	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Kesehatan	307.175.594.311,00	313.309.966.755,00	316.845.143.125,00
Nilai SAKIP Unit	C Nilai	B Nilai	B Nilai	BB Nilai	BB Nilai	Kecamatan Kalidoni	11.952.327.967,00	13.100.471.291,00	14.041.244.704,00
Nilai Sakip Unit	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	A Nilai	A Nilai	Sekretariat Daerah	138.032.988.165,00	152.580.515.064,00	161.358.031.735,00
Nilai SAKIP Unit	B Nilai	B Nilai	B Nilai	BB Nilai	BB Nilai	Dinas Sosial	15.540.946.044,00	15.928.644.320,00	16.891.597.493,00
Nilai SAKIP Unit	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	113.714.562.346,00	129.912.737.679,00	137.592.407.868,00
Nilai Sakip Unit	B Nilai	B Nilai	B Nilai	BB Nilai	BB Nilai	Kecamatan Seberang Ulu Satu	12.638.271.815,00	13.675.551.187,00	14.603.157.627,00
Nilai Sakip Unit	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Perindustrian	10.898.437.577,00	11.496.070.604,00	11.949.828.925,00
Nilai SAKIP Unit	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	Dinas Kebudayaan	14.713.760.925,00	16.257.990.992,00	17.330.444.120,00
Nilai SAKIP Unit	B Nilai	B Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	Dinas Tenaga Kerja	0	0	0
Nilai SAKIP Unit	CC Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	Kecamatan Kertapati	14.490.465.936,00	15.713.792.599,00	16.457.840.258,00
Nilai Sakip Unit	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	Kecamatan Ilir Barat Satu	19.903.000.000,00	21.239.400.000,00	22.154.400.000,00
Nilai SAKIP Unit	BB Nilai	BB Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	36.231.595.000,00	36.231.595.000,00	36.231.595.000,00
Nilai SAKIP Unit	BB Nilai	BB Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	0
Nilai Sakip Unit	C Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	Kecamatan Alang-Alang Lebar	14.260.104.149,00	15.524.754.930,00	16.249.040.759,00
Nilai SAKIP Unit	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13.429.446.676,00	13.715.092.654,00	14.522.348.754,00
Nilai Sakip Unit	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	Kecamatan Ilir Barat Dua	12.483.636.730,00	13.665.935.230,00	14.701.224.480,00
Nilai SAKIP Unit	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	A Nilai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.633.918.702,00	12.969.265.000,00	14.456.418.000,00
Nilai Sakip Unit	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60.671.229.890,00	60.671.229.890,00	60.671.229.890,00
Nilai SAKIP Unit	CC Nilai	CC Nilai	CC Nilai	CC Nilai	CC Nilai	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	24.468.514.820,00	26.965.866.817,00	28.105.009.925,00

Indikator Tujuan, Sasaran dan Program	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Perangkat Daerah	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026
Nilai SAKIP Unit	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	Dinas Perikanan	11.482.003.761,00	12.718.662.687,00	13.427.422.615,00
Nilai SAKIP Unit	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	27.131.638.196,00	28.557.681.129,00	29.363.279.829,00
Nilai SAKIP Unit	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	AA Nilai	Dinas Pendidikan	736.943.056.379,00	771.943.056.379,00	772.543.056.379,00
Nilai SAKIP Unit	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	99.248.571.834,00	106.163.974.121,00	110.753.545.342,00
Nilai SAKIP Unit	CC Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	Kecamatan Gandus	9.223.482.088,00	9.296.368.830,00	10.037.551.231,00
Nilai SAKIP Unit	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	28.534.316.774,00	31.237.448.298,00	32.963.151.043,00
Nilai Sakip Unit	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	13.770.865.388,00	15.441.643.760,00	16.544.484.365,00
Nilai Sakip Unit	n.a Nilai	B Nilai	B Nilai	BB Nilai	BB Nilai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11.511.714.778,00	12.074.135.141,00	12.771.973.343,00
Nilai Sakip Unit	B Nilai	B Nilai	B Nilai	BB Nilai	BB Nilai	Inspektorat	21.744.966.362,00	23.858.584.657,00	25.243.385.258,00
Nilai Sakip Unit	n.a Nilai	CC Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	Dinas Pariwisata	14.365.120.714,00	15.854.510.640,00	16.560.959.812,00
Nilai SAKIP Unit	C Nilai	B Nilai	B Nilai	BB Nilai	BB Nilai	Kecamatan Ilir Timur Dua	14.832.139.095,00	16.145.918.799,00	17.121.884.476,00
Nilai SAKIP Unit	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	Kecamatan Sematang Borang	10.812.763.328,00	11.187.324.447,00	11.466.958.334,00
Nilai SAKIP Unit	CC Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	Kecamatan Ilir Timur Tiga	15.519.190.900,00	16.874.699.996,00	17.883.480.164,00
Nilai SAKIP Unit	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	Kecamatan Kemuning	14.793.041.821,00	15.739.067.878,00	16.680.461.959,00
Nilai SAKIP Unit	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	Dinas Perhubungan	54.114.105.852,00	65.189.540.826,00	71.716.676.906,00
Nilai SAKIP Unit	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	Kecamatan Sako	12.589.872.415,00	13.192.393.239,00	14.121.081.903,00
Nilai Sakip Unit	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	13.058.664.260,00	13.171.854.260,00	13.521.679.573,00
Nilai Sakip Unit	B Nilai	B Nilai	B Nilai	BB Nilai	BB Nilai	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	49.268.682.298,00	53.721.000.000,00	57.077.568.278,00
Nilai SAKIP Unit	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	Kecamatan Jakabaring	17.687.235.749,00	18.516.214.751,00	19.431.110.658,00
Nilai Sakip Unit	C Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	Kecamatan Seberang Ulu Dua	14.421.344.715,00	15.591.310.651,00	16.546.176.085,00
Nilai Sakip Unit	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30.930.035.282,00	32.968.757.675,00	34.797.815.315,00
Nilai SAKIP Unit	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	Dinas Perdagangan	11.855.625.470,00	12.597.603.992,00	13.322.998.897,00
Nilai SAKIP Unit	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.139.281.219,00	11.507.087.235,00	12.472.625.270,00
Nilai SAKIP Unit (RSUD BARI)	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Kesehatan	138.134.245.412,00	151.200.534.675,00	161.120.628.975,00

Indikator Tujuan, Sasaran dan Program	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Perangkat Daerah	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026
Nilai SAKIP Unit (RSUD Gandus)	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	Dinas Kesehatan	14.840.084.651,00	15.899.399.437,00	16.030.852.244,00
[SASARAN] Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN									
Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	86,5 Nilai	88 Nilai	90 Nilai	92 Nilai	92 Nilai				
[PROGRAM] PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN									
Persentase Unit Kerja yang telah Mengimplementasikan SPIP pada Level Terdefinisi	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektorat	2.373.100.000,00	2.491.755.000,00	2.626.592.750,00
[PROGRAM] PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI									
Persentase Unit Kerja yang telah Mengimplementasikan SPIP pada Level Terdefinisi	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektorat	478.190.000,00	502.099.500,00	527.204.475,00
[SASARAN] Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik ke Masyarakat									
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,75 Indeks	87,75 Indeks	88,75 Indeks	90,00 Indeks	90,00 Indeks				
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,66 Indeks	2,70 Indeks	2,80 Indeks	2,90 Indeks	2,90 Indeks				
[PROGRAM] PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	60%	60%	65%	70%	70%	Satuan Polisi Pamong Praja	7.865.112.000,00	3.680.800.000,00	3.534.670.000,00
Presentase Penegakan Perda dan Perkada	65%	65%	70%	75%	75%	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	0
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3)	100%	100%	100%	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	0
[PROGRAM] PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA									
Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	80%	90%	100%	100%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN									
Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	80%	90%	100%	100%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10.750.000.000,00	13.476.507.813,00	14.000.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK									
Terlaksananya Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	416.456.010,00	463.108.611,00	513.411.771,00
[PROGRAM] PROGRAM PENCATATAN SIPIL									
Terlaksananya Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	239.898.150,00	263.887.965,00	290.276.761,00
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN									
Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	627.470.452,00	690.217.497,00	759.239.246,00

Indikator Tujuan, Sasaran dan Program	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Perangkat Daerah	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN									
Terselenggaranya Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	71.797.000,00	78.976.700,00	86.874.370,00
[PROGRAM] PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT									
Persentase PKK Aktip	95%	96%	97%	98%	98%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	185.000.000,00	194.250.000,00	203.962.500,00
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK									
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pengelolaan opini dan pelayanan informasi publik	80 Indeks	80.5 Indeks	81 Indeks	81.5 Indeks	81.5 Indeks	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.363.826.452,00	9.281.576.090,00	8.593.671.700,00
Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	82.5 Indeks	82.7 Indeks	82.9 Indeks	83.2 Indeks	83.2 Indeks	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	0
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA									
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Keamanan dan Teknologi Informasi serta Penyelenggaraan Statistik Daerah	90 Indeks	91 Indeks	92 Indeks	93 Indeks	93 Indeks	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.416.535.318,00	4.072.921.965,00	4.801.450.454,00
Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	2.66 Indeks	2.70 Indeks	2.74 Indeks	2.78 Indeks	2.78 Indeks	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	0
[PROGRAM] PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL									
Persentase Penerapan Satu Data	0%	20%	40%	60%	60%	Dinas Komunikasi dan Informatika	200.000.000,00	262.075.000,00	287.235.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI									
Indeks Keamanan Informasi (KAMI) V.4.2	372 Indeks	329 Indeks	331 Indeks	333 Indeks	333 Indeks	Dinas Komunikasi dan Informatika	200.824.000,00	310.824.000,00	367.004.500,00
[PROGRAM] PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									
Persentase Cakupan Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah	31.901.310.751,00	35.263.443.111,00	37.292.047.219,00
[PROGRAM] PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD									
Tingkat Persentase Fasilitasi Peningkatan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	18,39%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	42.227.700.000,00	46.869.450.000,00	51.083.450.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Indeks	85 Indeks	85 Indeks	85 Indeks	85 Indeks	Kecamatan Ilir Timur Satu	300.000.000,00	350.000.000,00	400.000.000,00
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	12 Indeks	12 Indeks	12 Indeks	12 Indeks	12 Indeks	Kecamatan Ilir Barat Dua	207.500.000,00	207.500.000,00	207.500.000,00
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,33 Indeks	90 Indeks	90 Indeks	90 Indeks	90 Indeks	Kecamatan Seberang Ulu Dua	179.187.720,00	179.187.720,00	179.187.720,00
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	98,71 Indeks	95 Indeks	96 Indeks	97 Indeks	97 Indeks	Kecamatan Sukarami	325.000.000,00	348.000.000,00	380.000.000,00

Indikator Tujuan, Sasaran dan Program	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Perangkat Daerah	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.67 Indeks	85 Indeks	85 Indeks	88 Indeks	90 Indeks	Kecamatan Kemuning	530.000.000,00	708.000.000,00	785.000.000,00
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92.5 Indeks	95 Indeks	95 Indeks	97 Indeks	97 Indeks	Kecamatan Alang-Alang Lebar	436.060.130,00	479.666.143,00	527.632.757,00
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94 Indeks	94 Indeks	94 Indeks	95 Indeks	95 Indeks	Kecamatan Kertapati	117.800.000,00	117.800.000,00	117.800.000,00
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91 Indeks	12 Indeks	12 Indeks	12 Indeks	12 Indeks	Kecamatan Sako	143.920.500,00	146.102.550,00	207.500.000,00
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.55 Indeks	90.60 Indeks	90.70 Indeks	90.80 Indeks	91 Indeks	Kecamatan Seberang Ulu Satu	213.007.300,00	234.308.030,00	246.023.432,00
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	97.47 Indeks	95 Indeks	95 Indeks	95 Indeks	95 Indeks	Kecamatan Sematang Borang	220.000.000,00	250.000.000,00	300.000.000,00
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.75 Indeks	96 Indeks	97 Indeks	98 Indeks	98 Indeks	Kecamatan Gandus	65.000.000,00	65.000.000,00	70.000.000,00
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89.5 Indeks	80 Indeks	92 Indeks	94 Indeks	96 Indeks	Kecamatan Ilir Timur Dua	148.600.000,00	182.500.000,00	195.500.000,00
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0 Indeks	90 Indeks	92 Indeks	92 Indeks	92 Indeks	Kecamatan Jakabaring	302.156.800,00	332.372.480,00	365.609.728,00
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.34 Indeks	90 Indeks	90 Indeks	90 Indeks	100 Indeks	Kecamatan Kalidoni	103.075.000,00	103.075.000,00	103.075.000,00
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94 Indeks	90 Indeks	92 Indeks	92 Indeks	92 Indeks	Kecamatan Ilir Timur Tiga	220.000.000,00	249.426.918,00	292.356.589,00
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Indeks	85 Indeks	85 Indeks	85 Indeks	85 Indeks	Kecamatan Bukit Kecil	150.000.000,00	150.000.000,00	165.000.000,00
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Indeks	90 Indeks	90.10 Indeks	90.20 Indeks	90.20 Indeks	Kecamatan Plaju	190.969.243,00	211.701.175,00	226.871.293,00
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Indeks	85 Indeks	85 Indeks	85 Indeks	85 Indeks	Kecamatan Ilir Barat Satu	240.000.000,00	250.000.000,00	280.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
Persentase Peningkatan Peran Serata Masyarakat Desa Dan Kelurahan	85%	85%	85%	85%	85%	Kecamatan Ilir Timur Satu	4.451.067.500,00	4.550.278.175,00	4.768.379.093,00
Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat Desa dan Kelurahan	90%	90%	92%	95%	95%	Kecamatan Ilir Timur Dua	2.954.400.000,00	2.989.000.000,00	3.103.000.000,00
Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat Desa dan Kelurahan	0%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Sako	3.542.836.177,00	3.820.299.800,00	3.816.000.000,00
Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat Desa dan Kelurahan	81,49%	90%	90%	90%	90%	Kecamatan Seberang Ulu Satu	2.728.173.600,00	2.811.690.960,00	2.835.560.056,00
Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat Desa dan Kelurahan	0%	75%	80%	85%	85%	Kecamatan Ilir Barat Satu	3.662.747.573,00	3.885.485.315,00	4.385.981.945,00
Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat Desa dan Kelurahan	98,60%	90%	95%	97%	97%	Kecamatan Alang-Alang Lebar	3.380.324.120,00	3.806.356.532,00	4.186.992.185,00
Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat Desa dan Kelurahan	99,84%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Kalidoni	3.138.610.000,00	3.137.462.500,00	3.137.462.500,00
Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat Desa dan Kelurahan	92,58%	96%	97%	97%	97%	Kecamatan Gandus	3.609.600.000,00	3.609.600.000,00	3.609.600.000,00
Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	90%	90%	90%	90%	Kecamatan Ilir Barat Dua	4.003.619.000,00	4.003.619.000,00	4.003.619.000,00
Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat Desa dan Kelurahan	95%	90%	92%	95%	95%	Kecamatan Sukarami	5.312.000.000,00	5.425.000.000,00	5.541.000.000,00
Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat Desa dan Kelurahan	98,60%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Kertapati	2.314.200.000,00	2.314.200.000,00	2.614.200.000,00

Indikator Tujuan, Sasaran dan Program	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Perangkat Daerah	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026
Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	95%	95%	95%	95%	Kecamatan Sematang Borang	1.998.498.300,00	2.004.200.000,00	2.412.200.000,00
Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat Desa dan Kelurahan	0%	94%	94%	94%	94%	Kecamatan Jakabaring	2.566.577.147,00	2.823.234.862,00	3.105.558.348,00
Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat Desa dan Kelurahan	95%	95%	95%	95%	95%	Kecamatan Seberang Ulu Dua	4.144.183.950,00	4.144.183.950,00	4.348.183.950,00
Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat Desa dan Kelurahan	0%	75%	80%	85%	85%	Kecamatan Bukit Kecil	1.596.077.562,00	1.596.077.562,00	1.663.000.000,00
Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat Desa dan Kelurahan	0%	90%	90%	90%	90%	Kecamatan Plaju	2.953.286.385,00	2.998.615.024,00	3.068.476.527,00
Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	87,34%	90%	92%	93%	93%	Kecamatan Ilir Timur Tiga	2.865.000.000,00	2.955.000.000,00	3.045.000.000,00
Persentase peran serta masyarakat desa dan kelurahan	95%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Kemuning	1.340.000.000,00	1.390.000.000,00	1.400.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Sako	7.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00
Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	0%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Kemuning	10.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00
Persentase Peningkatan Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan	0%	90%	92%	93%	93%	Kecamatan Ilir Timur Tiga	30.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00
Persentase Peningkatan Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan	0%	65%	0%	0%	100%	Kecamatan Kalidoni	58.800.000,00	0	0
Persentase Peningkatan Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan	0%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Ilir Barat Dua	73.290.000,00	73.290.000,00	73.290.000,00
Persentase Peningkatan Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan	0%	90%	92%	95%	95%	Kecamatan Sukarami	120.000.000,00	120.000.000,00	150.000.000,00
Persentase Peningkatan Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan	0%	90%	90%	90%	90%	Kecamatan Gandus	0	0	0
Persentase Peningkatan Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan	0%	95%	95%	95%	95%	Kecamatan Jakabaring	15.000.000,00	25.000.000,00	35.000.000,00
Persentase Peningkatan Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan	0%	90%	92%	95%	95%	Kecamatan Ilir Timur Dua	2.800.000,00	8.000.000,00	14.000.000,00
Persentase Peningkatan Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan	0%	75%	80%	85%	85%	Kecamatan Bukit Kecil	30.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
Persentase Peningkatan Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan	0%	95%	95%	95%	97%	Kecamatan Alang-Alang Lebar	100.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00
Persentase Peningkatan Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan	0%	85%	85%	85%	85%	Kecamatan Ilir Timur Satu	0	0	0
Persentase Peningkatan Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan	0%	90%	90%	90%	100%	Kecamatan Plaju	20.000.000,00	22.000.000,00	24.000.000,00
Persentase Peningkatan Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan	0%	75%	80%	85%	85%	Kecamatan Ilir Barat Satu	40.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00
Persentase Peningkatan Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan	0%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Kertapati	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Persentase Peningkatan Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan	0%	95%	95%	95%	97%	Kecamatan Seberang Ulu Dua	100.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00
Persentase Peningkatan Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan	0%	90%	90%	90%	100%	Kecamatan Seberang Ulu Satu	80.000.000,00	84.000.000,00	88.000.000,00

Indikator Tujuan, Sasaran dan Program	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Perangkat Daerah	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026
Persentase Peningkatan Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan	0%	95%	95%	95%	95%	Kecamatan Sematang Borang	100.000.000,00	125.000.000,00	150.000.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN									
Persentase Pembinaan pada Masyarakat terkait Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	0%	10%	12%	15%	15%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.919.244.504,00	2.781.004.000,00	3.275.312.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK									
Tingkat Partisipasi Partai Politik (Parpol) dan Lembaga Pendidikan dalam Pendidikan Politik	0%	75%	80%	85%	85%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	119.408.947.208,00	9.399.558.300,00	8.056.263.500,00
[PROGRAM] PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN									
Tingkat Ormas yang Partisipatif	0%	40%	42%	44%	44%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	164.607.500,00	282.550.000,00	581.900.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									
Persentase Pembinaan Terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	0%	12,50%	18,75%	25%	25%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	205.763.500,00	286.502.500,00	710.706.000,00
[PROGRAM] PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL									
Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kewaspadaan Daerah dan Penanganan Konflik Sosial	0%	20%	22%	24%	24%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.935.982.560,00	2.797.811.172,00	3.514.074.500,00
[SASARAN] Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah									
Indeks Inovasi Daerah (IID)	Inovatif Kategori	Inovatif Kategori	Inovatif Kategori	Sangat Inovatif Kategori	Sangat Inovatif Kategori				
[PROGRAM] PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH									
Jumlah Inovasi Daerah	160 Inovasi	165 Inovasi	170 Inovasi	175 Inovasi	175 Inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	0	0	0
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	3.873.500.000,00	5.091.800.000,00	5.164.000.000,00

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Kota Palembang Tahun 2024-2026

Dari semua pembahasan mengenai tujuan, sasaran, program prioritas dan isu yang ada di Kota Palembang saat ini, maka didapatkan susunan Rencana Program/ Kegiatan Kelitbangan Daerah tahun 2024-2029, sebagai dasar yang mengakomodir berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam satu konsep rencana kelitbangan secara komprehensif dan sinergis.

Tabel 3.9 Rencana Program/ Kegiatan Kelitbangan Daerah untuk tahun pelaksanaa 2024-2029

Program/ Kegiatan Kelitbangan Daerah			
Kegiatan Kajian	Indikator Capaian kegiatan	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
Penataan Lingkungan			
Kajian Pengembangan Ruang Terbuka Kota Palembang pada Ruas Jalan, Perumahan, dan Tepian Sungai	Dok. Rancangan Pemodelan		Dinas PUPR
Kajian Kebutuhan dan Kemampuan Penduduk sebagai Dasar Pengembangan Permukiman dan Perumahan di Kota Palembang	Dok. Rekomendasi		Dinas Perkimtan
Kajian Penyediaan Rusun Sosial dengan Kemensos	Dok. Rekomendasi		Dinas Perkimtan, Dinas Sosial
Kajian Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman	Dok. Rekomendasi	Dinas Perkimtan,	Dinas Perkimtan,
Kajian Capaian dan Efektivitas Penanganan Permukiman Kumuh Kota Palembang	Dok. Rekomendasi	Dinas Perkimtan,	Dinas Perkimtan,
Kajian Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah dengan Teknologi Ramah Lingkungan di Kota Palembang	Dok. Rancangan Pemodelan	Dinas LH	Dinas Perkimtan, Dinas LH
Kajian Pengembangan Sanitasi Lingkungan untuk Permukiman Tepian Sungai di Kota Palembang	Dok. Rancangan Pemodelan	Dinas Perkimtan	Dinas LH dan Dinas Perkimtan
Kajian Pengembangan Permukiman Tepian Sungai sebagai Potensi Ekonomi, Wisata, dan Budaya di Kota Palembang: Analisis Potensial dan Strategi Pengembangan	Dok. Rancangan Pemodelan	Dinas Pariwisata	Disperkimtan, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata
Kajian Pemenuhan Kebutuhan Ruang Terbuka Kota di Palembang: Analisis Kendala dan Potensi	Dok. Rekomendasi	Dinas PUPR	Disperkimtan, Dinas PUPR, Bappeda Litbang
Kajian Pengembangan Sanitasi Permukiman Tepian Sungai dan Dampaknya terhadap Pencemaran Air Sungai di Kota Palembang	Dok. Rancangan Pemodelan	Dinas Kesehatan	Disperkimtan, Dinas PUPR, Dinkes, Dinas LHK
Kajian Polutan Udara di Kota Palembang: Penyebab, Dampak, dan Strategi Pengurangan Pencemaran	Dok. Rekomendasi	Dinas LHK	Dinkes, Dinas LHK
Pemantauan Kualitas Air Sungai di Kota Palembang: Identifikasi Parameter dan Evaluasi Perubahan Tren	Dok. Rekomendasi	Dinas LHK	Dinkes, Dinas LHK
Kendala Sengketa Lahan, Perizinan, dan Batas Lahan dalam Pembangunan Kota Palembang: Tinjauan Evaluasi dan Strategi Solusi	Dok. Rekomendasi	Dinas PMPTSP	Dinas PMPTSP, Disperkimtan

Program/ Kegiatan Kelitbangan Daerah			
Kegiatan Kajian	Indikator Capaian kegiatan	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
Pengembangan Pendataan UMKM dalam Wadah Organisasi Terorganisir: Pendukung Proyek yang Siap Jual bagi Investor di Kota Palembang	Dok. Rancangan Pemodelan	Dinas PMPTSP	Dinas PMPTSP, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UKM
Pengaruh Jaringan Jalan Tol terhadap Integrasi Ekonomi Kota-Kota Terkait: Perspektif dan Tantangan: Studi Kasus Kota Palembang	Dok. Rekomendasi	Bapenda	Dishub, Bapenda
Manajemen Banjir dan Drainase			
Identifikasi Teknologi dan Strategi Pengelolaan Banjir pada Kota Palembang	Dok. Rekomendasi	Dinas PKP	Dinas PKP, Dinkominfo
Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Memetakan Data Drainase, Titik Rawan Banjir, dan Infrastruktur Drainase	Dok. Rancangan Pemodelan	Dinas PUPR	Dinas PUPR, Dinas PKP, Dinkominfo
Evaluasi Efektivitas Program Penanganan Banjir dan Genangan di Kota Palembang (Pemeliharaan Rutin Pompa Kolam Retensi)	Dok. Rekomendasi	Dinas PUPR	Dinas PUPR, Dinas PKP
Penilaian Kebutuhan Normalisasi Sungai di Kota Palembang	Dok. Rekomendasi	Dinas PUPR	Dinas PUPR
Pengendalian Daya Rusak Air (Pembangunan Kanal pada Ruas Jalan Baru Ditingkatkan Seperti Sukarno-Hatta, Perkuatan Tebing Sungai Musi, Pembangunan Kolam Retensi dan Pengendalian Banjir Luapan Sungai)	Dok. Rekomendasi	Dinas PUPR	Dinas PUPR
Prospek Implementasi Aplikasi Berbasis CCTV dan TIK dalam Sistem Manajemen Pengendalian Lingkungan di Kota Palembang	Dok. Rancangan Pemodelan	Dinas LH	Dinas LH, Dinkominfo
Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Mitigasi Pencegahan Banjir dan Penanggulangan Titik Rawan di Kota Palembang	Uji coba model	Dinas PKP	Dinas PKP, Dinkominfo
Transportasi Terpadu dan Berbasis Teknologi			
Kajian Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Antarmoda dan Intermoda Berbasis TIK	Dok. Rancangan Pemodelan		Dishub, Dinkominfo
Kajian Penerapan Jaringan Transportasi Antar Moda untuk Menunjang Transportasi Terpadu dengan LRT sebagai Penghubung Utama	Uji coba model		Dishub
Peningkatan Jaringan Jalan dan Jembatan			
Kajian Pengembangan Jaringan dan Peningkatan Kualitas Jalan di Kota Palembang	Dok. Rancangan Pemodelan	Dinas PUPR	Dinas PUPR dan Dishub
Kajian Preservasi Jalan Nasional yang Melintasi Provinsi Sumatera Selatan	Dok. Rancangan pemodelan	Dinas PUPR	Dinas PUPR, Dishub
Kajian Pembangunan Fly Over pada Simpang Strategis sebagai Pemecah Kemacetan	Dok. Rancangan Pemodelan	Dinas PUPR	Dinas PUPR, Dishub
Potensi Pengembangan Kantong Parkir di Deretan Pertokoan: Studi Kasus Jalan Jenderal Sudirman Palembang	Dok. Rancangan Pemodelan	Dishub	Dinas PUPR, Dishub
Kajian Kebutuhan dan Kenyamanan Pejalan Kaki untuk Penataan Pedestrian di Kota Palembang	Dok. Rekomendasi	Dinas PUPR	Dinas PUPR, Dishub

Program/ Kegiatan Kelitbangan Daerah			
Kegiatan Kajian	Indikator Capaian kegiatan	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
Penerapan Teknologi dalam Penanggulangan Bencana di Kota Palembang: Tantangan dan Prospek	Uji coba model	Dinas PKK	Dinas PKK, Dinkominfo
Kajian Pemanfaatan Sistem Peringatan Dini Berbasis Teknologi untuk Penanggulangan Banjir di Kota Palembang	Dok. Rekomendasi	Dinas PKK	Dinas PKK, Dinkominfo
Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya			
Studi Kebijakan dan Praktik Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Masyarakat di Kota Palembang	Dok. Rekomendasi	DPPA	DPPA
Pengembangan Program Gotong Royong dan Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan di Kota Palembang	Dok. Rancangan Pemodelan	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan			
Kajian Pemenuhan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kota Palembang	Dok. Rekomendasi	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan, Dinas PUPR
Kajian Pemenuhan dan Pengembangan Fasilitas Kesehatan di Kota Palembang	Dok. Rekomendasi	Dinkes	Dinkes, Dinas PUPR
Kajian Pelayanan Intervensi Gizi Spesifik dan Gizi Sensitif Dalam Pencegahan Stunting di Kota Palembang	Dok. Rekomendasi	Dinkes	Dinkes
Kajian Pengembangan Manajemen Rumah Singgah di Kota Palembang	Dok. Rancangan Pemodelan	DPPA	DPPA, Dinkes
Sumber Daya Manusia			
Analisis Kualitas Pendidikan dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia di Kota Palembang	Dok. Rekomendasi	Dinas Pendidikan	Disnaker, Dinas Pendidikan, Disdukcapil
Evaluasi Program Keterampilan dan Pelatihan Berbasis Digital Dalam Meningkatkan Keterampilan Sumber Daya Manusia di Kota Palembang	Dok. Rekomendasi	Disnaker	Disnaker, Dinas Pendidikan, Disdukcapil, Dinkominfo
Evaluasi Ketersediaan Tenaga Kerja Terampil dan Kualifikasi Dalam Mendukung Pembangunan Kota Palembang"	Dok. Rekomendasi	Disnaker	Disnaker, Dinas Pendidikan, Disdukcapil
Studi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Sektor Industri dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang	Dok. Rancangan Pemodelan	Dinas Koperasi dan UKM,	Dinas Koperasi dan UKM, Disdukcapil, Dinkominfo
Penyusunan Rencana Strategis Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Kota Palembang	Dok. Rancangan Pemodelan	Disnaker	Disnaker, Dinas Pendidikan, Disdukcapil
Kajian Kebutuhan, Pengembangan, dan Revitalisasi Bangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Milik Pemerintah	Dok. Rekomendasi	DispORA	DispORA, Dinas PUPR, BPKAD
Optimalisasi Upaya Penanggulangan Stunting: Kajian dalam Konteks Kota Palembang	Dok. Rekomendasi	Dinkes	Dinkes, DPPA
Evaluasi Efektivitas Perbaikan Layanan Pelayanan Kesehatan: Studi Kasus Aduan dan Rencana	Dok. Rekomendasi	Dinkes	Dinkes, Dinkominfo

Program/ Kegiatan Kelitbangan Daerah			
Kegiatan Kajian	Indikator Capaian kegiatan	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
Perbaikan			
Analisis Kebutuhan dan Tantangan Penyediaan Tempat Penitipan Anak di Kota Palembang	Dok. Rekomendasi	DPPA	DPPA
Inovasi dan Kreativitas dalam Pengembangan Olahraga: Menyongsong Prestasi dan Partisipasi di Kota Palembang	Dok. Rekomendasi	Dispora	Dispora
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
Strategi Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Branding untuk Kota Palembang	Dok. Penerapan program	Dinas Perdagangan	Dinpar, Bappeda Litbang, Dinas Perdagangan
Pengembangan Destinasi Pariwisata Tepian Sungai di Kota Palembang	Dok. Rancangan Pemodelan	Dinpar	Dinpar, Dinas PUPR, Bappeda Litbang, Dinas Kebudayaan
Pengembangan Sarana dan Prasarana Serta Sistem Transportasi Wisata Sungai Kota Palembang	Dok. Rancangan Pemodelan	Dishub	Dinpar, Dishub
Penerapan Sarana dan Prasarana Pengembangan Jalur Pariwisata di Sepanjang Tepian Sungai Musi Palembang	Uji coba model	Dinpar	Dinpar, Dishub, Bappeda Litbang
Penerapan Infrastruktur dan Layanan Digital untuk Dukungan Ekonomi Kreatif di Kota Palembang	Uji coba model	Dinkominfo	Dinas Koperasi dan UKM, Dinkominfo
Penerapan Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dalam Wisata Budaya di Kota Palembang	Uji coba model	Dinpar	Dinpar, Dinas Koperasi dan UKM
Pengembangan Ekonomi Kerakyatan			
Penerapan Budidaya Perikanan Kota Palembang Berbasis Masyarakat (Kelompok dan Individu)	Uji coba model	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan, Dinas Koperasi dan UKM
Potensi Ekonomi dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang	Dok. Rekomendasi	Dinas Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM, Dinkominfo
Konsep Revitalisasi Pasar 16 Ilir: Sistem pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima	Dok. Rancangan Pemodelan	Dinas Perdagangan	Dinas PUPR, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan, Satuan Pol PP
Pembaruan dan Pengembangan Bangunan Pasar Tradisional melalui Konsep Bangunan Pasar Modern: Kajian di Kota Palembang	Dok. Rancangan Pemodelan	Dinas Perdagangan	Dinas PUPR, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan
Analisis Pengembangan Sistem Pengelolaan Retribusi Pasar pada Kota Palembang	Dok. Rancangan Pemodelan	Dinas Perdagangan	Dinas PUPR, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan
Analisis Kerentanan Pangan dan Upaya Penyediaan Pangan yang Aman di Kota Palembang	Dok. Rekomendasi	DKPP	DKPP, Dinas Perikanan
Kajian Penerapan Aturan dan Pengelolaan Alih Fungsi Lahan Pertanian: Dampak dan Tantangan dalam Bidang Peternakan dan Perikanan, serta Aturan RTH di Kota Palembang	Dok. Rancangan Pemodelan	DKPP	DKPP, Dinas Perikanan, Disperkimtan
Pengembangan dan Penerapan Pertanian Digital sebagai Wadah Pengembangan Potensi Penjualan dan	Uji coba model	DKPP	DKPP

Program/ Kegiatan Kelitbangan Daerah			
Kegiatan Kajian	Indikator Capaian kegiatan	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
Pengembangan/Inovasi Produk			
Tata Kelola Pemerintahan			
Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Program Integritas ASN dan Pelayanan Publik Pemerintah	Uji coba model	BKPSDM,	BKPSDM, Dinkominfo
Penerapan Sistem <i>Smart Governance</i> dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Masyarakat	Uji coba model	BPKSDM	Dinkominfo, BPKSDM
Penerapan Pendataan Penduduk dan Manajemen Catatan Sipil Berbasis TIK	Uji coba model	Disdukcapil	Disdukcapil, Dinkominfo
Analisis Interaksi Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Konteks Kota Palembang	Dok. Rekomendasi	Badan Kesbangpol	Badan Kesbangpol

Keterangan:

Didukcapil	: Dinas kependudukan dan catatan sipil
Dinas Perkimtan	: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Dinas PUPR	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas PPPA	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Dispora	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Dinas PMPTSP	: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinkominfo	: Dinas Komunikasi dan Informatika
DinKes	: Dinas Kesehatan
Dishub	: Dinas Perhubungan
Dinas PRKP	: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Dinpar	: Dinas Pariwisata
Dinas LHK	: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Dinkes	: Dinas Kesehatan
Dinpar	: Dinas Pariwisata
Disnaker	: Dinas Ketenagakerjaan
Dinas PKP	: Pemadam kebakaran dan Penyelamatan
Dinas LH	: Dinas lingkungan Hidup
Dishub	: Dinas perhubungan
Disbud	: Dinas Kebudayaan
Dinsos	: Dinas Sosial
DPPKB	: Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dispusip	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
DKPP	: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Dinas Perikanan	
Dinas perindustrian	
Bappeda Litbang	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
BPKAD	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Bapenda	: Badan Pendapatan Daerah
BPKSDM	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Badan Kesbangpol	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber : Analisis, 2023

BAB IV

STRATEGI PELAKSANAAN



BAB IV. STRATEGI PELAKSANAAN

4.1. Kelembagaan

Kelembagaan dimaksudkan guna menjamin keberlangsungan pelaksanaan berbagai agenda rencana induk kelitbangan. Untuk itu, kegiatan kelitbangan diupayakan juga dapat menjangkau serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara bersama-sama menyelesaikan permasalahan dan berbagai isu pembangunan kota Palembang. Tuntutan strategi pelaksanaan mulai dengan berkoordinasi, keterlibatan instusi, dan kerjasama dalam bersinergi guna pelaksanaan berbagai agenda kelitbangan Kota Palembang

4.1.1. Koordinasi Pelaksanaan

Pelaksanaan kelitbangan Kota Palembang memerlukan kerja lintas fungsi di internal pemerintah. Kerja lintas fungsi tersebut dilakukan melalui peningkatan pemahaman terhadap berbagai pemecahan permasalahan perkotaan hingga tuntas dan mencapai tergetnya. Koordinasi lintas fungsi mengalirkan komunikasi antar perangkat daerah dalam menyelesaikan berbagai tugas yang merealisasikan target kinerja pemerintahan. Dalam koordinasi antar lembaga dengan Badan Kelitbangan sebagai fasilitator, strategi pelaksanaan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Forum Koordinasi: Badan Kelitbangan dapat memfasilitasi pembentukan forum koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pengembangan dan implementasi kebijakan. Forum ini bertujuan untuk memfasilitasi dialog, pertukaran informasi, dan kolaborasi antar lembaga dalam mencapai tujuan kelitbangan Kota Palembang. Forum koordinasi ini dapat melibatkan perwakilan dari berbagai instansi pemerintah, lembaga penelitian, sektor swasta, dan masyarakat.
2. Penyusunan Rencana Kerja Bersama: Badan Kelitbangan dapat memfasilitasi penyusunan rencana kerja bersama antara lembaga-lembaga terkait untuk mengarahkan upaya kolaboratif dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan. Rencana kerja bersama ini mencakup prioritas, target, dan kegiatan yang akan dilakukan secara sinergis untuk mencapai hasil yang diharapkan.

3. **Pertukaran Informasi dan Data:** Badan Kelitbangan dapat berperan dalam memfasilitasi pertukaran informasi dan data antar lembaga untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Hal ini meliputi sharing data, hasil penelitian, informasi tentang program dan proyek yang sedang dilaksanakan, serta pengalaman dan pembelajaran dari kegiatan yang telah dilakukan. Pertukaran informasi yang terbuka dan transparan akan memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar lembaga.
4. **Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan:** Badan Kelitbangan dapat menjadi koordinator dalam pelaksanaan kegiatan yang melibatkan berbagai lembaga. Hal ini mencakup pemetaan tugas dan tanggung jawab, jadwal pelaksanaan, alokasi sumber daya, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Koordinasi yang baik akan membantu menghindari tumpang tindih dan memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program dan proyek.
5. **Mendorong Kolaborasi dan Sinergi:** Badan Kelitbangan dapat mendorong terciptanya kolaborasi dan sinergi antar lembaga melalui penyelenggaraan pertemuan, workshop, atau kegiatan lain yang bertujuan untuk membangun hubungan kerjasama yang kuat. Hal ini melibatkan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas, pemanfaatan keahlian dan sumber daya yang ada, serta kerjasama dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

4.1.2 Keterlibatan Institusi Kelitbangan

Bidang Litbang pada Pemerintah Kota Palembang yang merupakan struktur perangkat kelitbangan dengan memiliki peran aktif keterlibatan pada institusi litbang lainnya. Keterlibatan tersebut menjadi salah satu upaya guna menambahkan kehandalan pelaksanaan kegiatan kelitbangan yang diagendakan. Untuk itu, keterlibatan institusi kelitbangan lainnya di dalam ataupun di luar kota Palembang. Fokusnya untuk meningkatkan sinergitas dan pemanfaatan aset pengetahuan dalam penyelesaian berbagai isu dan permasalahan utama yang menjadi fokus kelitbangan.

Tentunya keterlibatan institusi kelitbangan dalam wilayah Kota Palembang mensinergikan kepemilikan pengetahuan. Sumber pengetahuan tersebut menjadi landasan dasar dalam menuntaskan berbagai kerangka pengambilan kebijakan guna

mendukung upaya mempercepat penuntasan kinerja pemerintah. Akselerasi tersebut diupayakan dalam berbagai bentuk ide dan konsep yang disajikan guna merespon kinerja pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, sinergitas perekonomian wilayah dengan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor penggerak roda perekonomian yang didukung dengan pengembangan ekonomi kreatif serta penguatan ekosistem inovasi daerah pada kota Palembang.

4.1.3 Kerjasama dan Sinergi Pelaksanaan

Berbagai agenda kegiatan yang tercipta tentunya memerlukan sumberdaya yang cukup untuk melaksanakannya. Untuk itu, dibutuhkan dukungan keterlibatan serta kerjasama dengan berbagai pihak guna menuntaskannya. Tuntutan saling berkolaborasi serta berkoordinasi lintas sektor pada penyelenggaraan pemerintah dan pemangku kepentingan menjadi strategi yang dimanfaatkan pada rencana induk kelitbangan. Dalam konteks kerjasama kelitbangan, melibatkan lembaga litbang di luar pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan keterlibatan masyarakat dapat menjadi strategi yang efektif. Berikut adalah beberapa kaitan yang dapat terjalin dalam kerjasama tersebut.

Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi: Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menghasilkan pengetahuan dan inovasi. Institusi kelitbangan dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi di Kota Palembang atau di luar daerah untuk mengembangkan program penelitian dan pengembangan yang berfokus pada isu-isu strategis yang relevan dengan pembangunan Kota Palembang. Kerjasama ini dapat berupa:

1. **Pemanfaatan Sumber Daya Lokal:** Perguruan tinggi setempat memiliki keunggulan dalam memahami kondisi dan potensi lokal Kota Palembang. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang lingkungan, budaya, sejarah, dan tantangan pembangunan yang khusus untuk wilayah tersebut. Dengan demikian, kerjasama dengan perguruan tinggi setempat memungkinkan pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dalam penelitian dan pengembangan.
2. **Keterlibatan Mahasiswa:** Mahasiswa merupakan aset berharga dalam kerjasama kelitbangan. Perguruan tinggi setempat dapat melibatkan mahasiswa dalam proyek-

proyek penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan isu-isu pembangunan Kota Palembang. Melalui penugasan, magang, atau program pengabdian masyarakat, mahasiswa dapat berkontribusi secara langsung dalam mengumpulkan data, melakukan analisis, dan memberikan rekomendasi yang relevan.

3. Kegiatan Penelitian Terapan: Perguruan tinggi setempat dapat melaksanakan penelitian terapan yang berkaitan dengan pembangunan Kota Palembang. Hal ini melibatkan penggunaan metode penelitian yang sesuai dan menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu pembangunan, solusi yang inovatif, dan praktik terbaik dalam konteks lokal. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menginformasikan kebijakan dan pengambilan keputusan di tingkat pemerintah.
4. Kolaborasi dalam Proyek Inovasi dan Pengembangan: Perguruan tinggi setempat dapat menjadi mitra dalam proyek inovasi dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memajukan sektor ekonomi kreatif di Kota Palembang. Kolaborasi ini dapat mencakup pengembangan produk dan layanan baru, penggunaan teknologi terkini, atau pengembangan model bisnis yang berkelanjutan.
5. Pertukaran Pengetahuan dan Pengalaman: Kerjasama dengan perguruan tinggi setempat memungkinkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara praktisi kelitbangan, dosen, dan peneliti. Diskusi, seminar, atau lokakarya bersama dapat diadakan untuk membahas isu-isu pembangunan, berbagi temuan penelitian, dan mengidentifikasi peluang kolaborasi lebih lanjut.

Kerjasama dengan Lembaga Litbang Eksternal: Institusi kelitbangan dapat menjalin kerjasama dengan lembaga litbang eksternal seperti lembaga penelitian nasional atau internasional, think tank, atau lembaga riset swasta. Kerjasama semacam ini memungkinkan pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman dalam melakukan penelitian dan pengembangan yang relevan dengan pembangunan Kota Palembang. Lembaga litbang eksternal dapat memberikan perspektif, keahlian, dan sumber daya tambahan untuk menguatkan upaya kelitbangan dalam perencanaan dan pengembangan.

Keterlibatan Masyarakat dalam Penelitian dan Pengembangan: Institusi kelitbangan dapat melibatkan masyarakat dalam proses penelitian dan pengembangan. Ini dapat dilakukan melalui partisipasi dalam survei, wawancara, kelompok diskusi, atau kegiatan partisipatif lainnya. Melibatkan masyarakat dalam penelitian dan pengembangan akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan, aspirasi, dan harapan masyarakat terkait dengan pembangunan Kota Palembang. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga dapat meningkatkan penerimaan dan dukungan terhadap hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan.

Dengan melibatkan lembaga litbang eksternal, perguruan tinggi, dan keterlibatan masyarakat, institusi kelitbangan dapat mengakses sumber daya tambahan, keahlian, dan perspektif yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Kerjasama ini juga memperluas jaringan kolaborasi institusi kelitbangan dan meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan.

4.2 Evaluasi Pelaksanaan

Menjamin kualitas penyelenggaraan kelitbangan pada setiap agenda yang disusun dalam Rencana induk diselenggarakan evaluasi pada tiap kegiatan. Untuk itu, agenda kelitbangan dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan kemanfaatannya, dilakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan, meliputi:

- a. Evaluasi paruh waktu, dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan. Evaluasi ini diperlukan dalam rangka reviu kesesuaian indikasi program kelitbangan yang terakomodir dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan lingkup Kota Palembang, serta dokumen pelaksanaan rencana pada institusi terkait yang terlibat dalam Rencana Induk Kelitbangan. Hasil evaluasi paruh waktu ini digunakan untuk melakukan penyesuaian terhadap indikasi program yang akan dilaksanakan sampai pada sisa tahun pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan.

- b. Evaluasi akhir tahun pelaksanaan, dalam rangka pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program kelitbangan, sekaligus dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Induk Kelitbangan periode berikutnya.

Evaluasi pelaksanaan kelitbangan sebagai dasar perbaikan terhadap kelemahan dan hambatan yang terjadi. Indikator yang digunakan dalam kelitbangan adalah:

- a. Indikator Input, digunakan untuk mengukur jumlah sumberdaya (dana/anggaran, SDM, peralatan/sarana-prasarana, material lainnya) yang digunakan untuk mencapai tujuan program.
- b. Indikator Proses, untuk menggambarkan perkembangan/aktivitas yang dilakukan/terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Indikator Keluaran (Output), untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan, sejauhmana terlaksana sesuai rencana.
- d. Indikator Hasil (Outcome), untuk menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan.
- e. Indikator Dampak (Impact), digunakan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan umum dari program.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan pada tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan atau evaluasi hasil atau pada akhir pelaksanaan kegiatan. Pemantauan dan evaluasi didasarkan atas pencapaian terhadap tujuan dari kelitbangan. Indikator implementasi yang dipakai dalam pemantauan dan evaluasi sebagai berikut:

- a. Kehadiran /keterlibatan pelaku kelitbangan dalam setiap tahapan kegiatan;
- b. Kehadiran/keterlibatan pengambil keputusan dalam setiap tahapan kegiatan;
- c. Kualitas kinerja peneliti/perekayasa;
- d. Dukungan pemerintahan lokal dalam setiap tahapan kelitbangan;
- e. Tingkat pemanfaatan SDM, sarana dan prasarana, dukungan alat kerja yang memadai efektif efisien, dan produktif;
- f. Keberlanjutan pengembangan dan pemanfaatan hasil kelitbangan;
- g. Tanggung jawab dan pertanggungjawaban yang transparan;
- h. Mekanisme dan prosedural yang dijalankan; dan
- i. Pemecahan masalah dan saran tindaklanjut.

BAB V

PENUTUP



BAB 5 PENUTUP

Dengan selesainya penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kota Palembang yang merupakan arahan dalam penyelenggaraan fungsi kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Palembang ini, diharapkan dapat menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Terutama menjawab berbagai tantangan dan permasalahan perkotaan yang ada di Kota Palembang, serta mampu merumuskan strategi kebijakan dan prioritas pembangunan secara terpadu dan berkesinambungan.

Akhir kata Tim Penyusun mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas bantuan semua pihak yang membantu dan mendukung terlaksanakannya dan terselesaikannya kegiatan penyusunan Laporan Akhir dari keseluruhan kegiatan Rencana Induk Kelitbangan Kota Palembang 2024-2029. Tim penyusun juga menyadari adanya beberapa kekurangan dalam penyelesaian dokumen Laporan Akhir ini, oleh karenanya kritik dan saran merupakan hal yang sangat dibutuhkan demi menjaga kualitas dan kinerja tim penyusun untuk dapat memenuhi mutu kerja yang telah disepakati sebelumnya.

WALIKOTA PALEMBANG,